

Krisis Ekonomi Global dan Politik Persatuan Nasional

*Rudi Sabrawi*¹

Memahami Krisis Finansial

Sistem ekonomi kapitalisme, seperti yang dijelaskan oleh Marx dalam *capital*, akan selalu berhadapan dengan krisis-krisis umum, yang dapat dijelaskan oleh penyebab utama (mono-causal); (1). Ketidakseimbangan antara produksi kapitalis dengan kebutuhan nyata masyarakat, yang selalu dijelaskan dengan anarkisme produksi. (2). Ketidakseimbangan antara keluaran (kapasitas produksi) dengan kemampuan konsumsi massal—yang parameternya adalah upah (daya beli) masyarakat. (3). Akumulasi berlebihan, yakni tidak cukupnya produksi nilai lebih, dibandingkan dengan jumlah kapital yang diakumulasikan. Ketiga faktor ini, dalam sirkuit produksi kapitalis, selalu membimbing pada krisis-krisis umum, yang kedalaman dan tingkat kerusakannya berakumulasi, hingga pada keruntuhannya.

1 Penulis adalah Koordinator Dept. Kajian, Informasi dan Komunikasi Dewan Pimpinan Nasional Serekat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) dan aktivis Front Rakyat Menggugat (FRM)

Sejak tahun 1970-an, persisnya sejak periode keemasan kapitalisme berakhir, sistem kapitalis mendapati dirinya pada situasi stagflasi ekonomi, yaitu kombinasi antara pertumbuhan yang rendah dan inflasi. Di negara-negara kapitalis maju (AS dan Inggris) terjadi krisis kelebihan produksi, yang selain didorong oleh kenaikan harga minyak dunia, juga disebabkan oleh pertumbuhan kapasitas produksi Jepang dan Jerman, serta proses industrialisasi yang berjalan di Korea Selatan, Brazil, Taiwan, dan Argentina.

Seperti yang dijelaskan oleh Keynes, bahwa krisis kapitalisme modern, yang mengacu pada *great depression*, masih mungkin untuk terus terjadi, sehingga memerlukan pencegahan berupa; *full employment*, pemanfaatan seluruh kapasitas produksi, dan pertumbuhan. Tapi pengamatan kami dalam beberapa tahun menunjukkan, kapitalisme mengatasi stagflasi dengan pemotongan pajak, deregulasi, privatisasi, dan pasar tenaga kerja yang fleksibel—apa yang disebut neoliberalisme dan turunannya *Structural Adjustment Program* di negara berkembang.

Neoliberal tidak menyelesaikan masalah. Pertumbuhan ekonomi, yang menjadi mimpi mereka, justru terus menurun dari tahun ketahun. Tahun 1970-an lebih lambat ketimbang 1960-an, tahun 1980an lebih lambat ketimbang 1970-an, 1990-an lebih lambat dari tahun 1980-an, demikian pula dengan tahun 2000-an. Kemunduran ini terus diusahakan untuk diantisipasi, salah satunya dengan mencoba mendorong permintaan, tapi bukan dengan menaikkan upah dan investasi ke publik, melainkan menaikkan anggaran militer, yang juga dikembangkan sebagai strategi imperium menguasai sumber daya alam dunia, terutama perang Irak dan Afghanistan.

Cara lain untuk memerangi stagflasi adalah pertumbuhan sistem keuangan (finansialisasi). Finansialisasi adalah pergeseran kuat dari ekonomi riil (ekonomi yang berpusat pada produksi) ke spekulasi keuangan. Sistem kapitalisme, disadari atau tidak, benar-

benar bergantung pada proses finansialisasi untuk memerangi kemandekan produksi dan investasi, setidaknya sejak tahun 1960-an, semakin meningkat tahun 1970-an, dan makin menggila pada tahun 1990-an. Finansialisasi, yang telah meniupkan satu gelembung ke gelembung yang lainnya (secara ideologis dibenarkan oleh neoliberalisme), telah mendorong pertumbuhan ekonomi AS dan negara-negara lainnya. Mereka telah diperluas dan telah menggabungkan sistem perbankan seluruh dunia. Sistem ini begitu hiperaktif, dan karena beroperasi tanpa kontrol manapun, sanggup mengambil resiko-resiko berbahaya untuk melayani “keserakahan” para kapitalis.

Pada tahun 1990-an, terutama bagi negara kapitalis maju, perekonomian sedikit menuai sukses dari *booming* penggunaan teknologi baru di internet. Dibimbing oleh nafsu keserakahannya, para investor menarik semua dananya dan memasukkan ke dalam bisnis ini, sehingga mencapai gelembung yang tidak realistis pada tahun 2000-2001. Untuk mengatasi ini, *Federal Reserve* menurunkan suku bunga. Hasilnya, kebijakan uang longgar telah menggiring kepada gelembung baru. Dan ketika itu runtuh menjadi resesi, Bank Sentral dibawah Alan Greenspen memotong bunga prima menjadi 1 persen, yang merupakan tingkat terendah selama 45 tahun.

Bersamaan dengan itu, upah real benar-benar telah jatuh, dan pendapatan rumah tangga menurun 4 % sejak 2003-2004. Sepanjang 2003-2004, rumah tangga di AS sudah mengumpulkan dana 3 trilyun. Hal tersebut, semakin mengarah pada gelembung baru ketika *Securities and Exchange Commission* (SEC) mengubah kebijakan tentang investasi, dengan mengijinkan bank investasi mengambil resiko yang lebih besar, dengan mempermudah dan memperluas peminjam kredit KPR (*subprime mortgage*), termasuk yang beresiko tidak dapat mengembalikan pinjaman, padahal bersamaan dengan lonjakan harga perumahan.

Di bulan September 2006, dalam laporannya tentang sekuritas keuangan global, badan direksi IMF telah mengekspresikan kekhawatiran tentang pertumbuhan pesat *hedge fund* dan kredit *derivative*, yang secara sistematis dapat menciptakan keguncangan sistem finansial, bersamaan dengan perlambatan ekonomi AS dan mendinginnya kredit perumahan, akan melahirkan “turbulensi finansial.

Sejak kejatuhan kredit KPR (*subprime mortgage*) pada bulan juni tahun 2007, pasar keuangan menjadi panik dan kian tak terkendali, serta mempengaruhi sektor yang lain; tingkat pinjaman perumahan, kertas komersial, penyedia jaminan obligasi, pinjaman hipotek komersil, obligasi perusahaan, kartu kredit, dan simpanan pelajar.

Karena keuntungan sangat bergantung pada aksi-aksi spekulatif, maka tidaklah mengejutkan bila sektor finansial hinggap dari satu gelembung ke gelembung lainnya, atau dari satu mania spekulatif ke mania lainnya. Karena dikendalikan oleh mania spekulatif, kapitalisme yang dikendalikan finansial mengalami serangkaian krisis finansial sejak pasar modal dideregulasi dan diliberalisasi pada tahun 1980an.

Lehman Brothers, Merrill Lynch, Fannie Mae, Freddie Mac dan Bear Stearns, merupakan deretan institusi finansial yang menjadi korban pertama dari kekisruhan kredit perumahan. Dan karena krisis ini melebar menjadi krisis finansial dalam pasar keuangan, maka dengan segera, menyerang dan menghancurkan hampir semua institusi keuangan yang berkaitan di AS dan di Eropa, dan terus menular ke belahan dunia lainnya.

Kerusakan Yang Ditinggalkan Krisis Finansial

Beberapa langkah meredam krisis, seperti yang sedang didemonstrasikan saat ini (nasionalisasi wall-street, dana bailout

sebesar 700 milyar USD, dll) lebih jauh tak akan sanggup menghentikan kerusakan lebih parah dari krisis. Pusat krisis adalah sektor keuangan, tapi sektor produksi sudah merasakan dampaknya, dan akan berlansung lebih cepat ketimbang yang dipikirkan. Tiga besar produksi otomotif AS, yaitu General Motor (GM), Ford, dan Chrysler, mengalami kerugian besar. Mereka sedang memperjuangkan dana talangan untuk sektor Industri, dan jika itu gagal, maka pilihan mereka berikutnya adalah melakukan merger. *Output* dari produksi AS terus menurun, untuk tahun ini saja telah menyebabkan 750 ribu orang kehilangan pekerjaan, dan 159 ribu untuk bulan September saja.

Kebijakan pemerintah AS, yang mencerminkan sosialisme untuk orang kaya dan membunuh orang miskin, telah mendorong stagnasi dalam kehidupan ekonomi masyarakat AS (di Amerika Serikat, ada 51 juta orang yang hidup dalam kemiskinan; dari mereka, 35 juta menderita dari kelaparan). Ribuan keluarga di kota-kota seperti Los Angeles dan San Francisco sudah tinggal di tenda-tenda atau tidur di kendaraan mereka, karena mereka telah kehilangan rumah.

Beberapa alasan kenapa serangkaian krisis tak sanggup menyelesaikan masalah;

Pertama, krisis financial tidak akan *merestrart* pertumbuhan ekonomi kapitalis. Artinya, stagflasi yang menjadi akar dari krisis ini, akan semakin memperparah kemunduran ekonomi kapitalis.

Kedua, krisis telah meloncati lingkup krisis finansial, dan telah meronrong pada krisis komoditas dan produksi pertanian, kejatuhan manufaktur, dan kejatuhan laba (keuntungan).

Ketiga, masalah serius bagi ekonomi AS, dan menjadi ancaman bagi ekonomi dalam jangka waktu yang cukup panjang, adalah peningkatan hutang. Hutang rumah tangga meningkat

dari 50 persen dari PDB pada tahun 1980 menjadi 71 persen pada 2000, dan menjadi 100 persen pada tahun 2007. Pinjaman siswa adalah dua milyar dollar dalam tahun 1996-7, tapi meningkat \$17 milyar di tahun 2006-7, menurut Badan Pendidikan. Pasar tenaga kerja kesulitan melunasi pinjaman yang jumlahnya telah melebihi rata-rata \$20,000. Utang sektor keuangan adalah 21 persen dari PDB pada tahun 1980, namun telah meningkat menjadi 83 persen untuk tahun 2000, dan 116 persen dari PDB tahun 2007. Pemerintah membayar utang untuk pemotongan pajak orang kaya dan perang di Timur Tengah. Total hutang Amerika (hutang rumah tangga, bisnis, dan pemerintah) telah meningkat dua kali lipat sebagai proporsi dari PDB sejak 1980 dan 350 persen dari PDB sekarang. bahkan sebelum mengambil terbaru dramatis pada hutang baru oleh pemerintah. Hal ini adalah masalah struktural, karena perekonomian tidak dapat tumbuh dengan utang yang terlampaui tinggi.

Keempat, kejatuhan daya beli masyarakat, yang sekarang ini mencapai 40-50%, terutama lapisan social dari pekerja, kulit hitam, dan etnis lainnya, yang selama ini terdiskriminasi oleh kebijakan ekonomi penguasa amerika.

Makna politik dan Ideologis Krisis Finansial

Jangan panik! Demikian teriakan pemimpin bank sentral dan pemimpin negara kapitalis di seluruh dunia. Yang menarik, sekaligus mengundang kontroversi pihak kiri maupun kanan, adalah intervensi lebih jauh dari negara---sesuatu yang diharamkan oleh penganjur neoliberal---dan kemungkinan restrukturisasi baru sistem kapitalisme global untuk tata-dunia baru kapitalisme.

Pemerintah AS telah meluncurkan dana talangan sebesar 700 milyar USD. Pemerintah AS juga telah meluncurkan paket

kebijakan AIG, perusahaan financial terbesar di dunia, dan membiarkan lehman brother mati. Di Eropa, pemerintah sepakat untuk mengambil alih sejumlah bank bermasalah dan menerapkan aturan baru dalam melakukan investasi.

Hantu “sosialisme” kini mengetuk pintu wall-street. Sebuah fenomena menarik terjadi di majalah bergengsi “*the economics*”, yang katanya dipersembahkan kepada marx dan sosialisme, yaitu sebuah karton yang menggambarkan presiden Sarkozy, presiden Perancis, sedang membaca “*das capital*” didepan gedung perjudian wall-street, New York. Lebih jauh lagi, presiden Sarkozy mengatakan bahwa “ide pasar adalah selalu benar adalah ide gila”.

Di AS, krisis finansial telah memberikan energi baru kepada perubahan politik, yang sayangnya ditangkap oleh Obama dan Demokrat, bukan oleh kaum sosialis dan pekerja. Krisis finansial benar-benar telah mendorong masyarakat pada ketidakpuasan terhadap skema kebijakan ekonomi partai berkuasa, partai Republik, dan memberikan pilihan kritis kepada capres yang dianggap dapat menguasai persoalan ekonomi dan menuntaskan krisis. Sebuah aliansi politik dirancang oleh demokrat dan kaum tengah yang berdiri di belakang Obama, untuk mendominasi legislatif dan eksekutif, sebagai jalan memudahkan penyelesaian politik terhadap krisis di tahun depan.

Di Jerman, yang selama puluhan tahun dijaga oleh kebijakan sosial demokrasi (regulasi kapitalisme untuk melindungi kepentingan buruh, program social seperti pendidikan, dana pension, kesehatan, dll), akhirnya mengalami krisis setelah beberapa tahun terakhir cenderung menerapkan politik neoliberal. Bahkan dua partai utama yang berkuasa, yakni Kristen Demokrat dan Sosial Demokrat, sudah mengalami krisis akibat kecenderungan neoliberalisme. Situasi ini mendorong hasil pemilihan umum

bergeser kepada partai kiri yang lebih tegas menawarkan politik anti-neoliberal, yaitu Die Linke.

Pemerintahan kapitalis dimanapun, termasuk pendukung fanatiknya dimana saja, tentu tak mau membiarkan sistem ini terkapar begitu saja, tanpa usaha merestrukturisasi diri. Presiden Sarkozy dari Perancis, bersama dengan Jerman, berada di garda depan dalam seruannya untuk menghidupkan kembali bretton woods, yang sudah dilikuidasi sejak tahun 1971. Proposal Perancis dan sekutu Eropanya, yang kemudian diloloskan dalam pertemuan pemimpin Asia dan Eropa (ASEM) di Beijing (22/10/08), telah memberikan sinyalemen terhadap kembalinya bretton woods jilid II tersebut. Tentu AS kesulitan menolak proposal ini, ditambah dengan kuatnya dukungan banyak pemimpin dunia, termasuk PM Inggris, Gordon Brown, yang selalu menjadi sekutu AS.

Pengaruhnya Bagi Indonesia

Globalisasi telah menyatukan ekonomi nasional, terutama sektor keuangannya, dalam sebuah unit tunggal yang beroperasi secara global. Pengaruh dari stagflasi di AS, telah dilemparkan ke berbagai belahan dunia lewat skema penyesuaian struktural, demikian pula dengan finansialisasi yang telah menyatukan ssstem keuangan global, dalam ekonomi gelembung dan resesi.

Indonesia, yang sudah lama mengintegrasikan diri sistem financial global, tentu tak akan dilewatkan oleh krisis. Seperti pengalaman yang berlansung saat krisis menyapu Asia Tenggara pada tahun 1997, pemerintah Indonesia belum membangun pertahanan ekonomi yang cukup kuat untuk membentengi ekonomi dalam negeri dari gempuran krisis.

Berikut beberapa pengaruh krisis di AS terhadap ekonomi Indonesia. *Pertama*, krisis finansial di AS akan mempengaruhi

perdagangan Indonesia. Seperti diketahui, AS merupakan salah satu tujuan utama ekspor Indonesia, setelah Jepang. Krisis finansial di AS akan berdampak pada berkurangnya permintaan, sehingga menurunkan volume ekspor kita.

Kedua, kejatuhan harga komoditas dan energi akibat krisis finansial, menyebabkan sektor pertanian yang bergantung pada ekspor komoditas (CPO, jagung, kedelai) akan merugi. Dampaknya sudah merata, terutama sektor perkebunan sawit, yang mengeluhkan jatuhnya permintaan dan harga yang begitu murah.

Ketiga, sektor industri dalam negeri akan kesulitan mendapatkan pinjaman dan kredit murah, akibat penerapan kebijakan pengetatan pinjaman Bank. Jika pemerintah tak segera bereaksi untuk menurunkan harga BBM, baik industri maupun rumah tangga, maka dipastikan sektor industri menderita kesulitan besar.

Keempat, rendahnya kemampuan daya beli masyarakat Indonesia, disebabkan oleh neoliberalisme yang begitu agresif menyerang kesejahteraan rakyat, membawa kehidupan rakyat pada derajat paling dasar. Saat ini, ketika ekspor jatuh dan pemerintah mencoba mengalihkan kepada penguatan pasar didalam negeri, karena memang cukup potensial (230 juta), akan tetapi tentu mengalami kegagalan yang disebabkan kejatuhan daya beli umum masyarakat.

Dampak langsung krisis ini mulai terasa. Setidaknya, beberapa sektor sosial sudah menjerit akibat krisis finansial ini. Krisis ini, akan semakin terasa dampaknya di awal 2009, manakala pemerintah AS ternyata tidak sanggup melunasi utang-utangnya, yang akan berdampak luas pada kemunduran ekonomi secara global.

Langkah Antisipasi Pemerintah

Sejauh ini, beberapa langkah pemerintah mengantisipasi krisis patut diberikan evaluasi, mengingat langkah-langkah tersebut belum berarti dalam membangun tanggul kuat, guna mengantisipasi banjir ekonomi AS. Kelihatan dengan jelas bahwa pendekatan pemerintah belum bergeser dari kebijakan neoliberalisme. Dan kelihatan pula bahwa beberapa kebijakan dan respon pemerintah terhadap krisis finansial begitu dikendalikan oleh institusi keuangan wall-street dan petinggi yang sedang bankrut, untuk mendapatkan suntikan dana tambahan.

Beberapa langkah SBY, yang bisa dihitung disini, merupakan kebijakan yang serupa dengan langkah pemerintah AS dalam menangani krisis, seperti menggelontorkan dana talangan (bailout), yang dengan susah payah dikumpulkan dari masyarakat, sebesar 700 milyar kepada bank dan institusi keuangan yang keok. Di Indonesia, pemerintah SBY pun meluncurkan dana talangan kepada investor asing lewat program *Buy-back* BUMN, yang justru menggerus APBN. Selain itu, untuk mengamankan perbankan, terutama simpanan orang kaya, pemerintah hanya mengeluarkan infrastruktur legal berupa Perppu JPSK, yang hanya bertujuan untuk tetap menjaga likuiditas perbankan.

Kebangkrutan Bank Indover, Bank tertua di Indonesia (cabang dari De Javasche Bank yang dinasionalisasi) yang tak sempat ditolong pemerintah, telah menjadi pertanda awal akan sistem pengamanan perbankan nasional, terhadap kerentanan di jangkiti penyakit finansial. Bank Indonesia membatalkan paket penyelamatan Bank Indover 546 juta euro (Rp7,64 triliun) dan merelakan bank sentral Belanda melikuidasi lembaga keuangan yang beroperasi di Amsterdam itu. Sebelumnya, karena beberapa paket liberalisasi, termasuk sektor perbankan, beberapa bank dalam negeri sudah diambil alih atau diakuisisi oleh Bank Asing,

seperti Bank Ekonomi, Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), PT Bank Nusantara Parahyangan (BNP), Bank Niaga, CIMB group dan Bank Danamon, dan BCA.

Selain itu, kebijakan kontrol valas yang dimaksudkan untuk mendapatkan tambahan dollar, guna menyelamatkan rupiah yang terus melorot, juga berdampak tidak signifikan terhadap penyelamatan rupiah itu sendiri. Kini, kalau pemerintah berani, seharusnya menerapkan kontrol devisa, untuk memaksa seluruh BUMN, pengusaha swasta nasional, eksportir, yang selama ini memarkir dananya di bank-bank luar negeri, menarik dananya dan menyimpannya pada bank yang ditunjuk pemerintah.

Sampai sekarangpun, pemerintah tak bergeming dengan keruntuhan infrastruktur finansial global dan tetap menyakini bahwa dana cadangan Indonesia yang bernilai 55 milyar USD, tapi menapikan kemungkinan-kemungkinan aksi-aksi spekulasi yang berpotensi menjebol cadangan tersebut. Tidak ada jaminan bahwa dana cadangan devisa yang besar akan mengamankan ekonomi nasional dari serangan krisis, karena krisis yang terjadi lebih disebabkan oleh aksi spekulasi, maka Negara yang kuat fondasi ekonominya pun bisa hancur lebur, apalagi Indonesia.

Di sektor industri, yang dalam beberapa hari ini satu per satu mulai rontok (tekstil, kayu/meubel, dan lainnya), usaha pemerintah untuk melindunginya pun masih bersandar pada jalan neoliberal. Pemerintah telah memutuskan SKB empat menteri yang menciptakan mekanisme pengupahan yang baru, dimana peran negara dilepaskan sama sekali dan sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme bipartit (pengusaha dan pekerja), dan bahwa kenaikan upah tak boleh melebihi target pertumbuhan ekonomi 2009. Intisari dari SKB empat menteri ini adalah melepaskan beban kejatuhan laba kapitalis via pemotongan kesejahteraan buruh.

Padahal di Eropa, pemerintahnya mulai sadar bahwa usaha meminimalkan gejala krisis finansial, salah satunya, adalah dengan mengalihkan dana untuk mendorong sektor real bangkit. Di Indonesia, perangkat kebijakan pemerintah melepaskan sektor real terjun bebas, dan dipaksa bertahan hidup dengan memangsa buruhnya, selanjutnya dana dikumpulkan untuk mengalirkan likuiditas dana investor di bursa saham.

Tawaran Solusi Jangka Pendek

Dalam waktu dekat ini, seharusnya perhatian pemerintah tertuju pada usaha memperkuat benteng ekonomi nasional terhadap serbuan krisis finansial, terutama melepas ketergantungan terhadap ekonomi imperialisme. Ancaman terbesar terhadap perekonomian nasional saat ini, setidaknya dalam jangka waktu beberapa bulan kedepan, adalah maraknya aksi-aksi spekulasi, kelonggaran bagi investor memasukkan dan menarik modalnya dari Indonesia, serta ketergantungan ekonomi nasional pada modal jangka pendek (*fortopolio*) yang begitu sensitif terhadap gejala ekonomi yang berasal dari luar.

Pemerintah tidak bisa hanya menciptakan aturan legal, berupa Perppu JPSK, untuk melancarkan likuiditas, tanpa berupaya memotong sirkulasi yang berusaha mengalirkan modal didalam negeri keluar, terutama *Hedge fund* dan investor asing. Pemerintah perlu menciptakan regulasi yang membatasi aksi-aksi spekulasi, memotong aliran dana keluar (*capital flight*), serta kebijakan control ketat terhadap mata uang guna mempengaruhi aksi-aksi jual-beli dollar yang memukul rupiah, inflasi, dan sebagainya.

Tindakan-tindakan tersebut, meskipun tergolong moderat, tentu akan mengkoreksi sistem neoliberal yang dipatuhi

pemerintahan SBY-JK. Sehingga diperlukan sebuah institusi yang punya kredibilitas, dan akan mengambil alih wewenang dan pekerjaan tim ekonomi SBY (yang dikomandoi Sri Mulyani, cs) sampai batas yang tidak ditentukan, untuk mengendalikan ekonomi nasional dari kerentanan terpukul krisis.

Diperlukan sebuah institusi politik, yang menggabungkan ekonom anti neoliberal, politisi dan cendekiawan pro-rakyat, yang punya kewenangan besar dalam mengambil langkah-langkah ekonomi dalam mengendalikan situasi, karena secara “*de facto*” SBY-JK dan tim ekonominya telah terhitung “GAGAL”. Landasan konstitusional untuk ini sangat dimungkinkan oleh hukum formal, karena negara dalam sebuah situasi “darurat” yang dapat dipersamakan dengan tsunami yang akan membunuh banyak manusia, terutama kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Berikut beberapa rekomendasi, yang seharusnya di jalankan, dan sejak awal dikampanyekan, oleh Komite Penyelamatan Ekonomi Bangsa;

1. Melakukan nasionalisasi terhadap perbankan, terutama bank-bank yang sedang berhadapan dengan kesulitan keuangan.
2. Menggantikan rejim devisa bebas dengan kontrol devisa, dengan mewajibkan BUMN, pengusaha swasta nasional, dan seluruh pelaku ekspor di dalam negeri, untuk menarik dananya dari bank-bank diluar negeri untuk disimpan di dalam negeri.
3. Menurunkan suku bunga bank untuk memberikan kelonggaran kepada sektor real.
4. Pembekuan sementara bank-bank asing, karena mereka dapat menjadi perisai berbahaya terhadap regulasi finansial dalam situasi krisis.
5. Menghentikan dan memulihkan dana talangan, dengan menggunakan aset-aset bank yang ada, serta memperluas

- peran negara untuk meregulasi asset pemegang saham.
6. melakukan kontrol terhadap mata uang (*Currency Exchange Control* - CEC). Harga dollar dipatok untuk periode yang lama dan terlepas dari tingginya angka inflasi yang tercatat dalam ekonomi nasional sebelumnya. Mekanisme CEC akan memberikan pertahanan yang cukup bagi Indonesia menghadapi krisis finansial, meskipun tanpa melibatkan cadangan devisa.
 7. Memberlakukan pajak terhadap setiap transaksi finansial dan valuta asing.
 8. Mendorong institusi keuangan untuk melakukan investasi non-profit, terutama dalam menyalurkan kredit murah kepada rakyat miskin dalam mengembangkan ekonominya, serta investasi sosial lainnya; pendidikan dan kesehatan.
 9. Menghentikan aliran dana *buy-back*, untuk kemudian dialihkan kepada investasi sosial.

Menggagas Haluan Ekonomi Berdikari

Langkah-Langkah antisipasi dari Komite Penyelamatan Ekonomi Bangsa hanya merupakan aksi sementara untuk meredam gejolak krisis, tapi belum berkemampuan panjang dalam menolong ekonomi nasional dari keterpurukan akibat neoliberalisme. Perlu untuk ditekankan bahwa krisis finansial hanya merupakan salah satu gejolak dan kegagalan dari sistem kapitalisme, sehingga perlu difikirkan alternatif ekonomi yang lebih adil, humanis, demokratik, dan kerakyatan, untuk mengatasi kerusakan dibawah kapitalisme.

Meskipun dituduh naif menyebut “sosialisme”, tapi hantu sosialisme telah membayang-bayangi berbagai peristiwa politik dan ekonomi di balik penyelesaian krisis ini. Rakyat Indonesia, dan juga pekerja dan kaum terpinggirkan secara ekonomi di berbagai belahan dunia, sudah cukup lama menanggung beban

dari keserakahan kapitalis, yang berwujud neoliberalisme—kapitalisme yang membusuk.

Pemerintahan SBY-JK, berikut kebijakan neoliberalnya, jelas sudah mengalami kebangkrutan. bersamaan dengan itu, proposal anti-neoliberal dari berbagai spektrum politik semakin mendapatkan tempat dalam ruang-ruang massa. Hal tersebut, agar tak dimanipulasi oleh kepentingan politik elit oportunistis ataupun jargon-jargon kosong spektrum politik Islam konservatif (PKS-HTI-PBB-PPP) dengan syariat Islamnya, maka perlu mengajukan proposal konkret tentang kemandirian nasional yang berdasarkan pada program tri-panji persatuan nasional, sebagai solusi krisis ini di hadapan massa. Forum perdebatan, diskusi, workshop, seminar, media cetak, hingga aksi-aksi massa perlu dijadikan lahan mempropogandakan tripanji persatuan nasional sebagai solusi.

Merebaknya nasionalisasi terhadap sejumlah perusahaan finansial di Eropa, yang lebih merupakan versi penyelamatan kaum kaya, semakin menegaskan dan memperkaya seruan PAPERNAS untuk melancarkan nasionalisasi terhadap sejumlah perusahaan tambang asing dan aset-aset strategis lainnya, sebuah versi nasionalisasi sejati; mengalihkan keuntungan perusahaan yang diambil dari tangan segelintir kaum kaya kepada mayoritas kaum miskin.

Untuk memperjuangkan tripanji, maka harus diperjuangkan pula langkah-langkah minimum yang paralel dengan tripanji, seperti;

Menurunkan harga BBM dan pencabutan UU nomor 22 tahun 2001 tentang migas, karena telah menjadi pintu bagi liberalisasi sektor energi Indonesia, khususnya migas.

Nasionalisasi perusahaan pertambangan milik asing, jikalau dirasa belum sanggup, maka secepatnya pemerintah

merombak skema kontrak bagi hasil untuk memacu peningkatan penerimaan negara dari sektor pertambangan.

Pemerintah harus menjamin pasokan energi, terutama BBM, untuk kebutuhan rakyat dan industri. Untuk kebutuhan industri, pemerintah juga harus memperluas peran KPK untuk membersihkan korupsi dan pungli yang merintangai pertumbuhan industri nasional.

Mendorong industrialisasi nasional, dengan meletakkan pembangunan pertanian sebagai dasar dan industrialisasi sebagai arahnya; pengembangan industri berbasis pertanian, dengan terlebih dahulu mengalokasikan kredit yang cukup dan berkelanjutan kepada petani, jaminan ketersediaan lahan, mengembangkan/memajukan/modernkan alat produksi pertanian, dan perlindungan harga hasil produksi pertanian melalui pengaturan mekanisme pasar serta subsidi harga komoditi pertanian;

Mengontrol kenaikan harga sembako dan membersihkan jalur distribusi pangan dari perilaku mafia; penimbunan dan penyelundupan.

Menaikkan anggaran pendidikan dan kesehatan hingga dapat diakses dengan mudah oleh seluruh rakyat.

Menaikkan upah buruh secara nasional, minimal sebesar Rp. 1,2 juta (berdasarkan survey FNPBI); menghapuskan sistem kontrak dan *outsourcing*.

Memperjuangkan pencabutan seluruh UU yang berbau neoliberal, seperti UU nomor 22 tahun 2001, UU PMA, UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU SDA, dan sebagainya, serta membatalkan semua kesepakatan perdagangan dengan WTO.

Melindungi dan memberikan insentif kepada seluruh produk ekspor dengan cara menurunkan tariff ekspor dan menaikkan tarif impor produk sejenis.

Mendukung inisiatif kerjasama regional yang berdasarkan solidaritas, terutama dalam kerjasama menyiapkan dana bantuan bersama yang dapat dipinjamkan kepada negara anggota yang membutuhkan.

Mengenai Politik Persatuan

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada bulan Mei tahun 2008 menjadi lahan pembedahan bagi kaum pergerakan atas kegagalan pemerintahan SBY-JK. Perlawanan untuk menentang kenaikan BBM telah menjadi kesempatan emas “merangkai” persatuan diantara kekuatan-kekuatan progressif baik di kalangan kiri maupun non-kiri, yang bertujuan membangun kerangka politik yang lebih strategis; pemerintahan alternatif. Dalam praktiknya, begitu banyak front yang muncul, begitu banyak aksi-aksi yang berjalan sendiri-sendiri, yang bukan saja gagal mendorong front persatuan yang lebih luas, tetapi juga gagal dalam membendung rencana pemerintahan SBY menaikkan harga BBM.

Terbentuknya Front Rakyat Menggugat (FRM)

Konsolidasi dikalangan gerakan sudah berjalan sebelum kepastian pemerintah berencana menaikkan harga BBM. Di luar itu, beberapa elit politik juga menggelar sejumlah konsolidasi politik guna melakukan *manuver* terhadap pemerintahan SBY. Terlepas dari motif utama dari dua konsolidasi berbeda ini, terdapat kesamaan isu utama yang mengemuka yaitu sikap politik anti-neoliberalisme.

Di gerakan mahasiswa sendiri, terutama di Jakarta, konsolidasi besar-besaran menjelang bulan Mei diorganisir oleh sejumlah mantan aktifis 1998. Bagi mereka, setiap bulan Mei seakan sudah menjadi ritual khusus untuk bergerak dengan mengambil latar belakang; peringatan kejatuhan rejim orde baru. Sedangkan di tingkatan elit politik, sebuah konsolidasi dikalangan mereka mendorong lahirnya Komite Bangkit Indonesia (KBI), dengan tokoh utamanya adalah Dr Rizal Ramli.

Sebuah konsolidasi yang dirancang oleh KBI Pada tanggal 24 April 2008, berhasil melibatkan berbagai organisasi mahasiswa, serikat buruh, dan serikat petani. Dalam kesempatan itu, Serekat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) dan beberapa organisasi radikal memanfaatkan forum itu untuk menjadi embrio sebuah persatuan yang lebih luas dengan menekankan pada platform anti-neoliberalisme sebagai isu bersama penyatuan baru ini. Dari forum tersebut kemudian lahirlah Front Rakyat Menggugat (FRM).

Pada tanggal 13 Mei, gerakan mahasiswa menggelar aksi peringatan tragedi Trisakti di depan istana negara hingga malam hari. Aksi memanaskan karena mahasiswa berusaha membakar foto presiden dan wakil presiden di depan istana. Berbagai unsur gerakan mahasiswa terlibat dalam aksi ini. Di lapangan tampak unsur dari KAMMI dan BEM se Jabotabek yang juga dipengaruhi oleh KAMMI. Kemudian ada unsur radikal dari gerakan mahasiswa, seperti LMND, Famred, Forkot, GMNK, komite aksi dan lain-lain, yang kemudian dipersatukan dibawah payung Front Rakyat Menggugat (FRM).

FRM menggelar konferensi pers, diskusi terbuka, hingga aksi-aksi kecil di beberapa kampus di Jakarta. Puncaknya, pada tanggal 20 Mei 2008, yang bertepatan dengan hari kebangkitan nasional, FRM melakukan aksi massa dengan jumlah massa 8000

orang menuju istana negara. Aksi ini menarik perhatian karena keterlibatan sejumlah tokoh politik seperti Rizal Ramli dan Rieke Dyah Pitaloka, yang turut berjalan kaki bersama massa menuju istana. Seorang tokoh politik berjalan kaki di tengah massa aksi, tentu saja, mengesankan sebuah situasi politik yang serius. Masyarakat dan pekerja kantoran juga tumpah ruah di pinggir jalan, seperti hendak mengetahui tentang apa yang terjadi.

FRM menyimpulkan bahwa pemerintahan SBY-JK adalah agen neoliberal yang dikendalikan oleh kekuatan asing. Di belakang pemerintahan SBY, berdiri sejumlah partai yang menjadi pendukung loyalnya, sekaligus merupakan penyokong utama neoliberalisme. Karena itu bangsa Indonesia bukan saja menghendaki pergantian kepemimpinan nasional, tetapi juga menghendaki perubahan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri.

Perjuangan paling mendesak, dan mesti diselesaikan terlebih dahulu adalah pembebasan nasional. Dalam tahap ini diperlukan sebuah pemerintahan nasional yang kuat dan mandiri. Sebuah pemerintahan yang akan mengarahkan industrialisasi bagi kepentingan nasional dan pemenuhan kebutuhan hidup rakyat. Sebuah pemerintahan yang melepas ketergantungannya kepada bangsa-bangsa imperialis, dan menciptakan politik luar negeri yang setara dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Dalam mendorong perlawanan anti-neoliberal, perlu ada penyatuan seluruh sektor yang dirugikan seperti pekerja, petani, miskin kota, perempuan, pencinta lingkungan, masyarakat adat, hingga sektor kapitalis dalam negeri. Penyatuan ini diwadahi dalam sebuah alat persatuan yang luas dalam bentuk FRM. Secara program, meskipun tidak dapat dipersamakan dengan program dari sayap kiri pada umumnya, tetapi FRM menegaskan anti-neoliberal, menolak corak ekonomi mafia-barkeley, dengan berkali-kali menegaskan kemandirian nasional.

Dengan platform anti-neoliberal dan persatuan luas, FRM berupaya memnagkul sejumlah elit yang berposisi menentang kenaikan BBM di parlemen untuk berpihak kepada gerakan rakyat. Oleh karena itu, FRM tidak pernah “mengharamkan seorang elit politik mendatangi dan berpidato dalam aksi-aksinya”. Kombinasi taktik inilah yang memungkinkan FRM, dan tidak dimiliki front-front lebih kiri, mampu memperpanjang pemanasan konstalasi politik BBM hingga hak angket BBM. Puncaknya adalah ketika terjadi bentrokan di depan gedung DPR dan di depan Atmajaya.

Beberapa Capaian

Dalam perjalanannya FRM mendapatkan capaian-capaian dan kemajuan yang signifikan. Dalam segi radikalisasi, front berhasil mengkombinasikan aksi-aksi besar yang terkonsentrasi di satu tempat dengan aksi- aksi kecil di kampus-kampus. Di bawah FRM, terdapat Persatuan Mahasiswa Jakarta, yang merupakan kaki FRM di kampus-kampus, seperti IISIP Jakarta, Moestopo Beragama(UMB), Mercubuana, IISIP, YAI, UKI, Borobudur, Sahid, Univ. Pancasila, dan lain-lain. Kampus-kampus ini melepas sekat-sekat antar universitas, dan bersepakat menurunkan bendera-bendera organisasi masing-masing demi persatuan.

Kemajuan secara politik dicapai oleh FRM karena berhasil mempertemukan pertikaian politik di parlemen mengenai BBM dengan aksi massa di jalan-jalan. Aksi FRM di depan gedung DPR, yang berujung bentrok, akhirnya berhasil mendorong mayoritas fraksi di DPR mendukung hak angket. Meskipun kemudian hak angket menjadi tidak jelas arahnya, tetapi berhasil mengungkap penyelewengan pengelolaan migas, dan membangun sentimen anti neoliberal. Misalnya saja pansus hak angket DPR berhasil menemukan fakta keterlibatan USAID dalam penyusunan UU nomor 22 tahun 2001.

Capaian positif juga didapat dari perluasan pembangunan front hingga ke daerah-daerah seperti Makasar, Lampung, Medan. Front ditingkat lokal ini mempunyai nama yang berbeda-beda, tetapi berkoordinasi ke FRM nasional.

Namun dari evaluasi FRM ditemukan beberapa kelemahan yang masih terjadi didalam pembangunan FRM. Dari evaluasi didapatkan kesimpulan adanya kecenderungan di beberapa elemen FRM untuk melakukan aksi-aksi konfrontasi secara terbuka dengan polisi seperti yang terjadi dalam kerusuhan di DPR dan pembakaran mobil di depan kampus Atmajaya. Aksi konfrontasi ini menjadi alasan media dan polisi untuk mencemarkan aksi mahasiswa. Bentuk-bentuk konfrontasi terbuka dengan polisi, disatu sisi dimaksudkan menjaga suhu politik, tetapi disisi lain dijadikan alasan bagi polisi untuk melakukan kriminalisasi atas aksi-aksi rakyat. Hal lain yang gagal dicapai oleh FRM adalah menentukan sikap politik atas momentum Pemilu.

SRMI dan kerangka Politik Persatuan kedepan

Sejak awal, SRMI sudah memutuskan untuk terlibat dalam momentum pemilu 2009. SRMI menjadi salah satu inisiator pendirian partai persatuan, yaitu Papernas, untuk tujuan elektoral. Setelah mengalami kegagalan untuk maju sendiri sebagai partai peserta pemilu, Papernas dan SRMI memilih berkoalisi dengan Partai Bintang Reformasi (PBR). Menurut SRMI sendiri, bentuk koalisi ini sebenarnya adalah sebuah front persatuan.

Dalam proses elektoral 2009, SRMI berhasil mengajukan seorang kadernya menjadi calon DPD mewakili DKI Jakarta. Selain itu, SRMI mengajukan ratusan kadernya sebagai calon legislatif (DPR, DPRD I, dan DPRD II). SRMI menyadari, bahwa tantangan kaum pergerakan dalam arena elektoral adalah

bagaimana menampakkan perilaku politik yang berbeda dengan partai-partai kanan dan partai tradisional. Selain itu, SRMI dituntut untuk menyampaikan keterbatasan-keterbatasan institusi parlementer, sambil mengupaya perubahan yang tidak mungkin terjadi, tanpa merombak tatanan lama dengan yang baru.

Pemilu 2009 benar-benar menentukan; apakah kekuatan pro-neoliberal akan tetap mendapatkan kesempatan melanjutkan kekuasaannya, ataukah kekuatan politik anti-neoliberal justru mengambil kendali. Untuk itu, terutama dalam pertimbangan kekuatan antara kekuatan pro-neoliberal versus anti-neoliberal, maka politik persatuan merupakan alat penting.

Politik persatuan dalam gambaran SRMI adalah penyatuan seluruh unsur-unsur anti-neoliberal sekarang ini (nasionalis progressif, religius progressif, dan sosialis kerakyatan). Maka dalam praktek, SRMI akan merangkum seluruh sektor-sektor sosial yang dirugikan oleh neoliberalisme masuk dalam persatuan.

Ketika menjalankan taktik parlementer, platform utama politik persatuan yang diajukan SRMI adalah kemandirian nasional. Disini, kemandirian nasional dimaksudkan sebagai jalan mengakhiri ketergantungan ekonomi nasional terhadap ekonomi imperialis, menghapuskan susunan ekonomi yang berbau kolonial, serta melapangkan jalan bagi lahirnya politik yang mandiri dan ekonomi yang berdikari. Dalam prakteknya, koalisi persatuan nasional akan menjalankan politik anti-imperialis di parlemen, sebagai contoh; mencabut semua perundangan yang berbau neoliberal, terutama UU nomor 22 tahun 2001 tentang Migas, UU Minerba, UU Penanaman Modal, dan UU Ketenagakerjaan.

Selain itu, SRMI kini sudah bergabung dalam SPARTAN (Sukarelawan Perjuangan Rakyat untuk Pembebasan Tanah Air), sebuah politik persatuan ekstra-parlementer yang menjadi penyokong caleg-caleg aktifis kerakyatan.

Krisis Imperialisme dan Perjuangan Demokrasi Nasional

Shohib Anshary¹

Krisis adalah penyakit bawaan dari sistem ekonomi kapitalisme yang tidak akan pernah ada akhir bahkan semakin kronis. Liberalisme ekonomi dengan pasar bebas yang di gagas kapitalisme telah bangkrut diinjak-injak oleh monopoli sebagai sistem yang dibangunnya sendiri. Lebih buruk dari itu kapitalisme yang telah bertransformasi ke bentuk paling kejam yaitu Imperialisme mengadakan penjarahan dan perampokan dengan bahasa investasi dan pembangunan negara terbelakang. Imperialisme juga menggunakan perang untuk perdagangan senjata dengan bahasa melawan musuh kemanusiaan dan menghancurkan terorisme. Imperialisme pada hakekatnya adalah Perang.

Saat ini dunia memang sibuk menghadapi berbagai soal, mulai dari krisis finansial, energi, pangan, sampai soal perubahan

1 Penulis adalah Sekjen Front Mahasiswa Nasional (FMN) dan aktivis Front Perjuangan Rakyat (FPR)

iklim. Awalnya yang paling disalahkan atas krisis ini adalah ulah para spekulasi di pasar saham yang memainkan berbagai isu untuk keuntungan sendiri. Tetapi belakangan banyak pihak yang sadar bahwa penyebab krisis yang utama bukan hanya ulah para spekulasi, tetapi yang lebih dasar lagi adalah akibat sistem ekonomi imperialisme. Kapitalis monopoli dunia telah menerapkan batas-batas persaingan pasar serta mengakumulasi alat produksi dan hasil produksi di tangan segelintir orang,

Lalu bagaimana krisis yang diawali dengan krisis kredit perumahan untuk rakyat (*Subprime mortgage*) di AS bisa begitu cepat menjalar ke berbagai belahan dunia dan membangkrutkan berbagai perusahaan keuangan, bank dan perusahaan sekuritas hingga memaksa pemerintahan berbagai negara untuk menguras cadangan devisanya untuk menyelamatkan mereka?

Keserakahan Imperialisme adalah Sebab Utama Krisis

Seperti yang telah sedikit diulas, krisis yang meledak dan menjalar begitu cepat ini diawali oleh kredit macet perumahan (krisis *subprime mortgage*) untuk rakyat di AS. Tetapi apakah kredit macet menjadi sebab pokok bagi krisis tentu saja harus kita periksa lebih dalam. Bagaimana dampak kasus kredit macet properti di AS dapat menjalar, bahkan dampaknya terasa sampai ke Indonesia. Apa hubungannya krisis ini dengan kejatuhan saham hingga mendorong penutupan sementara bursa saham di berbagai negara serta kepanikan pemerintah di banyak negara?

Kredit macet properti perumahan di AS terjadi saat rakyat di AS begitu mudah mendapatkan pinjaman dari bank untuk pembelian rumah, dengan jaminan properti itu sendiri sebagai jaminan, kalau di Indonesia disebut dengan kredit pemilikan rumah (KPR), yang terjadi sejak akhir tahun 2000. Pada periode

tersebut di AS sedang terjadi periode penurunan tingkat suku bunga, misalnya Maret 2000 adalah periode runtuhnya saham-saham teknologi ; *burst of internet bubble*. Tetapi di satu sisi proporsi aset mortgage di bank komersial terus meningkat, sehingga mendorong terjadinya tingginya tingkat pembangunan perumahan di AS.

Untuk mengurangi resiko terjadinya resesi ekonomi maka bank sentral (*Federal Reserve/ the fed*) di AS terpaksa menurunkan tingkat suku bunga secara agresif. Dengan suku bunga dari bank sentral (bank fed) maka tingkat suku bunga mortgage juga ikut rendah yang kemudian mendorong terjadinya pembangunan perumahan secara besar-besaran. Dengan suku bunga yang begitu rendah sementara harga rumah terus merangkak naik, pemberi mortgage seolah melupakan resiko gagal bayar dari para peminjam. Dengan ketatnya persaingan, maka strategi pemasaran pun dilakukan dengan bunga yang dibayar begitu rendah selama dua tahun, tetapi setelah itu bunganya akan dinaikan secara signifikan. Jadi bunga baru akan di- *reset* setelah dua tahun. Dengan harga rumah yang terus merangkak naik, sementara bunga baru akan direset setelah dua tahun banyak orang yang mengambil kredit dengan harapan sebelum tahun kedua rumah bisa dijual untuk membayar sisa mortgage.

Tetapi yang harus dilihat *subprime mortgage* adalah kredit berisiko tinggi, karena kebanyakan yang mengambil kredit mortgage adalah kelas pekerja rendahan, termasuk buruh karena tidak adanya jaminan soal pengembalian kredit serta kapabilitas yang memadai untuk membayar kredit. Sehingga yang terjadi kemudian adalah terjadinya gagal bayar atau yang kita sebut kredit macet.

Kredit macet ini terjadi karena dua hal. Pertama terjadi tingkat kenaikan suku bunga yang secara otomatis mendorong

kenaikan suku bunga mortgage yang merupakan investasi tinggi tanpa jaminan keamanan keuangan yang memadai. Kedua adalah anjoknya harga rumah. Turunnya harga rumah telah membuat para pengambil kredit tidak bisa menjual rumahnya untuk melunasi hutang atau pun untuk mengambil hutang baru.

Kredit macet ini sebenarnya mulai terlihat sejak tahun 2004. Saat itu tahun Bank Fed telah menaikkan target tingkat suku bunga : *tightening credit* atau pengetatan/ pengencangan kredit, secara perlahan tingkat bunga naik hingga mencapai 5.25 %. Ketika terjadi kenaikan target tingkat suku bunga, maka secara otomatis bunga untuk hutang pun ikut naik. Sehingga sejak tahun 2004 tingkat kegagalan kredit *subprime mortgage* mulai naik dengan tajam. Puncaknya terjadi pada tahun 2007 ketika pengambil kredit sudah sama sekali tidak mampu mengembalikan pinjamannya akibat suku bunga atas mortgage yang melambung tinggi.

Para pengambil kredit terhimpit oleh dua hal sekaligus. Pertama, terhimpit oleh hutang bank yang bunganya terus naik. Kedua adalah angsuran pembayaran rumah yang akibat bunga naik maka jumlah yang harus di bayar menjadi berkali lipat. Akibatnya terjadi kemacetan total pada kredit perumahan rakyat. Krisis *subprime mortgage* efeknya dengan cepat menjalar keberbagai sektor, memakan korban berbagai lembaga keuangan dan bank-bank investasi yang kemudian merambat cepat bak wabah keseluruh dunia.

Krisis dimulai pada bulan Maret 2008 ketika bank investasi, Bear Stearns yang dibeli JP Morgan Chase dengan nilai US\$ 263 Juta, akuisisi ini di motori Bank Fed AS. Kasus ini kemudian berlanjut pada tanggal 7 September ketika perusahaan pembiayaan rumah terbesar di AS Freddie Mac dan Fannie Mae diambil alih departemen keuangan AS sekaligus menjamin utang

masing-masing perusahaan sebesar US\$ 100 Miliar. Tanggal 15 september Lehman Brothers dinyatakan bangkrut, Merrill Lynch menyatakan diri diakuisisi oleh bank of America dengan nilai sebesar US\$ 50 Miliar, masih diwaktu yang sama AIG mengalami kemerosotan saham hingga 60,8%. Selain itu Bank Fed juga menyuntikan dana kepasar sebesar US\$ 70 Milliar. Sehari berikutnya bank Fed dipaksa menyuntikan dana sebesar US\$ 50 miliar kepasar, selain itu pemerintah AS juga harus menyelamatkan AIG dengan imbalan 79,9% untuk menyuntikan dana sebesar US\$ 85 Miliar untuk perusahaan asuransi raksasa tersebut. Kemudian 26 September 2008 bank terbesar di AS yaitu Washington Mutual (WaMu) kolaps, dan sebagian sahamnya kemudian di beli JP Morgan Chase dengan nilai US\$ 1,9 Miliar.

Krisis ini kemudian mendorong pemerintah AS mengeluarkan UU Penyelamatan Ekonomi Darurat melalui program bailout dengan dana mencapai US\$ 700 miliar. Dana ini terbesar dalam sejarah. Bantuan ini persis seperti kasus “BLBI” di Indonesia. Pemerintah AS juga melakukan pengurangan pajak dan menaikkan jaminan simpanan bank dari US\$ 100.000 menjadi US\$ 450.000. Keadaan ini kemudian menjalar dengan cepat ke penjuru dunia. Bank-Bank di Eropa bertumbangan. UBS AG bank inestasi di Swis menderita kerugian US\$ 13,7 Miliar, HSBC Inggris US\$ 3,4 miliar bahkan Citigroup di AS mendapatkan kerugian mencapai US\$ 24,1 Miliar. Penurunan tingkat suku bunga berlangsung sangat cepat, hal yang sama terjadi di Asia, dimulai dengan tumbanganya Yamato Bank di Jepang.

Krisis ini kemudian melahirkan berbagai tindakan oleh pemerintah di berbagai negara untuk mengatasi krisis yang semakin kronis. Pemerintah Amerika Serikat menyediakan paket penyelamatan senilai US\$ 700 Miliar. Paket ini termasuk didalamnya dana talangan untuk institusi keuangan yang mencapai US\$ 250 miliar, jaminan deposito US\$ 250 ribu, dan dana likuiditas

mencapai US\$ 900 miliar. Pemerintah Inggris mengeluarkan paket senilai US\$ 691. Dana sebesar US\$ 64 miliar disuntikan untuk tiga bank terbesar. Menjamin 439 miliar dollar AS untuk menopang proses peminjaman antar bank. Jaminan deposito mencapai US\$ 87.857 dan dana likuiditas mencapai US\$ 351 miliar melalui cara lelang. Pemerintah Jerman menyediakan dana US\$ 680 miliar. Menyuntikan dana sampai 109.79 miliar untuk rekapitalisasi. Setelah itu dana sebesar US\$ 27.4 miliar akan di sediakan untuk bank-bank yang mengambil jaminan pinjaman. Jaminan deposito tanpa batas dan dana cadangan likuiditas mencapai US\$ 548.9 miliar. Pemerintah Perancis mengucurkan dana US\$ 492 miliar. Dapat menyuntikan dana sampai US\$ 54.89 miliar untuk rekapitalisasi dan mengambil kepemilikan saham. Jaminan deposito mencapai US\$ 95.179 dan dana cadangan likuiditas mencapai US\$ 439 miliar. Pemerintah Rusia menyediakan dana senilai US\$ 200 miliar. Rusia berjanji meminjamkan US\$ 35 miliar kepada perbankan lokal. Perusahaan swasta dapat meminjam mulai US\$ 100 juta sampai US\$ 2.5 miliar. Deposito dijamin penuh. Sementara Asia menyediakan dana senilai US\$ 80 miliar. (*Kompas*, 26 Oktober 2008)

Akibat krisis ini, yang secara kongkrit terkena imbasnya adalah sektor perburuhan. Hampir setiap hari media massa menyiarkan tentang pengumuman PHK yang di lakukan oleh perusahaan-perusahaan perumahan di AS. Countrywide Financial Corporation, pemberi kredit hipotik perumahan terbesar di AS, merumahkan 12 ribu buruhnya. Keputusan yang sama juga diambil oleh Citigroup incorporated, Merrill Lynch, Lehman Brothers Holding incorporated, First National bank holding co, HSBC, Home Lender Holding Co, Scottdale, dan IndyMac Bancorp Inc. (Majalah *Tempo*, 3 Februari 2008). Bahkan analisis dari Third World Network, Kanag Raja memperkirakan korban PHK akibat krisis ini mencapai 5 juta orang, sementara menurut ILO, akibat krisis sekitar 20 juta buruh akan kehilangan pekerjaan.

Bahkan Indonesia yang dikatakan rejim SBY-Kalla tidak perlu panik terhadap krisis karena fundamen negara yang kuat, harus melakukan langkah-langkah yang relatif sama dengan negara-negara lain. Pemerintah mulai dari mengkoreksi APBN untuk tahun 2009, penutupan sementara (Suspend) BEI, sampai mengeluarkan program *Buy Back* terhadap aset-aset BUMN di pasar saham dan penaikan jaminan tabungan dari awalnya 100 juta menjadi Rp 2 miliar dan penerbitan PB 4 menteri. Krisis di negara Induk Imperialisme yaitu AS dapat dipastikan akan berdampak kenegara lainnya. Negeri yang paling menderita akibat krisis itu adalah negara-negara tergantung dan setengah jajahan semacam Indonesia.

Karena disinilah kita memaknai bahwa Imperialisme yang akan selalu menjarah, dan merampok negara-negara lain dengan berbagai cara bahkan dengan kedok bantuan, utang ataupun investasi, dan peranan dari kapital finance lewat lembaga-lembaga keuangan ataupun bank akan sangat penting, karena dari sanalah kapital akan sangat mudah dan cepat untuk dipindahkan kemanapun sesuka hati. Tetapi walaupun begitu yang paling menentukan atas perkembangan ekonomi dari imperialisme adalah produksinya, yang akan dimanifestasikan lewat pasar yang harus dikuasai, dan terus di perluas. Karena finansial dari Imperialisme akan berkembang atau berhenti, bahkan menjadi krisis ditentukan oleh seberapa besar penguasaan atas pasar atas hasil produksi Imperialisme.

Paska keruntuhan pasar bebas diawal abad 19, ditandai dengan runtuhnya perusahaan-perusahaan kapitalis kecil akibat dimakan oleh kapitalis-kapitalis besar dengan berbagai cara, baik merger, akuisisi atau akibat kalah saing dan kemudian bangkrut. Peristiwa ini menjadi awal dari perkembangan kapitalis monopoli. Jadi tidak heran bila saat ini banyak ditemukan perusahaan-perusahaan raksasa berbentuk perusahaan induk (holding company)

seperti Unilever, Mandom, atau MNC lainnya. Dijaman kapitalis monopoli perusahaan tidak memproduksi satu jenis barang untuk tetap menjaga keuntungan dan menjamin mengalirnya laba super yang mereka inginkan tanpa pernah terputus.

Dominasi kapitalis monopoli berpotensi untuk menentukan seluruh perekonomian, karena terjadinya konsentrasi atas sebagian besar kapital industri dan produksi ditangan segelintir perusahaan besar atau segelintir kapitalis. Hingga abad ke 20 imperialisme sebagai tahap tertinggi kapitalisme telah mampu mendominasi secara politik dan ekonomi masyarakat di negara-negara kapitalis besar, sehingga yang bisa kita lihat saat ini adalah dominasi dari kapital monopoli negara. Akibatnya mereka akan mampu secara penuh mengendalikan sumber-sumber bahan mentah, produksi, harga dan pasar, teknologi, keterampilan/kemampuan produksi dan pembagian keuntungan.

Dalam pemusatan kapital oleh segelintir kapitalis, atau yang lazim di sebut oligarki finance, aspek yang cukup penting untuk penetrasi kapital dalam rangka pengembangan dan penguasaan atas pasar bagi produk dari kapitalis akan di lakukan lewat lembaga-lembaga keuangan, seperti perusahaan investasi, asuransi dan juga bank. Bank dalam imperialisme mendapatkan keuntungan bukan hanya dari laba bunga pinjaman, namun juga melalui investasi dengan cara menanamkan modal pada kegiatan produksi. Bahkan dalam beberapa kasus seorang pemilik bank juga menjadi kapitalis produksi atau sebaliknya, karena ini yang akan memudahkan mereka untuk menanamkan kapital. Temasek misalnya selain memiliki bank Danamon, Temasek juga melakukan investasi di telekomunikasi dengan menguasai Indosat tbk, selain itu melalui anak perusahaannya Falaron Finance, mereka memiliki Bank BCA. Hal yang sama juga di lakukan oleh group Lippo selain memiliki bank seperti Lippo bank, mereka juga bergerak di bidang usaha perumahan dan makanan.

Dengan bank sebagai pusat distribusi kapital uang ke berbagai negeri atau bahkan di gunakan sebagai alat produksi, denyut nadi ekonomi masyarakat tergantung pada bank-bank besar lewat praktek peribaannya. Parasitisme dari kapitalis monopoli dilakukan melalui spekulasi, karena bank juga banyak melakukan kegiatan aktif dalam pasar modal. Tentu saja yang digunakan untuk spekulasi dalam pasar modal itu adalah dana dari para nasabahnya, perjanjian penanaman modal tanpa melibatkan diri dalam praktek produksi. Bank akan menerima super profit dari “pajak” yang dibayarkan dari kapitalis monopoli untuk pembelian dari berbagai produk atau bunga pinjaman. Ini bisa didapatkan dari *shares*, *comission*, *bonds* dalam produksi dan penjualan.

Sederhananya peranan dari kapital finance akan sangat penting bagi Imperialisme. Lewat intitusi seperti bank, perusahaan investasi dan perusahaan sekuritas, imperialisme akan memutar kapital dengan cepat. Ekspor kapital pun dilakukan keberbagai negara. Ekspor modal ini disatu sisi akan digunakan untuk memutar modal mereka dengan cara mengekspansi pasar. Sementara di sisi lain ekspor kapital menjadi usaha untuk menguasai pasar di berbagai negara. Negara-negara tergantung dan setengah jajahan yang lemah industri dalam negerinya akan sangat tergantung pada bantuan finansial dari asing. Bahkan perusahaan yang ada di dalam negeri pun akhirnya menjadi milik dari Imperialis. Sudah jadi rahasia umum bahwa, jika Amerika melakukan perjanjian bilateral atau multilateral akan selalu diikuti oleh perusahaan MNCnya.

Dalam Imperialisme pasar haruslah selalu tersedia, karena pasar yang akan menjadi jaminan dari produk-produk negara Imperialis. Karena industri imperialis yang anarkhis tidak pernah tahu berapa kebutuhan dari rakyat dan tidak pernah tahu berapa besar tingkat kemampuan daya beli rakyat. Akibatnya berbagai

produk dari imperialisme, terutama teknologi tinggi harganya akan terus menurun dibanding pertama kali keluar. Penurunan harga ini bukan karena kebaikan imperialis agar rakyat bisa memiliki produk tersebut, tetapi semata-mata akibat overproduksi barang teknologi tinggi, sebagai akibat industri yang berlangsung anarkis dan mengerikan. Bahkan bila perlu Imperialispun akan menciptakan perang, ketegangan antar negara atau apapun yang akan mampu menciptakan pasar senjata bagi industri persenjataan negara imperialis.

Hukum imperialisme akibat industri dan pasar yang anarkhis adalah pasar akan selalu menciut, dan tidak akan pernah cukup. Hal ini terbukti pada pertengahan tahun 2000, ketika industri teknologi mengalami overproduksi, harga saham teknologi menjadi anjlok. Kasus ini dikenal dengan istilah *burst of internet bubble*, yang kemudian memaksa perusahaan jaringan internet raksasa yahoo corp, merumahkan 6000 buruhnya. Atau pun industri peralatan perang dan persenjataan yang memaksa AS terus mempertahankan perang Irak atau Afganistan walaupun dengan keadaan moral yang rendah dan menguras anggaran pemerintah AS. Terbaru adalah overproduksi properti, perumahan dan bahan-bahan pembuatan rumah memaksa mereka memberikan kredit beresiko (Subprime) yang memang kenyataannya akhirnya macet.

Dalam kasus ini bank dan perusahaan investasi telah mengeluarkan dana yang begitu besar untuk mensupport investasi properti, sehingga ketika perusahaan perumahan terjebak kredit macet maka bank-bank besar dan perusahaan investasi pun mengalami kerugian miliaran dollar. Yang harus kita tahu bahwa dalam era oligarki finance inilah kenapa akhirnya akibat krisis di AS maka semuanya ikut terkena, karena antara capital finance dan capital industri dalam imperialisme sudah terjadi “perkawinan”. Akibatnya dapat dipastikan, saat terjadi kemacetan/krisis finansial maka industri pun akan ikut-ikutan krisis. Karena

krisis ini terjadi di induk Imperialisme, maka negara-negara yang tergantung atas “belas kasihan” AS pun akan goncang. Bila terjadi krisis pemerintah AS akan lebih mementingkan menyelamatkan industri di dalam negeri, bahkan kalau perlu menarik modal dari negara lain (*capital flight*) yang tentu akibatnya akan merontokan ekonomi di negara tersebut.

Pada sisi lain negeri kapitalis monopoli seperti AS juga mengalami over produksi pada komoditas pertanian tanaman pangan seperti jagung dan kedelai. Kelebihan produksi ini memaksa negeri-negeri di belahan selatan, seperti Indonesia harus membuka pasar dalam negerinya bagi produksi pangan negeri AS..

Krisis keuangan global saat ini telah memukul sendi-sendi perekonomian banyak negeri serta diperkirakan akan berlangsung lama. Karena itu dapat dipastikan bahwa situasi tersebut akan semakin memerosotkan kualitas kehidupan seluruh kelas, golongan dan rakyat tertindas lainnya di berbagai negeri jajahan, setengah jajahan maupun negeri bergantung lainnya.

Keadaan ini, pulalah yang telah mendorong seluruh kelas, golongan dan rakyat tertindas di berbagai negeri tersebut meningkatkan perjuangannya dalam melawan dominasi imperialisme pimpinan AS. Perjuangan melawan imperialisme pimpinan AS itu diwujudkan dalam berbagai bentuk aksi protes menuntut hak sosial-ekonomi, aksi menentang perang agresi serta perjuangan pembebasan nasional demokratis yang berkobar di banyak negeri. Maka dapat dikatakan bahwa perjuangan melawan Imperialisme AS, pada saat ini semakin menduduki arti yang strategis dan pokok bagi perubahan sistem sosial negeri-negeri jajahan, setengah jajahan serta bagi sistem sosial dunia kedepan. Karenanya, pertentangan yang pokok pada skala dunia saat ini adalah pertentangan antara imperialisme pimpinan AS dengan seluruh kelas buruh, rakyat dan bangsa tertindas di berbagai negeri.

Menyelamatkan Borjuasi Komprador dan Tuan Tanah Besar.

Di Indonesia serangkaian kebijakan juga di keluarkan oleh rejim SBY-Kalla untuk meredam kepanikan akibat krisis global. Setelah awalnya melakukan penutupan sementara BEI pada awal oktober 2008, pemerintah juga segera menyiapkan program *buy back*, yang awalnya disiapkan dana lebih dari Rp 4 triliun, pemerintah juga menaikkan jaminan tabungan dari Rp 100 juta menjadi Rp 2 miliar. Pemerintah SBY-Kalla juga mengeluarkan PB 4 menteri (menteri tenaga kerja dan transmigrasi, dalam negeri, perindustrian dan menteri perdagangan) No16 tahun 2008 tentang pemeliharaan momentum pertumbuhan ekonomi nasional dalam mengantisipasi perkembangan perekonomian global.

Indonesia sebagai negara setengah jajahan adalah negara yang akan selalu mengalami krisis saat negara induknya yaitu imperialis AS mengalami krisis. Krisis yang dialami oleh Indonesia dipastikan akan lebih hebat, dan yang akan selalu dikorbankan adalah rakyat, terutama dari kaum tani dan kelas buruh, walaupun kelas dan golongan sosial lain pun akan merasakan juga akibat penindasan Imperialisme yang dijalankan oleh borjuasi komprador dan kapitalis birokrat.

Program *buy back*, adalah program yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk melakukan pembelian kembali saham-saham aset negara, ini bertujuan untuk menyelamatkan kembali keuangan dari BUMN yang sahamnya nilainya terus merosot. Program buyback adalah memberikan bantuan dengan cara membeli kembali saham-saham BUMN dan perusahaan-perusahaan lainnya yang dianggap harus ditolong dan mekanismenya lewat bursa saham.

Dana *buy back* sebagian besar adalah dana milik masyarakat yang di himpun lewat berbagai sumber, mulai dari pajak, dana BUMN, dana BLBI dan APBN. *Buy back* hakekatnya

hanyalah menyelamatkan Imperialisme dan memperpanjang nafas para borjuasi komprador. *Buy back* nantinya akan membeli kembali saham-saham kepada perusahaan imperialis yang memegang gadai saham perusahaan-perusahaan Indonesia. Hal ini pernah terjadi pada kasus PT Bumi Resources Tbk milik PT Bakrie & Brothers Tbk yang sempat di suspen karena harganya menurun drastis. Saat ini saham Bumi Resources dengan dua anak perusahaannya yaitu Arutmin dan Kaltim prima coal (KPC) sebanyak 5.017 sedang di gadaikan ke lembaga keuangan asing dan domestik yang terbesar yaitu Oddickson finance, JP Morgan Chase, ICICI, Rekapital Securities, dan PNM Investment Management. Ini artinya negara yang harus membayar, sementara Bakrie group, sebagai komprador akan menikmati hasilnya, karena pasca pembayaran Repo (*repurchase agreement*) atau gadai, sebanyak 35 % saham Bumi Resources rencananya akan di jual kepada Northstar Pasific Ltd, yang didukung perusahaan *private equity* terbesar didunia dengan cadangan dana mencapai US\$ 27-28 miliar, yaitu Texas Pasific Group (TPG). Tentu dari ini saja kita akan melihat bahwa rejim lebih memilih menyelamatkan komprador dan imperialis dari pada menggunakan keuangan negara untuk rakyat, karena akibat krisis ini dipastikan bahwa APBN 2009 akan berkurang, terutama untuk sektor publik, untuk pendidikan misalnya anggaran awalnya sebesar Rp 224 triliun, sudah berkurang sebesar Rp 16,75 Triliun.

Kaum buruh juga akan terpukul dengan terbitnya PB 4 menteri. , Menteri tenaga kerja dan transmigrasi mengatakan bahwa SKB adalah tindakan untuk mencegah PHK dengan melakukan penyesuaian upah khususnya untuk industri padat karya. Dengan dalih daripada terjadi PHK lebih baik ada penyesuaian upah, dan buruh dipaksa untuk menerimanya. Padahal dalam kehidupan sehari-hari saja buruh sudah mengalami banyak persoalan dengan adanya kebijakan upah murah, sekarang buruh harus dihadapkan pada kebijakan rejim yang lebih berpihak pada pengusaha dengan

memaksa buruh menyepakati PB 4 Menteri yang jelas-jelas akan semakin memangkas penghidupan buruh.

Sedangkan dalam pekerjaan buruh justru akan semakin ditindas dengan intensitas pekerjaan yang semakin tinggi, kemudian perusahaan tentu akan semakin suka menerapkan sistem kerja kontrak dan *outsourcing* karena dengan begitu perusahaan punya alasan untuk tidak memberikan tunjangan kesejahteraan bagi buruh. PHK bagi buruh juga terus berlagsung. Pada bulan september 2008 saja diperkirakan 3000 buruh dari industri tekstil yang di PHK, dan angka itu skan terus bertambah.

Sementara untuk sektor pertanian, kaum tani tidak akan menikmati keuntungan apapun, walaupun produk dari pertanianlah yang paling bertahan di krisis ini. Petani kelapa awit harus merasakan dampak dari melemahnya rupiah atas dolar. Haga kelapa sawit yang tadinya Rp 2000/Kg, harus turun sampai Rp 200/kg. Kelapa sawit yang dijual dengan standar rupiah atas dolar tentu tidak akan ada harganya. Jadi tidak heran bila ekspor bahan mentah dari Indonesia seperti kelapa sawit dan karet harus mengalami defisit, di bandingkan impor yang harus kita bayar dengan dollar. Akibat lainnya harga komoditas imporpun akan naik. Sarana produksi semacam pupuk dapat dipastikan juga akan naik harganya.

Pada tahun 2009 dunia akan mengalami kesulitan memperoleh likuiditas, terutama dolar, akibat AS menyedot sebagian besar dolar untuk memulihkan ekonominya. Akibatnya Indonesia akan kesulitan menjual obligasinya, karena semua pihak menahan dolar AS nya. Jika ini terjadi, rencana pemerintah untuk mengambil pinjaman lagi tentu adalah rencana yang konyol karena dalam keadaan ini tentu suku bunga pinjaman akan naik dengan tinggi, jaminan pinjaman juga akan sangat tinggi, apalagi Indonesia sudah tidak mendapat pinjaman lunak lagi.

Pada sektor pemuda mahasiswa, krisis ini juga akan sangat terasa. Untuk mahasiswa yang paling dirasakan adalah naiknya harga-harga, mulai dari kost, makan, transportasi, buku dan berbagai peralatan kuliah lainnya. Selain itu pihak kampus juga pasti akan menaikkan biaya kuliah, dengan alasan karena krisis biaya operasional juga akan naik. Untuk kampus-kampus besar yang bekerjasama dengan lembaga bantuan luar negeri dengan pinjaman dolar seperti ADB dengan UIN dan UPI, maka pengembaliannya juga akan berlipat akibat melemahnya rupiah terhadap dollar dan sekali lagi yang pasti akan di keruk adalah mahasiswa. Jika sudah begini tentu keadaan kampus akan jauh lebih represif, hak-hak demokratis mahasiswa akan dipasung. Akses pendidikan bagi rakyat juga semakin sempit. Sementara jaminan atas lapangan pekerjaan yang layak juga tidak akan ada. Jika sudah seperti itu masa depan pemuda Indonesia hanyalah menjadi barisan rapi untuk buruh-buruh murah yang setiap saat siap di buang, dan terkungkung dalam sistem kerja kontrak dan *outsourcing*.

Dalam keadaan seperti ini tentu potensi dari rakyat untuk protes pasti akan meningkat, dan seperti kita tahu bahwa mayoritas perlawanan rakyat saat ini masih di dominasi atas gerakan spontanitas. Gerakan spontanitas tentu akan mudah dipatahkan. Selain itu gerakan spontanitas sangat berpotensi untuk ditunggangi dan di setir pihak-pihak yang oportunist mencari keuntungan semata.

Dalam keadaan seperti ini sangat penting bagi pemuda mahasiswa untuk tampil aktif menggambarkan persoalan-persoalan rakyat dan berjuang bersamanya, karena bagaimana pun yang paling memiliki peran menentukan adalah gerakan rakyat, yang dilandasi persatuan buruh dan tani. Pemuda mahasiswa adalah gerakan penyokong dan tugasnya adalah bergabung dengan gerakan rakyat.

Apa yang Harus Rakyat (Termasuk Pemuda-Mahasiswa) Lakukan?

Aksi-aksi harus terus dilakukan di kampus, kota, hingga ke pusat kekuasaan rejim SBY-JK. Namun lagi-lagi, aksi-aksi ini masih sebatas monumental. Kemudian, masih terlihat adanya perbedaan cara pandang, baik menyangkut garis politik, tuntutan-tuntutan hingga bentuk perjuangan yang harus ditempuh.

Belajar Dari Pengalaman

Paska tumbangnya Soeharto, gerakan pemuda-mahasiswa seperti mengalami kemunduran. Hingga membuat gerakan pemuda-mahasiswa mudah terombang-ambing dalam arus besar politik kelas-kelas reaksioner (elit) dalam negeri. Imbasnya, banyak dari pimpinan-pimpinan massa termaju dari gerakan pemuda-mahasiswa cenderung menjadi petualang politik, baik sebagai bagian dari partai kelas reaksioner atau menjadi calo politik gerakan alias broker politik. Ada yang memilih menjadi aktifis-aktifis NGO tanpa prinsip, yang hanya untuk menjawab kebutuhan pragmatis paska mahasiswa.

Organisasi-organisasi massa pemuda-mahasiswa yang dulunya berjamuran, perlahan-lahan berguguran. Jikapun bertahan, skalanya lebih kecil yaitu organisasi tingkat kampus ataupun tingkat kota. Tapi ada juga beberapa organisasi pemuda-mahasiswa nasional yang masih bertahan. Satu sisi, karena telah memiliki infrastruktur organisasi yang cukup lama. Kedua, adalah organisasi massa pemuda-mahasiswa yang memang berkeinginan membangun organisasi massa berskala nasional.

Di lain sisi, masih belum ada kesatuan cara pandang di antara gerakan pemuda-mahasiswa dalam melihat kondisi konkrit masyarakat Indonesia. Hingga sangat mempengaruhi garis politik

yang diambil, bagaimana bentuk perjuangannya—baik di sektor pemuda-mahasiswa dan rakyat secara umum—, pola hubungan dengan gerakan rakyat hingga bagaimana menggalang front persatuan di sektor pemuda-mahasiswa ataupun dengan gerakan rakyat melalui front persatuan luas.

Bisa disimpulkan bahwa gerakan pemuda-mahasiswa paska reformasi 1998 sampai kini, belum seluruhnya memiliki garis politik yang sama. Hal tersebut berimbas pada peranan gerakan massa pemuda-mahasiswa dalam memperjuangkan kepentingannya disektornya ataupun menselaraskan perjuangan pemuda-mahasiswa dengan perjuangan rakyat. Kecenderungannya terlihat dengan adanya organisasi-organisasi yang hanya sekedar menyikapi persoalan kampus semata. Ada juga kecenderungan hanya menyikapi persoalan politik yang terkait langsung dengan rejim penguasa, tanpa diimbangi dengan perjuangan yang berupaya memecahkan persoalan kongkrit massa.

Kemudian, pola pembangunan organisasi yang relatif tidak membesar dan kurang menjangkau luas wilayah di Indonesia, ditambah persoalan internal yang cenderung mengental sebagai representasi dari watak borjuis kecil, hingga sangat mempengaruhi upaya menggerakkan massa dalam perjuangan massa yang digelorakan, baik di tingkat kampus, kota hingga nasional.

Bangkitkan, Organisasikan dan Gerakan Massa.

Masyarakat Indonesia dalam tingkat perkembangan terkini adalah masyarakat yang berkarakter setengah jajahan dan setengah feodal di bawah penindasan imperialisme— terutama imperialisme AS—dan sisa-sisa feodalisme yang saling bahu-membahu menindas dan menghisap seluruh rakyat Indonesia. Dominasi imperialisme yang berbasiskan feodalisme ini,

diopersionalkan dengan baik oleh antek-anteknya dalam negeri, yaitu rejim SBY-JK yang kini tengah berkuasa. Rejim SBY-JK adalah rejim kapitalis birokrat dan merupakan kekuasaan bersama antara borjuasi besar komprador dan tuan tanah.

Dengan demikian rejim SBY-JK adalah rejim yang berwatak sebagai boneka Amerika, Anti Rakyat dan Anti Demokrasi. Hingga jelas kemudian bahwa imperialisme AS, feodalisme dan kapitalisme birokrat yang berwujud rupa dalam rejim SBY-JK adalah musuh bersama seluruh rakyat Indonesia, termasuk bagi pemuda-mahasiswa. Atas dasar-dasar tersebut maka Bentuk perjuangan yang diambil adalah Perjuangan Demokrasi Nasional. Artinya, perjuangan menghancurkan dominasi imperialisme, feodalisme dan kapitalisme birokrat di Indonesia.

Maka, sudah seharusnya seluruh gerakan massa buruh, tani, pemuda mahasiswa, kaum miskin kota dan kaum perempuan di Indonesia, menjadi bagian dari perjuangan demokrasi nasional. Jelas sudah kemudian persoalan garis politik apa yang harus menjadi sandaran bagi gerakan massa pemuda mahasiswa, yaitu garis politik Demokrasi Nasional.

Selanjutnya, harus diupayakan untuk mempersatukan gerakan massa pemuda-mahasiswa dalam suatu aliansi luas yang berkarakter demokratis. Aliansi Pemuda-Mahasiswa ini, akan berfungsi memperjuangkan kepentingan massa pemuda-mahasiswa, baik di tingkat kampus hingga nasional untuk mendapatkan hak-hak demokratisnya. Kemudian turut menjadi bagian dan berperan aktif dalam Gerakan Massa Demokratis yang lebih luas.

Dalam membangun Persatuan Pemuda-Mahasiswa, kita tidak lagi terjebak dalam persoalan bendera atau kiri dan kanan. Karena akan menimbulkan “sektarianisme” dan pembentukan blok-blok kekuatan yang bisa memecah kekuatan massa. Padahal

fungsi front adalah memperluas dukungan dan menambah kekuatan, bukan sebaliknya menjadi eksklusif dan terkucil. Front tidak hanya dilaksanakan sebatas komite aksi kemudian bubar begitu saja.

Dalam pembangunan persatuan rakyat dan pemuda-mahasiswa, prinsip-prinsip front persatuan harus tetap diteguhkan. Prinsip awal yaitu, bersatu dalam program dan aksi. Artinya, ada program bersama yang didasari oleh kepentingan bersama dari elemen-elemen yang digalang. Tidak boleh kemudian muncul dominasi atau pemaksaan kepentingan dari kelompok-kelompok tertentu. Pertautan kepentingan bersama ini, didasarkan pada suatu kesamaan pendirian, pandangan, metode dan sikap serta tindakan dalam menghadapi masalah pokok bersama tanpa mengabaikan keberagaman kepentingan yang ada di dalam front.

Proses ini bisa diawali dari pertemuan-pertemuan yang mempertemukan kepentingan atau program dalam aksi-aksi yang bersifat momentum. Hingga muncul kesepakatan untuk mengadakan penyikapan bersama sampai lahirnya program bersama. Pelaksanaannya bisa dilakukan dari tingkat nasional hingga kampus. Karena kerjasama programatik dan organisasioanal inilah yang menjadi fondasi dari front persatuan.

Kerjasama yang saling menguntungkan, menandakan bahwa penting bagi setiap elemen dalam front untuk menjaga kepentingan persatuan dan perjuangan yang belum tentu berhasil diraih dalam satu atau beberapa kali aksi. Elemen dalam front harus saling mendukung persatuan, saling memberi keuntungan, saling menghormati perbedaan, tidak melakukan praktek konspirasi dengan sebagian atau klik dalam front dan saling mengingatkan diri untuk tidak tergelincir pada tindakan-tindakan sepihak yang bisa merugikan kepentingan persatuan dan perjuangan.

Karena itu persoalan yang sensitif seperti logistik, perumusan sikap dan tuntutan, serta kepemimpinan harus dikelola secara baik, hingga tidak merusak persatuan internal front. Kerjasama yang saling menguntungkan ini juga bisa membantu dalam upaya-upaya memajukan kualitas-kualitas elemen yang terlibat dalam front, seperti mengadakan edukasi bersama, terbitan bersama dan kegiatan-kegiatan lain secara bersama tanpa harus mengintervensi urusan internal masing-masing organisasi yang ada.

Sebuah front juga tetap menjaga prinsip kemandirian dalam politik dan insiatif. Harus dipahami perbedaan antara persatuan dalam front dengan kemandirian dalam aksi dan tindakan. Artinya tidak semua kepentingan masing-masing elemen dikorbankan untuk menjaga persatuan dan kerjasama dalam front. Masing-masing elemen tetap harus memiliki kemandirian mengambil inisiatif untuk melakukan aksi.

Dalam sebuah front juga diberi ruang bagi tindakan-tindakan khusus dari masing-masing elemen selama tidak merugikan bagi kepentingan kerjasama dan persatuan dalam front.. Selain itu front harus bergantung pada kekuatan sendiri. Untuk itu, setiap elemen harus selalu berupaya memperkuat barisannya dan menggerakkan massa untuk terlibat dalam perjuangan massa. Setiap elemen dalam front harus memiliki kemampuan untuk mengkonsolidasikan barisannya dan menggerakkan massa secara luas.

Sementara bantuan dari pihak luar—terutama berbentuk uang—bisa diperkenankan selama tidak merusak kemandirian dari elemen-elemen yang diberikan bantuan. Dukungan dari internal organisasi tersebut adalah yang utama. Hal ini untuk mencegah timbulnya kecurigaan di antara elemen-elemen yang tergabung dalam front yang bisa merusak kerjasama dan persatuan front. Juga harus dihindarkan membangun front karena pendekatan uang.

Memperluas Gerakan massa Demokratis

Gerakan pemuda-mahasiswa demokratis juga harus berperan aktif dalam front persatuan luas yang melibatkan seluruh kekuatan rakyat. Front persatuan luas juga berfungsi untuk memperluas pengaruh gerakan massa demokratis agar lebih memperoleh dukungan massa secara luas dan menambah jumlah kekuatan massa. Sangat dimungkinkan dalam aliansi luas, segala kekuatan yang demokratis hingga kekuatan dari kalangan reaksioner di luar klik paling reaksioner juga akan terlibat. Disinilah kemudian prinsip-prinsip front persatuan harus ditegakkan. Di lain sisi juga mendorong dalam aliansi luas keterlibatan kelas buruh dan kaum tani, sebagai kekuatan yang paling berkepentingan terhadap perjuangan demokrasi nasional. Hal ini untuk mencegah agar kepemimpinan dan garis perjuangan front persatuan luas tidak mengikuti kepentingan kelas-kelas reaksioner yang terlibat.

Selanjutnya, gerakan pemuda-mahasiswa juga harus mulai berinisiatif membangun kerjasama lebih material dengan kekuatan demokratis di perkotaan selain pemuda mahasiswa, yaitu buruh, kaum miskin perkotaan dan kalangan borjuis kecil perkotaan lainnya, seperti PKL, tukang ojek, dan lain-lain.

Belajar dari pengalaman aksi penolakan kenaikan harga BBM, dimana kekuatan massa yang terkena dampak langsung kenaikan harga BBM tidak terlibat secara massif dalam aksi tersebut. Dapat juga melakukan aksi-aksi spontanitas yang tidak terhubung dengan front persatuan luas yang ada. Dengan kondisi situasi krisis ekonomi-politik yang akan terus menajam, PHK, pengusuran, pengangguran selalu menjadi ancaman mereka di perkotaan.

Tentang Front Perjuangan Rakyat (FPR)

Bongkar pasangannya aliansi tentu saja tidak efektif dalam melancarkan perjuangan. Selama ini persatuan seringkali muncul sebagai sikap atas momentum besar dan respon politik tertentu semata. Sementara itu aksi-aksi protes rakyat yang semakin meluas masih didominasi gerakan yang bersifat spontanitas. Aksi-aksi spontanitas menunjukkan bahwa gerakan rakyat saat ini belum sanggup memberi kepemimpinan yang tepat, sehingga banyak sekali aksi-aksi rakyat yang mudah patah dan tenggelam dalam pesimisme.

Fakta ini menjadi dasar pembangunan Front Perjuangan Rakyat (FPR) dalam mempersatukan kelas, sektor dan golongan rakyat melawan rejim boneka imperilis SBY-Kalla. Perjuangan demokratis adalah perjuangan yang memiliki karakter luas, menghimpun segenap potensi demokratis massa untuk bersatu padu merebut hak-hak reform sebagai cara untuk menggulingkan imperialisme dan meraih kemerdekaan dan kehidupan yang layak di masa yang akan datang.

FPR berpendirian bahwa kelas buruh adalah kelas yang secara kongkrit terkait erat dengan dominasi imperialisme di Indonesia dan merupakan kelas termaju serta yang paling besar menanggung beban krisis imperialisme. Namun, perjuangan melawan imperialisme juga menjadi perjuangan kaum tani untuk menghancurkan feodalisme yang menjadi basis sosial dari eksistensi imperialisme di Indonesia. Karena itu menjadi sangat penting bagi gerakan buruh untuk membangun kerjasama dengan kaum tani sebagai kalangan yang mayoritas di Indonesia. Kelas buruh dan kaum tani merupakan kekuatan pokok bagi perubahan dalam perjuangan demokratis nasional menghancurkan dominasi imperialisme dan sisa-sisa feodalisme yang termanifestasikan dalam kekuasaan rejim boneka SBY-Kalla saat ini.

Sementara itu di dalam negeri harus dilakukan mobilisasi massa dalam jumlah besar untuk bergabung dan front demokratik yang berhaluan patriotik. Front ini bersifat luas dengan melibatkan elemen kelas-kelas progresif dan dipimpin oleh persekutuan kelas buruh dan kaum tani. Kelas buruh dan kaum tani merupakan sandaran pokok dalam kerjasama tersebut, yang menjadi segi yang memimpin dan menentukan arah gerak perjuangan. Tujuan jangka pendek dari penggalangan front ini adalah untuk memencilkan klik paling reaksioner, yakni klik tuan-tanah, komprador, dan kapitalis birokrat yang tengah berkuasa dan menjadi boneka atau kepanjangan tangan imperialisme AS.

Tujuan jangka panjang dari front adalah melaksanakan demokratisasi dan menancapkan pilar-pilar pembebasan nasional guna mengakhiri dominasi imperialisme atau kapitalisme monopoli. Di dalam perjuangan ini, perjuangan kaum tani untuk melaksanakan land-reform sebagai cara untuk menghancurkan dominasi feodalisme dan perjuangan kelas buruh untuk membangun industrialisasi nasional yang kokoh berada sebagai segi yang menentukan.

Pemilu 2009 Bukan Jalan Keluar Persoalan Rakyat

Tahun 2009 ini bisa dikatakan tahun yang penting bagi bangsa Indonesia. Seperti kita tahu bahwa dunia saat ini sedang menghadapi berbagai macam krisis, dan yang paling berat tampaknya adalah krisis ekonomi, terutama finansial (keuangan) hal ini kemudian merontokan ekonomi dunia secara keseluruhan. Diyakini krisis kali ini tidak akan mampu dipulihkan dengan cepat, semua pihak pesimis tahun 2009 ini krisis akan lewat, hanya upaya untuk memperkecil dampak krisis yang mampu dilakukan.

Ditengah-tengah krisis yang menghantui bangsa Indonesia, pada tahun 2009 akan diselenggarakan pemilihan umum. Pemilu ini akan diadakan dalam dua putaran. Putaran pertama adalah pemilihan anggota legislatif, pada 9 April 2009 dan putaran kedua untuk memilih presiden dan wakil presiden pada bulan september 2009.

Melihat keadaan ini tentu sudah menjadi keharusan bagi rakyat untuk melihat lebih dalam bagaimana sebenarnya kedudukan Pemilu dalam upayanya untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Jika rakyat sudah lebih memahami peran politiknya dalam pesta elektoral ini rakyat akan lebih memahami bagaimana sikapnya dalam menghadapi pemilu yang akan datang. Inilah yang penting bagaimana meningkatkan pemahaman rakyat tentang pemilu, mulai dari partai yang bertarung, calon presiden dan wakilnya, hingga calon legislatif yang ada sehingga kedepan apapun sikap rakyat, baik itu ingin memilih ataupun golput adalah sebuah keadaan yang dilandasi kesadaran politik.

Sejarah hadirnya pemilu

Dalam perkembangan negara-negara di dunia saat ini, pemilu merupakan salah satu alat/instrumen utama yang selalu digunakan untuk mengukur kadar demokrasi yang ada di sebuah negara. Kesuksesan negara menyelenggarakan pemilu secara damai, penerimaan pihak yang kalah, partisipasi partai-partai sesuai peraturan dan tidak ada kecurangan, prosentase besar rakyat yang memilih telah menjadi parameter yang sering digunakan untuk menunjukkan bahwa negara telah demokratis dan rakyat telah memiliki kesadaran politik yang baik.

Pemilu adalah alat, demikian hal bisa kita pahami saat ini. Pertanyaannya adalah siapa yang menggunakan alat tersebut. Dalam sejarahnya pemilu hadir beriringan dengan hancurnya

kekuasaan feodal diganti oleh kekuasaan kaum borjuis di Eropa. Revolusi industri telah mendorong perubahan yang besar di Eropa, sejak ditemukannya mesin uap oleh James Watt yang diikuti temuan-temuan besar lainnya kemudian mendorong industrialisasi berkembang semakin maju.

Perdagangan telah menjadi urat nadi ekonomi. Tetapi disatu sisi kekuatan ekonomi tanpa di ikuti kekuasaan politik tentu tidak akan ada artinya, pajak dan upeti yang begitu tinggi kepada raja adalah kewajiban yang ada saat itu, tidak terkecuali terhadap kaum dagang. Ditambah lagi kekuasaan raja yang begitu absolute, dengan monarkhinya “suara raja adalah suara Tuhan” adalah slogan saat itu. Semua hukum dan segala peraturan bersumber dari raja, sementara borjuasi dagang adalah golongan yang begitu tinggi menjunjung kebebasan individu, ini adalah watak dagang yang selalu bersaing satu sama lain demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

Maka kepentingan untuk mampu menguasai politik dan kekuasaan demi mengakomodasi kepentingan kaum borjuasi adalah hal yang penting. Bersama kaum tani yang memang sangat tertindas akibat sistem ekonomi politik feodal maka kaum borjuasi melawan kekuasaan absolute raja. Puncaknya adalah dipenggalnya raja Charles di Inggris serta tumbangnya kekuasaan Louis di Prancis pada tahun 1789, dengan semboyan *Freternite*, *Egalite*, dan *Liberte* kaum borjuasi memperoleh kemenangan besarnya. Kemenangan borjuasi di Prancis dan Inggris menyebar dan menginspirasi kedaratan Eropa, sejak saat itu praktis kekuasaan feodal di Eropa tumbang diganti kekuasaan borjuasi dengan Negara demokrasinya/Revolusi borjuasi tipe lama, yang dalam perkembangan historisnya menjadi kapitalisme yang berpuncak pada imperialisme.

Untuk memperkuat kedudukannya maka berbagai macam instrumen/alat ataupun simbol kekuasaan digunakan. Salah

satu ciri dari Negara demokrasi borjuis adalah identik dengan pembagian kekuasaan (*distribution of power*) atau pemisahan kekuasaan (*separation of power*) antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif atau kemudian lazim di sebut trias politika yang digagas oleh tokoh-tokoh semacam JJ Rosseou, Montesqui ataupun John Locke. Salah satu intrumen yang dipakai adalah dengan penyelenggaraan pemilu. Artinya pemilu adalah sistem yang dikembangkan oleh borjuasi, dan ini adalah alat bagi borjuasi untuk melegitimasi kekuasaannya atas negara. Maka parameter pemilu yang demokratispun selalu identik dengan segi-segi demokrasi versi kelas borjuis. Dengan demikian satu hal yang penting adalah negara adalah sebagai alat.

Demikian pula Indonesia, pemilu pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955. Pemilu pertama Indonesia adalah pemilu yang dianggap paling demokratis yang pernah diselenggarakan di Indonesia, Parameternya adalah dari partai-partai yang begitu banyak mengikuti pemilu dan berbagai ideologi bebas bertarung di pesta elektoral tersebut, bahkan militerpun boleh memilih dalam pemilu. Tetapi sampai pemilu kesekian kalinya, bahkan menuju pemilu 2009 ini hakekatnya tidaklah kita melihat secara nyata perubahan kesejahteraan rakyat. Rakyat seperti mengalami *de javu* tiap 5 tahun, saat janji caleg dan partai akan perubahan kesejahteraan hadir dan kemudian hilang saat pemilu usai dan akan hadir lagi 5 tahun mendatang. Semua dilakukan hanya untuk melakukan mobilisasi suara demi pemilu, bukan rakyat.

Ditengah perkembangan gerakan massa, kaum reformis borjuasi kecil-demokratis dan borjuasi liberal-demokratis mencoba menyusupkan kepentingannya yang terselubung dengan menggembar-gemborkan pentingnya menginjakkan kakinya dalam kekuasaan politik baik di parlemen (DPR/MPR), maupun pada kekuasaan eksekutif (pemilihan gubernur dan bupati). Tentu saja, cara yang hendak ditempuh adalah dengan melalui sistem

”kompetisi” pemilu ala borjuis, yang sepanjang sejarahnya, sistem politik tersebut justru merupakan instrumen untuk tetap menjamin bagi kelangsungan kekuasaan dari kelas borjuasi komprador, tuan tanah jahat dan kapitalisme birokrasi di Indonesia.

Sistem politik yang kini dalam dominasi klik SBY-JK, tidak memiliki peranan yang menentukan sama sekali bagi perubahan-perubahan yang reformis sekalipun. Berbagai kebijakan rezim SBY-JK yang semakin memerosotkan kehidupan rakyat di semua lapangan kehidupan tidak mampu dibatalkan atau sekedar dihambat sekalipun oleh kekuatan-kekuatan politik yang mendiami parlemen (DPR/MPR). Bahkan, kekuatan partai politik yang menyatakan dirinya sebagai oposisi terhadap pemerintahan SBY-JK, teriakan yang dilontarkan paling kencang sekalipun, tetap membatasi dirinya pada kepentingan borjuasi komprador, tuan tanah jahat besar, dan kapitalisme birokrasi.

Komposisi dan kepemimpinan didalam parlemen (DPR/MPR), secara umum dikuasai oleh Golkar, PDIP, PPP, PKB, PKS, Partai Demokrat. Komposisi kepemimpinan di parlemen mencerminkan perpaduan antara borjuasi komprador dan tuan tanah jahat. Pada kenyataannya Indonesia dikuasai oleh oligarki politik dan oligarki ekonomi yang didominasi oleh kepentingan imperialisme.

Belajar dari pengalaman dalam penyelenggaraan pemilu, paling tidak sejak pemilu 1999, kemudian pemilu legislatif dan presiden 2004, selalu saja berakhir dengan merosotnya gerakan massa demokratis dari seluruh kelas, sektor dan golongan. Pemilu dan pembangunan partai politik baru selalu saja menyebabkan terjadinya pertentangan atau kontradiksi diantara organisasi-organisasi massa demokratis beserta aktivisnya yang maju. Hal ini membuktikan bahwa perjuangan dengan strategi parlemen bukanlah strategi yang utama dan paling baik saat ini. Perjuangan lewat parlemen atau pembangunan politik baru telah membawa

gerakan dalam kanal-kanal demokrasi palsu yang kemudian membuat gerakan rakyat justru tidak berkembang dan terpecah-pecah saling curiga satu sama lain.

Adalah sebuah mimpi bahwa cara perlemen adalah cara yang paling tepat di Indonesia untuk mengubah tatanan/sistem lama (sistem politik dan ekonomi kapitalis) ke sistem yang baru atau sosialisme, dengan meninggalkan prinsip universal dan pokok dari perubahan yang revolusioner. Dalam sejarah dan hukumnya tidak akan ada yang dengan sukarela memberikan kekuasaannya kepada yang lain. Logika sederhananya jika Indonesia sistem ekonomi dan politiknya di dominasi oleh borjuasi komprador, tuan tanah dan kapitalis birokrat yang aman dan nyaman hidup dalam alam Indonesia sekarang, apakah mereka dengan sukarela akan menyerahkannya untuk diganti dengan sistem ekonomi politik yang jelas-jelas akan mengeliminir kekuatannya. Mereka juga dengan sengaja membutakan mata mereka sendiri pada satu kenyataan bahwa, klas berkuasa pada tingkat permulaannya saja --untuk menjamin kelangsungan kepentingannya-- akan dengan mudah menggunakan dan mengerahkan aparatus kekerasannya (polisi dan tentara), untuk menindas gerakan massa.

Perkembangan Umum Gerakan Rakyat

Gerakan massa menjelang tahun 2005 akhir, sepanjang tahun 2006 sampai 2008 terus mengalami kenaikan yang signifikan baik secara kualitas maupun kuantitas. Namun harus diakui bahwa gerakan massa yang terjadi belum mampu "sepenuhnya" mengatasi problem-problem yang melingkupinya baik secara politik maupun organisasi. Gerakan massa masih diliputi dengan ciri spontanitas, serupa dengan gerakan ekonomisme dengan tuntutan yang masih berkutat pada soal-soal tuntutan sosial ekonomi semata.

Sementara pembelejetan terhadap berbagai kebijakan rejim SBY-Kalla, ataupun pembejetan musuh-musuh rakyat dalam negeri yang meliputi borjuasi komprador, tuan tanah dan kapitalis birokrat belumlah meluas di seluruh gerakan massa. Gerakan massa demokratis, yang mengadakan aksi perlawanan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama melalui praktek pembangunan front persatuan nasional --yang belum maju dan berkembang-- secara keseluruhan masih sebatas tuntutan-tuntutan reformis, yang inipun belum mendapatkan realisasinya dari Rezim SBY-JK.

Tetapi adahal yang bisa kita lihat dari situasi dan perkembangan gerakan massa saat ini, yang *pertama* secara umum tingkat perkembangan gerakan massa sedang mengalami peningkatan. Hal ini di perlihatkan dengan semakin intensifnya aksi-aksi massa dari berbagai kelas, sektor dan golongan. Namun demikian gerakan massa yang ada belumlah terlepas dari aksi-aksi spontanitas dan tuntutan sosial ekonomi.

Kedua gerakan massa yang terus berkembang dan terus menuju kualitas yang lebih tinggi adalah bukti bahwa rejim SBY-Kalla dengan seluruh sistem politiknya tidak akan mampu menyelesaikan problem-problem rakyat Indonesia yang telah lama hidup dalam penindasan dan penghisapan.

Tugas dan sikap Dalam menghadapi Pemilu 2009

Dengan berkaca dari keadaan politik nasional dan perkembangan gerakan massa, ada beberapa hal yang sebenarnya bisa dilakukan apalagi melihat momentum pemilu saat ini.

Pertama mencegah pembelokan arah gerakan massa demokratis terhadap upaya pembangunan partai elektoral semata, serta upaya untuk penyaluran/mengkanalkan suara rakyat yang

semakin kencang hanya sebatas mobilisasi suara rakyat untuk pemilu semata. Pekerjaan ini menuntut kita untuk lebih aktif berpropaganda tentang peran dan kedudukan massa secara kongkrit dan bagaimana sebenarnya secara teoritik peran dan kedudukan pemilu apalagi jika dilihat keadaan obyektif Indonesia saat ini. Apalagi kita juga seringkali berhadapan dengan slogan dan jargon-jargon penyatuan yang tidak berprinsip dari elemen demokratis hanya untuk sekedar membangun partai borjuasi untuk ikut pemilu.

Usaha yang *kedua* adalah bagaimana kita seharusnya lebih mementingkan kerja konsolidasi dan pembangunan organisasi massa rakyat dari berbagai kelas, sektor dan golongan demi mempertinggi pemahaman politik rakyat sehingga soal-soal penyikapan terhadap pemilu akan mampu dilakukan oleh rakyat berdasarkan pemahaman dan kesadaran politik. Pada sisi lain pekerjaan ini juga akan bisa mempertinggi kualitas gerakan massa, sehingga karakter gerakan massa yang patriotik, militan, demokratis dan massa luas dapat dicapai.

Dengan demikian kita sendiri secara kongkret mampu melihat keadaan hari ini, bagaimana pemilu 2009 peran dan kedudukannya bagi rakyat dan dimana rakyat di posisikan oleh peserta pemilu, baik partai, calon legislatif maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden. Saat rakyat ditanya “akan memilih siapa atau bersikap seperti apa dalam pemilu” maka rakyat akan menjawab dengan yakin apa yang akan dilakukannya.

Krisis Kapitalisme Dan Cara Pandang Rakyat Pekerja

Alfa Julianto Gumilang¹

Krisis Sebagai Keniscayaan Kapitalisme

Krisis adalah keniscayaan dalam Kapitalisme. Di era *boom* tesis ini lebih terdengar seperti dongeng bagi kebanyakan pelaku ekonomi. Namun di era krisis, semakin banyak kalangan yang mempercayainya. Seperti krisis-krisis yang pernah terjadi sebelumnya, krisis ekonomi global hari ini juga tak lepas dari ulah para pelaku ekonomi (baca: pemilik modal) yang selalu berlomba-lomba mencari keuntungan sebanyak mungkin dengan biaya sekecil mungkin. Sistem pasar bebas yang menempatkan persaingan dan anarki sebagai basis produksi telah nyata-nyata menjadikan transaksi spekulatif berada jauh melebihi pertumbuhan riil.

1 Divisi Jaringan dari Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP)

Fase-fase awal krisis memang terjadi perlahan saat negara induknya, Amerika Serikat (AS), telah menumpuk hutang nasional senilai 9 triliun \$, setara dengan hampir 75% PDB AS yang mencapai 13 triliun \$. Hutang ini adalah buah tersendiri dari cara pemerintahan AS yang dengan sekuat tenaga mempertahankan pendapatan perkapita agar mampu menjaga tingkat konsumsi AS yang tergolong tinggi, baik dengan insentif pada dunia usaha maupun dengan perang. (Perang hanya membebani anggaran negara yang hasilnya dituai berbentuk hutang kepada bank)

Pergerakan sektor riil di AS beberapa tahun sebelum krisis yang mengalami peningkatan harus diakui telah menghasilkan percepatan produksi yang massif di berbagai sektor. Gairah tersebut serta merta menimbulkan gairah pula di pasar saham yang merupakan kelanjutan absolut dari sektor riil di era Kapitalisme modern.

Kecenderungan melemahnya penjualan oleh karena jenuhnya pasar, disiasati oleh para pemegang saham dan CEO perusahaan-perusahaan besar di AS untuk terus mengeruk laba lewat sektor-sektor spekulatif, yaitu saham-saham jangka pendek di negara-negara dunia ketiga. Kejenuhan pasar sendiri juga diakibatkan oleh keharusan pemilik modal dan CEO perusahaan tersebut untuk meningkatkan terus pertumbuhan laba mereka dengan memacu produksi dan penjualan yang menjadi syarat dari peningkatan harga saham-saham mereka.

Tentu saja, pada saat penjualan macet, dan hal tersebut pasti berdampak pada penurunan harga saham, para pemilik modal segera mempermudah pembelian produk dengan kredit. Kredit lah yang kemudian bertransaksi dari tangan ke tangan, dan nilainya dijamin oleh bank-bank investasi besar seperti *Lehman Brothers*, *Merryl Lynch*, *Goldman Sachs*.

Tingginya nilai kredit yang dijamin sudah tentu menaikkan suku bunga. Tingginya suku bunga sudah tentu pula mempersulit konsumen untuk melunasi pembayarannya, sehingga membuat konsumen beramai-ramai menjual kembali produk yang mereka beli dengan cara kredit tersebut. Hasilnya adalah harga sebuah produk turun dibawah nilai awal yang dijamin oleh bank. Persis seperti inilah lingkaran setan yang menjerat lembaga keuangan besar di AS dalam menghadapi kredit macet sektor perumahan.

Keterhubungan bank investasi dengan semua jenis perusahaan menyebabkan hancurnya saham-saham bank tersebut juga berarti hancurnya saham-saham perusahaan-perusahaan besar yang diperdagangkan di pasar saham. Inilah yang disebut krisis finansial di AS. Namun harus dicatat, krisis finansial tersebut bukanlah krisis yang terpisah dari produksi riil nya, melainkan cerminan darinya, yakni jenuhnya pasar. Oleh karena itu krisis hari ini tetap merupakan krisis *over produksi*. Hanya saja ia dipercepat oleh spekulasi di pasar keuangan/saham.

Indonesia Pasti Tertular Krisis

Krisis di AS sangat besar pengaruhnya pada Indonesia, karena AS merupakan salah satu mitra dagang Indonesia yang terpenting. Hal ini dapat dijelaskan oleh dua hal: (1) AS merupakan negara pengimpor barang modal/bahan baku terpenting bagi Indonesia. (2) AS merupakan negara tujuan ekspor terpenting bagi Indonesia. Walau kedua faktor ini tidak berada diatas 50% dari total perdagangan, namun efek yang tertular ke Indonesia dapat berlangsung melalui Jepang, Cina dan Eropa yang juga memiliki jaringan dagang dengan AS.

Sektor yang pertama terkena imbas dari krisis adalah sektor keuangan non perbankan, dengan kata lain perusahaan-perusahaan transaksi saham. Sektor ini terseret dan merugi

oleh menurun drastisnya transaksi di bursa saham. Hal ini telah dibuktikan dengan tutupnya beberapa perusahaan transaksi saham. Namun karena tidak signifikannya sektor ini menyerap tenaga kerja, kemerosotannya seakan tidak melahirkan dampak yang serius bagi ekonomi nasional.

Sektor yang selanjutnya dimakan oleh krisis adalah sektor industri agrikultur atau perkebunan. Merosot drastisnya harga-harga komoditas ekspor Indonesia yang didominasi oleh CPO merupakan pukulan telak bagi kapitalisasi di sektor ini. Tebalnya angka tenaga kerja yang mengisi sektor ini telah menjadi peristiwa yang memilukan bagi para petani dan buruh tani yang terjebak dalam pusaran hutang dan PHK.

Berikutnya adalah sektor manufaktur dan pertambangan yang merupakan tulang punggung dari industri. Kehancuran sektor manufaktur selain dikarenakan permintaan barang-barang ekspor yang berkurang, naiknya harga barang-barang impor dari AS yang disebabkan oleh nilai tukar rupiah juga mempengaruhi kemampuan industri dalam memproduksi. Sedangkan kehancuran industri sudah tentu memukul harga minyak yang sampai saat ini tidak mampu bangkit diatas 50\$/barel.

Kemerosotan sektor jasa merupakan kepastian yang tak terhindarkan dari kemerosotan sektor-sektor sebelumnya disamping akan diperluas tentunya oleh krisis daya beli. Anjloknya harga-harga industri dan jasa kemudian akan mengkonsentrasikan kapital pada sektor pertanian yang penguasaannya atas tanah dan perdagangan telah dimulai lama sebelum krisis. Monopoli ini akan dengan segera menaikkan harga-harga pangan di pasar dunia dan membuyarkan slogan “daya tahan pangan nasional”.

Dari rangkaian krisis yang tiap hari sedang berjalan ini, Indonesia pasti mengalami de-industrialisasi, dalam arti penutupan pabrik-pabrik, perlambatan pertumbuhan sektor riil dan

pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Yang paling krusial dari kesemua krisis ini adalah krisis daya beli rakyat akibat gelombang PHK yang menghantam setiap sektor secara bergantian. Jika saja prediksi Apindo benar, maka jumlah korban PHK sampai 2010 adalah 1 juta kaum pekerja, dan ini akan menjadi masalah besar bagi pemerintahan borjuis kedepannya.

Cara Pemerintahan Kapitalisme Menanganinya

Setelah terlebih dahulu menyuntikkan dana sebesar 25 triliun pada sektor keuangan dan *buy back* saham BUMN, pemerintah barulah merencanakan untuk menggerakkan sektor riil lewat penggenjotan anggaran belanja pemerintah yang diharapkan mampu menyedot korban PHK dan lapisan angkatan kerja baru. Dana yang sudah dipakai untuk menyelamatkan orang kaya (baca:sektor keuangan) ini mengakibatkan kemampuan kas pemerintah menjadi berkurang untuk membiayai anggaran tahun ini. Seperti biasa, solusi pemerintah pun sama: Hutang.

Pemerintah telah berhutang untuk menutup defisit anggaran 2007-2008. Dan sekarang, pemerintah membutuhkan hutang lebih banyak untuk menggerakkan sektor riil. Bahkan hutang-hutang tersebut sebagiannya merupakan hutang yang berbunga sangat tinggi dan batas waktu pembayaran yang sangat singkat. Sehingga, walaupun dana tersebut mampu dikelola pemerintah untuk meredam krisis, dia pasti tidak akan bertahan lama karena asumsi pertumbuhan ekonomi sampai 2012 belum mampu menutup cicilan hutang yang harus dibayar pada periode tersebut.

Mampukah hutang tersebut meredam krisis?

Jika pemerintahan borjuis Indonesia hanya dihadapkan pada masalah krisis sektor riil semata, mungkin saja hutang tersebut

mampu meredam 50-75% gejala PHK dan mendorongnya pada perluasan pembangunan infrastruktur. Inipun dengan catatan korupsi berhasil dinihilkan. Namun kenyataannya Indonesia juga memiliki potensi besar untuk terjadinya kredit macet. Kredit macet yang di AS diperlihatkan pada sektor perumahan, di Indonesia kemungkinannya jadi lebih banyak.

Pertama adalah kredit property yang sejak tahun 2007 sudah terlihat adanya *over supply* untuk *commercial property* seperti, ruko, mal, departemen store, *hypermarket*, dan apartemen. *Supply*-nya jauh lebih banyak dibanding permintaannya sehingga banyak yang kosong. Karena apa? Karena sejak 2005 hingga sekarang tidak ada investasi baru di sektor riil.

Kedua adalah kredit konsumsi seperti kredit *card* (kartu kredit), kredit kendaraan bermotor (mobil dan motor), kredit elektronik, dan kredit perlengkapan rumah tangga. Untuk sektor ini, yang paling mencolok adalah kredit motor. Siapa saja bisa menerima kredit motor tanpa DP (uang muka). Demikian juga dengan kartu kredit, sebelum 2005, jika membuat kartu kredit masih diminta slip gaji, survei ke rumah atau kantor. Jika layak, kartunya jadi dalam 14 hari kerja. Sekarang, cukup memberikan fotokopi KTP, hari itu juga kartunya jadi.

Jika terjadi gagal bayar dalam skala massal, maka gelembung *kredit* ini dapat saja meledak dan mejadikannya krisis finansial jilid 2 di Indonesia. Apalagi, selain mengalami krisis pangan dan krisis energi, di Indonesia juga terjadi inflasi pangan dan energi karena memiliki ketergantungan pangan dan energi dari luar negeri. Semua ini menyebabkan infasi tinggi, sehingga inflasi ini menjadi penekan paling kuat dari daya beli masyarakat menengah ke bawah. Daya beli menurun menyebabkan ada orang-orang yang gagal bayar (kredit macet).

Jelas disini, bahwa efektif atau tidaknya pengelolaan hutang tidak akan berpengaruh banyak terhadap pemulihan ekonomi Indonesia dalam jangka waktu 10 tahun mendatang. Kekeroposan industri dan beban hutang telah membuat pemulihan ekonomi Indonesia sedang dan akan menghadapi jalan buntu di bawah rezim kapitalisme.

Kaitannya Dengan Politik Pemilu

Pemilu senyatanya telah ikut menggerakkan sektor riil. Proyek-proyek pencalegan dan pemilihan sampai saat ini telah menggelontorkan dana triliunan rupiah, dan masih akan menguras dana yang lebih banyak lagi saat pemilu sudah mendekat. Dengan demikian pemilu tentunya telah menjadi salah satu alat redam krisis. Namun apa yang terjadi sesaat setelah “pesta” usai?

Bersamaan dengan itu, pemilu 2009 yang telah menghabiskan banyak dana itu tidak serta merta menghasilkan pemilu yang demokratis. Paket 4 UU Politik sudah menjadi awal dari pemberangusan demokrasi bagi mayoritas rakyat. Sedangkan partai-partai dan figur-figur kontestan pemilu, selain satu per satu telah dilucuti kebobrokannya lewat rekam jejak periode sebelumnya, juga belum mampu menawarkan program-program mendesak hari ini dan solusi sejati pembebasan rakyat Indonesia. Hal inilah yang akan melatarbelakangi perluasan ketidakpercayaan massa calon pemilih kepada calon-calon pemimpin nya.

Beberapa partai yang tidak diragukan lagi kekuatan mesin partai nya (Golkar, PDIP, Demokrat, PKS) hari ini sedang mengalami krisis soliditas yang cukup tinggi. Golkar, oleh karena munculnya Sultan sebagai Capres, mau tidak mau akan memecah mesin partai ini. Disamping itu pengalaman kader-kader nya memimpin di daerah telah membuat mayoritas rakyat

jenuh. Golkar akan mengalami penurunan suara yang signifikan dibanding tahun 2004.

Demokrat yang dalam beberapa survei memimpin perolehan suara juga tidak mampu keluar dari figur SBY yang makin lama makin redup diterpa krisis ekonomi. Disamping itu diputuskannya mekanisme suara terbanyak dalam pemilihan calon legislatif sama artinya menjauhkan figur sentral partai dan menggantikannya pada figur pemimpin di daerah masing-masing. Dengan ini bukan tidak mungkin hasil-hasil survei akan terkubur sama sekali.

PDIP yang telah dari awal mengajukan capres pun bisa jadi kecewa dengan hasil suara partainya akibat munculnya tokoh-tokoh ‘nasionalis’ di daerah dari PDP dan yang lainnya. Sedangkan PKS, partai yang dikenal solid ini juga telah ditinggalkan oleh sebagian pendukungnya, yaitu HTI.

Partai yang terlihat menggerakkan mesin partai nya dengan dana berlimpah adalah Gerindra. Partai ini, baik dalam komposisinya dan dalam slogan-slogannya dapat diketahui merupakan partai yang ingin mempertahankan dominasi militer dalam ekonomi politik nasional, dan merupakan kekuatan utama yang mampu merubah formasi politik baru di 2009.

Dalam garis besarnya, pemilu 2009 tidak akan menghasilkan partai yang suaranya melebihi 20%, bahkan mungkin saja tidak lebih dari 15% dari jumlah pemilih.

Kembali pada pertanyaan diatas: Apa yang akan terjadi sesaat setelah “pesta” usai? Usainya pesta berarti usainya juga ilusi yang dibangun Kapitalisme. Pemimpin-pemimpin hasil pemilu akan bergandengan tangan kembali untuk menyelamatkan Kapitalisme Indonesia, sedangkan rakyat semakin merasakan kesulitan hidup di bawah Kapitalisme yang sudah layu.

Cara terbaik dan termulus kapitalis dalam negeri untuk menyelamatkan dirinya adalah dengan memperpanjang barisan kelaparan, kemiskinan, dan memperparah penghisapan. Pemerintahan modal bahkan tidak akan perduli lagi tentang standar-standar kesejahteraan kalau itu berhubungan langsung dan berkontradiksi dengan syarat-syarat kepemilikannya atas alat produksi. Atau, formasi politik 2009 nanti bisa saja memperlamanya dengan program nasionalisasi setengah-setengah (baca: renegosiasi) terhadap aset-aset yang dapat menghasilkan modal, namun dengan tetap memohon bantuan hutang untuk memberi banyak insentif kepada industri-industri yang *kolaps*.

Terjadinya kemungkinan yang kedua juga memiliki konsekuensi yang dalam terhadap keberlangsungan industri di Indonesia, karena modal asing tidak akan dengan senang hati memberi kepunyaannya jika hal tersebut tidak memberi keuntungan strategis di masa depan. Dalam posisi inilah kelas borjuis Indonesia akan kembali mengkhianati rakyat Indonesia demi bekerja sama dengan Imperialis, apa pun negaranya.

PRP dan Pemilu

Sebuah pertanyaan sederhana, mungkin layak disampaikan pada pemilu 2009 ini. Apakah pemilu 2009 akan menghasilkan sebuah kepemimpinan politik yang dapat mengatasi berbagai persoalan dan menghadirkan sebuah perubahan yang berarti bagi mayoritas masyarakat Indonesia?

Seperti telah diulas pada bagian awal, bahwa 2008 kemarin kita dihadapkan oleh sebuah persoalan yang sangat fundamental bagi keberlangsungan umat manusia. Krisis kapitalisme yang dialami oleh negara-negara maju yang kemudian berimbas lebar bagi negara-negara dunia ketiga, telah melahirkan

berbagai dampak yang luar biasa bagi rakyat pekerja. Sementara penyelenggaraan pemilu yang selama ini dianggap sebagai jalan untuk melakukan perubahan, mempunyai jarak yang tidak jauh dari dimulainya krisis ini sehingga harapan tentunya menjadi ada bagi lapisan masyarakat yang terkena imbas dari krisis tersebut, akan mempunya pemerintahan terpilih nanti mengatasi krisis.

Namun demikian jika dilihat dari prosedur politik pemilu yang ada, dimana usaha penyingkiran terus menerus peluang politik rakyat pekerja secara signifikan dengan berbagai syarat yang sulit untuk menunjukan peruntukan pemilu bagi kelompok tertentu saja. Penyederhanaan partai politik dilakukan untuk membatasi mereka yang bermain dalam panggung resmi politik.

Dalam esensi demokrasi, justru pemilu di Indonesia telah meminggirkan hak sipil politik lewat paket UU Politik yang tetap meniadakan kesempatan bagi ideologi perjuangan kelas untuk dapat berpartisipasi dalam politik elektoral. Karenanya kita nyaris tidak melihat sama sekali artikulasi politik anti kapitalisme dan atau menggugat kebijakan neoliberalisme dilakukan dalam panggung pemilu sejak 1999. Ruang pemilu steril dari artikulasi politik yang bersifat ideologis, yang bersebrangan dengan sistem kapitalisme. Ini adalah noda yang kesekian kalinya dari gagasan tentang demokrasi, karena pemancungan atas sebuah paham masih saja ada. Dan isronisnya, pemilu masih saja menyebut dirinya sebagai sebuah pesta demokrasi rakyat.

Dalam sejarahnya, ruang pemilu sejak 1999 mengajukan logika calon/orang atau moralitas dapat menyelesaikan permasalahan sosial dengan mengabaikan struktur sosial yang nyatanya berkuasa. Dan dalam perjalananya, moralitas dari orang-orang yang dipercaya oleh rakyat bersih, ternyata juga tak mampu mengangkat masyarakat indonesia secara umum kedalam sebuah kenyataan dan kebutuhan akan kesejahteraan.

Sebaliknya, berbagai produk politik merugikan rakyat pekerja dihadirkan oleh berbagai rezim yang berkuasa. Sebutlah Undang-Undang Ketenagakerjaan yang melegalkan pemilik modal untuk memfleksibelkan tenaga kerja, sehingga musnahnya kepastian kerja bagi para pekerja. Belum lagi Undang-Undang tentang migas, yang juga melegalkan bagi para pemilik modal untuk menguasai sesuatu yang merupakan hajat hidup orang banyak, menjadi kepemilikan beberapa gelintir orang saja yang memiliki modal. Artinya pemilu selama ini justru melahirkan orang-orang, partai dan sistem yang terus mengeksploitasi negeri ini dari manusia hingga alam, untuk kepentingan penguasa politik dan neoliberalisme.

Sementara itu trend dari pemilu 2004 hingga berbagai pilkada didominasi oleh fenomena “golput”, yang menjadi pemenang atas setiap perhelatan pemilu maupun pilkada. Terlepas dari berbagai argumen tentang faktor penyebab besarnya angka golongan putih (Golput) hal ini juga menunjukkan sebuah ketidakpercayaan rakyat atas partai atau individu yang menjadi kontestan pemilu.

Namun demikian, golput menjadi besar bukan karena hasil dari sebuah pengorganisir dari kelompok-kelompok yang apolitis maupun yang secara idiologis mempertanyakan pemilu sebagai media pergantian kepemimpinan politik. Golongan putih dapat dikatakan sebagai sebuah gerakan spontan dari masyarakat secara individu, atas kondisi yang ada.

Walaupun dapat dikatakan bukan sebuah gerakan, golput telah menjadi hantu yang menakutkan bagi para elit politik dan partai peserta pemilu, karena dia bisa saja dijadikan sebuah alat untuk mendelegitimasi pemerintahan yang menang dalam pemilu. Atau lebih jauh lagi, jika golput mampu diorganisir oleh kelompok politik tertentu, akan menjadi sebuah lawan yang luar biasa kuat

bagi partai atau sistem yang ada. Lalu kemudian kewaspadaan akan bahaya golput, tentunya akan menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah maupun partai politik peserta pemilu untuk mengantisipasinya. Yang kemungkinan salah satu cara yang akan digunakan adalah dengan melakukan politik uang untuk memobilisasi masyarakat ikut serta mencoblos dalam pemilu.

Kemudian pertanyaan selanjutnya akan muncul dari rangkaian-rangkain pertanyaan berikutnya tentang pemilu 2009 nanti. Mampukah pemerintahan selanjutnya mengatasi krisis tersebut? Jika kita tinjau dari 38 kontestan peserta pemilu 2009 nanti, tak ada partai-partai tersebut yang menguraikan dan menjelaskan kepada masyarakat tentang bahaya dari krisis yang dialami secara global ini dan memberikan sebuah solusi dari berbagai dampak yang akan dialami oleh masyarakat. Tampaknya pemilu hanya akan melahirkan pemerintahan yang meneruskan agenda-agenda dari pemerintahan sebelumnya yang mengabdikan pada kepentingan modal dan terus menyebarkan praktek-praktek neoliberalisme dan membantu kapitalisme untuk keluar dari krisisnya.

Pemerintahan selanjutnya tetap akan menjadi kepanjangan tangan dari kapitalisme dan membuat kebijakan-kebijakan yang cenderung tidak populis bagi rakyat pekerja. Hal ini dapat kita lihat dari para kontestan dari pemilu 2009. Partai-partai oligarki masih menghegemoni kepesertaan dalam pemilu, yang mana secara ideologi partai-partai tersebut berlandaskan pada praktek-praktek yang akan menguntungkan mereka. Tak ada satupun dari peserta pemilu yang memang mempunyai sejarah dalam memperjuangkan dan memberikan tawaran janji atau program yang secara kongkrit akan mengangkat kehidupan masyarakat kearah kesejahteraan dan keadilan sosial. Tawaran kesejahteraan dan keadilan yang mereka janjikan ke masyarakat lebih terlihat kesemuan dalam bentuk-bentuk detailnya, karena lagi-lagi

cara yang mereka lakukan untuk mewujudkan hal itu masih menggunakan cara-cara lama (kapitalisme) yang telah terbukti gagal mewujudkan itu dalam kurun waktu Indonesia ada.

Pemilu 2009 bukan hanya memberikan ilusi akan adanya sebuah perubahan yang mendasar bagi rakyat pekerja, lebih jauh lagi ilusi itu pun merasuk kedalam berbagai kelompok yang selama ini juga kritis dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Upaya dari partai-partai politik untuk merekrut orang-orang dari kalangan aktivis untuk masuk sebagai salah satu calon legeslatif dari partai tertentu adalah bentuk dari ilusi tersebut.

Masuk kedalam sistem dan berjuang didalamnya bukan lah hal yang salah, namun keikutsertaan masuk dalam lembaga negara (legeslatif) secara individu bukanlah sebuah langkah yang tepat. Karena pada dasarnya, kekuasaan partai yang mengusung namanya masuk dalam calon legeslatif, lebih mempunyai power yang kuat. Karena pada dasarnya, kebijakan politik yang diambil oleh lembaga Negara tersebut adalah sikap dari partai.

Sikap Politik Atas Pemilu 2009

Kesimpulan utama terhadap Pemilu 2009 memberi panduan agar dalam menilai Pemilu 2009 sebagai ekpresi demokrasi liberal-prosedural harus diperiksa secara tepat implikasinya terhadap kondisi objektif dan subjektif bagi kedaulatan politik rakyat mau pun tahap kesejahteraan secara umum. Maka PRP sebagai sebuah organisasi yang berbasiskan rakyat pekerja, mengharuskan memiliki sikap politik terkait dengan pemilu 2009. Dimana sikap politik tersebut harus memilki implikasi terbentuknya konsolidasi kekuatan politik kerakyatan untuk perubahan politik. Sikap tentang pemilu yang didasari oleh pengungkapkan fakta-fakta nyata bahwa rakyat memiliki kesadaran bahwa rakyat tidak

mendapat manfaat sejauh ini dari hasil-hasil pemilu selama ini sejak keran reformasi di buka pada penyelenggaraan pemilu 1999 hingga saat ini dan lebih jauh lagi sejak pemilu di zaman Orde Baru.

Menjabarkan pengalaman kerja politik partai-partai yang sudah terlibat saat ini tidak dapat dipercayai oleh rakyat. Menyatakan kesimpulan sikap bahwa Pemilu tidak akan menghasilkan perubahan yang memberikan kesejahteraan rakyat, dan karenanya menyatakan dukungan kepada kelompok-kelompok dan mereka yang menyatakan dirinya golput pada Pemilu 2009 serta mengajak kelompok-kelompok lain untuk tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2009. Dan kemudian ditindak lanjuti dengan tidak mendingkan masyarakat golput sebagai sikap individu belaka, melainkan lebih jauh lagi mengorganisir masyarakat golput tersebut dalam satu kekuatan yang mencerminkan sikap politik secara kolektif.

Gerakan rakyat tidak cukup berhenti dengan Golput pada Pemilu 2009, tapi lebih dari itu kita memandang mendesak agar gerakan rakyat membangun kekuatan persatuan dari gerakan rakyat untuk membentuk alat politik alternatif yang memiliki platform politik dan program-program politik untuk kesejahteraan rakyat (berwarna politik sosialis) yang dapat digunakan di ruang persatuan dan menggantikan sistem politik yang ada saat ini.

Persatuan Gerakan Rakyat

Sudah menjadi sebuah rahasia umum bahwa fragmentasi gerakan rakyat adalah sebuah masalah akut dari perjuangan rakyat secara umum. Fragmentasi memang juga hadir di kalangan elit politik dan penguasa negeri ini. Namun secara politik dan ideologi, mereka mempunyai satu kesamaan untuk tetap mempertahankan sistem ekonomi politik yang ada saat ini. Konflik yang terjadi

diantara elit hanyalah sebuah konflik perebutan kekuasaan yang diperlombakan untuk kalangan mereka saja. Dan sebisa mungkin dengan berbagai cara menyingkirkan kelompok yang berlandaskan kerakyatan untuk hadir dan meramaikan perabutan kekuasaan tersebut.

Realistas kongkrIt dari gerakan rakyat saat ini dapat kita lihat dalam keseharian pertemuan antar kelompok gerakan rakyat, baik dalam tataran konsep maupun praktis. Landasan berfikir dan cita-cita yang ingin diwujudkan mungkin bisa kita katakan sama, namun dalam memilih strategi taktik banyak sekali perbedaannya, yang kemudian berimbas pada sulitnya persatuan diantara kelompok, bahkan untuk satu program bersama sekalipun.

Hal lain yang mungkin memberikan pengaruh dari fragmentasi tersebut adalah tingginya eksistensi diantara kalangan gerakan rakyat. Kepercayaan diri yang sangat tinggi bahwa organisasinya lebih besar dan paling benar dalam merumuskan strategi taktik, telah membawa setiap kelompok pada masalah tak adanya otokritik.

Fragmentasi tidak hanya hadir dalam bentuk ketidaksamaan gerak saja, namun juga pada pandangan secara umum tentang kondisi dan situasi ekonomi politik bahkan sampai dengan tataran isu dan platform juga mengalami fragmentasi. Lebih jauh lagi, sasaran tembak atas siapa yang seharusnya disalahkan atas kondisi negeri juga mengalami perbedaan-perbedaan diantara berbagai kelompok. Persoalan ini tentu bukan hal yang mudah dan cepat diatasi. Membutuhkan waktu dan cara yang tepat sehingga rumusan akan persatuan gerakan tidak lagi sebatas dalam tataran wacana dan kenginan yang menggebu dari setiap kelompok.

PRP sebagai sebuah organisasi yang lahir dari sebuah konsolidasi gerakan untuk persatuan dengan memegang konsepsi univikasi gerakan multi sektor, adalah sebuah hal yang baru dalam

sejarah persatuan gerakan. Atas sebuah dasar dan pandangan yang sama akan kosongnya politik kelas di Indonesia dan kebutuhan akan satu kesatuan gerak dalam perlawanan terhadap neoliberalisme, menjadikan sebuah komitmen dan semangat diantara masing-masing kelompok untuk melebur dalam satu wadah bersama. Dengan tetap terus menawarkan proposal-proposal persatuan gerakan rayat yang lebih laus. Dan mandat dan dorongan organisasi untuk terus mewujudkan persatuan gerakan sebagai langkah awal dari perjuangan yang lebih besar lagi, telah berupaya dalam beberapa agendanya mempersatukan gerakan rakyat. Menemukan kesamaan dan perbedaan, melakukan kritik otokritik antar gerakan, dalam perkumpulan besar yang digagas dari atas (pimpinan oranisasi) yang idealnya kemudian diturunkan kemassa di akar rumput. Ternyata lebih banyak menghasilkan kegalah dalam perjalananya.

Evaluasi bahwa persatuan gerakan rakyat akan sangat sulit terjadi jika dimulai dari tingkat atas, telah memberikan sebuah pengalaman yang berharga dari upaya-upaya persatuan tersebut. Yang kemudian pada saat ini dimanifestasikan dalam bentuk melakukan kerja-kerja bersama dalam bentuk praktis antar kelompok seperti aliansi untuk merespon berbagai isu kerakyatan ataupun diskusi-diskusi bersama. Sehingga lambat laun diharapkan satu sama lain antar kelompok dapat melihat, memahami dan merumuskan metode serta pola gerak yang sama. Dari pengalaman-pengalaman praktek bersama inilah basis material dari persatuan lahir, yang kemudian didorong untuk melangkah lebih kedepan lagi dalam menemukan pandangan bersama, isu, platform bahkan sampai tujuan yang sama tentang makna dari perubahan.

Jalan Macet Demokrasi Prosedural dan Jalan Alternatif Demokrasi Sejati

Anwar Ma'ruf¹

Pemilihan Umum (Pemilu) biasanya tampak sebagai suatu hal yang sangat demokratik. Hal ini terutama terasa setelah kita berhasil melepaskan diri dari era kekuasaan politik otoriterisme yang sekaligus sangat militeristik. Selama 32 tahun kediktatoran militeristik borjuis para pejabat publik praktis hanya ditunjuk dari kesepakatan penguasa yang dipilih lewat pemilu pura-pura. Pemilu di era paska Suharto tampak sebagai sebuah alat yang sangat tepat untuk membuka kesempatan berkuasa menjadi setara bagi setiap orang. Namun saat ini dengan tingkat “Golput” yang sangat tinggi rasanya tepat untuk mempertanyakan apakah Pemilu di Indonesia, khususnya pemilu tahun 2009 dengan segala

1 Koordinator Badan Pekerja Nasional Aliansi Buruh Menggugat (BPN ABM), Front Pembebasan Nasional (FPN) 2008 dan Komite Solidaritas Nasional (KSN) SP AP I dan tolak privatisasi.

reformasi prosedur/aturan main-nya adalah jalan yang akan membawa perubahan bagi kesetaraan politik dan kesejahteraan bagi rakyat pekerja di Indonesia. Apalagi demokrasi dimanapun sekarang sedang dihadang suatu tantangan zaman dimana mayoritas rakyat pekerja sedang tersandera dan menjadi korban krisis kapitalisme global.

Pemilu 2009: Ruang Bermain Untuk Siapa?

Hingar bingar pesta demokrasi di Indonesia telah dimulai. Hampir setiap hari kita disuguhi oleh media massa tentang berbagai manuver politik yang dilakukan oleh partai-partai politik di Indonesia. Pemilu 2009 ini akan diikuti oleh 44 partai politik, baik partai politik lama dan partai politik baru. Hal baru dalam pemilu kali ini ialah adanya pemilu lokal yang akan diikuti oleh 6 partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Kampanye dan propaganda dengan gencar dilancarkan oleh partai-partai politik yang akan mengikuti kontes Pemilu 2009. Kondisi kemiskinan dan kemelaratan rakyat Indonesia akan menjadi sebuah tema yang menarik bagi para politisi dari partai-partai politik tersebut. Semua ruang publik yang dapat dijangkau sejauh mata memandang dan ke arah mana pun kaki kita melangkah, di setiap jengkal panjang jalan, bahkan melalui televisi menyambangi ruang tempat tinggal setiap orang ketika menjelang berangkat tidur. Semua ruang telah dimasuki iklan politik dan kampanye janji-janji politikus yang bernafsu memenangkan kursi kekuasaan dengan mengumbar janji kosong tentang kesejahteraan rakyat, tapi tidak menjelaskan jalan apa yang akan ditempuh untuk mewujudkan kesejahteraan itu.

Pemilu 2009 adalah ruang bermain bagi rejim yang berkuasa, parpol peserta pemilu, calon-calon legislatif, calon-calon presiden wajah baru dan lama, hingga para operator politik

-calo politik, tim sukses, tim kampanye, dst. Semua yang bermain di jalan pemilu 2009 dengan sekuat tenaga memasok hegemoni kesadaran rakyat tentang pemilu 2009 dengan mencekokkan khayalan bahwa pemilu adalah “pintu ajaib” menuju Indonesia baru. Dengan melampauinya, maka otomatis akan sampai pada kondisi Indonesia yang baru, Indonesia tanpa kemiskinan dan Indonesia yang *gemah ripah loh jinawi*. Pintu ajaib yang menghasilkan keajaiban tanpa memperdulikan kenyataan sejarah dan kondisi obyektif saat ini.

Kenyataannya, wajah-wajah lama masih menghiasi bursa calon presiden untuk Pemilu 2009 seperti Megawati Soekarnoputri yang diusung oleh PDI-P dan Susilo Bambang Yudhoyono yang diusung oleh Partai Demokrat. Sementara “wajah-wajah baru”, adalah tokoh-tokoh kunci dari kekuasaan otoriter militeristik Orde Baru, seperti: Wiranto yang diusung oleh Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Prabowo Subianto yang diusung oleh Partai Gerindra, Sutiyoso, Sultan Hamengku Buwono X, Agung Laksono dan lain-lain. Dengan menggunakan akal sehat dapat dilihat bahwa jalan demokrasi prosedural yang berlaku sejak 1999 menghadirkan para calon presiden dengan akar politik yang berlumuran dosa dan kejahatan Orde Baru yang tak pernah dipertanggungjawabkan hingga saat ini.

Sudah dapat dipastikan rekam jejak kiprah calon presiden atau partai politik yang mengusung calon-calon presiden yang telah mengemuka hingga hari ini tidak ada satu pun yang berpihak pada kepentingan rakyat untuk membebaskan diri dari penjajahan modal dan menegakkan Hak Asasi Manusia. Dua calon yang paling santer mendominasi pemberitaan media: Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono telah pernah menjabat sebagai presiden dan telah terbukti berhasil memperdalam jerat penjarahan neo kolonialisme-imperialisme (nekolim) di Indonesia. Selain membiarkan terus menurunnya kualitas hidup rakyat, gagal menghentikan perusakan

alam karena alasan mengakomodir kepentingan investasi modal, juga konsisten membiarkan tak terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran HAM dari masa lalu hingga masa kini.

Sementara “wajah-wajah baru” pun tak lebih dari setumpuk pilihan “apel busuk”. Sebut saja Wiranto yang pernah menjabat Panglima TNI dan diindikasikan terlibat dalam peristiwa pelanggaran HAM Berat di Timor Timur (sekarang Timor Leste). Begitu juga dua calon lain yang juga mantan petinggi militer, Prabowo Subianto tak pernah mempertanggungjawabkan keterlibatannya dalam kasus penghilangan paksa 1997/1998, sementara Sutiyoso diindikasikan terlibat dalam kasus kerusuhan 27 Juli 1996.

Pilihan di luar mantan petinggi militer pun tidak menerbitkan asa buat rakyat. PKS yang mungkin mengusung Hidayat Nur Wahid terbukti merupakan salah satu partai yang mendukung, paket Undang-Undang Perburuhan yang pro-pasar bebas, kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu, dan menjadi motor UU BHP yang menegaskan politik komersialisasi pendidikan. Sementara Sultan Hamengku Buwono X merupakan Gubernur DIY juga belum dapat meningkatkan kesejahteraan di wilayahnya, bahkan tersangkut dengan banyak sekali kasus perselisihan kepemilikan tanah dengan rakyat, karena kepemilikan tanah yang dimiliki kekuasaannya adalah warisan kekuasaan feodal sisa kolonialisme.

Menguatnya kekuatan faksi ‘neo orba’ menguasai ruang bermain di arena politik elektoral, bisa dikatakan nyaris tidak mampu diimbangi oleh kekuatan-kekuatan progresif yang berserak diantara kalangan masyarakat sipil. Mereka yang sadar dan menolak memperkuat demokrasi prosedural yang sudah mencapai titik jenuh akhirnya secara tragis bermain di luar arena pertarungan politik utama yang ada sebagai kaum oposisi ekstra parlementer.

Kelemahan dari “permainan ekstra parlementer” adalah dalam hal dukungan sosialnya yang kecil dan ruang propagandanya yang sempit. Akibatnya ketidak puasaan rakyat akan partai-partai utama yang ada “lari” kepada kekuatan elektoral baru yang dianggap sebagai “politik alternatif” seperti Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demorkat, Partai Hanura, dan Partai Gerindra. Bila ini terjadi maka ada kemungkinan rakyat sedang digiring dari perangkap “ilusi lama” kepada “ilusi baru”.

Yang Dihasilkan Pemilu Sejak 1999-2009

Seperti halnya kisah persaingan selibritis atau peserta kontes idol, media massa menyajikan tontonan cukup menarik berupa drama persaingan antar kontestan lomba popularitas elit politik yang akan digelar dengan biaya besar anggaran pembangunan negara. Tapi sebetulnya yang harus kita periksa dibalik segala sensasi itu adalah suatu pertanyaan utama: Seperti apa relasi kuasa antara negara dan masyarakat yang dihasilkan oleh mekanisme pemilu sejak 1999.

Siapun yang terpilih melalui pemilu memiliki kesempatan untuk menentukan bagaimana kekuasaan negara dijalankan dan mempengaruhi cara rakyat memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara. Pengalaman kita selama kurang lebih 10 tahun terakhir memberikan kesimpulan, siapapun yang berkuasa maka kekuasaan negara tetap mereproduksi beberapa elemen pokok yang menentukan nasib bangsa dan keadaan sosial rakyat.

Mempertahankan Cengkeraman Neoliberalisme

Sejak keruntuhan perekonomian oligarki yang berlandung di balik rejim otoriter Suharto tahun 1998, yang terjadi bukannya mengembalikan kedaulatan rakyat seperti yang diatur dalam

konstitusi UUD'45 tapi justru adalah penataan kembali hubungan-hubungan sosial politik yang diperlukan untuk mengokohkan genggamannya kekuasaan modal internasional dan institusi-institusinya seperti Bank Dunia dan IMF.

Penataan dilakukan agar negara dan kehidupan sosial paska Suharto melanjutkan secara lebih berdisiplin dengan asumsi tidak lagi terdistorsi korupsi, kolusi nepotisme yang dianggap identik dengan Suharto. Di atas bangunan reformasi itu dilakukan penyesuaian struktural dengan menjalankan resep yang sebangun dengan Konsensus Washington, yaitu: (1) Disiplin fiskal; (2) Pemangkasan terhadap anggaran belanja publik; (3) Reformasi pajak; (4) Pengaturan pasar atas suku bunga; (5) Nilai tukar valuta asing yang kompetitif; (6) Liberalisasi perdagangan; (7) Menggairahkan investasi asing dalam bentuk FDI; (8) Semua pelaku ekonomi tunduk pada disiplin pasar bebas; dan (9) Jaminan atas hak kepemilikan pribadi.

Untuk menjalankan seluruh unsur Konsensus Washington, maka diperlukan sebuah tangan-tangan birokrasi yang kuat dan didukung oleh pelaku ekonomi serta partai-partai politik. Di Indonesia, peran birokrasi dijalankan oleh kaki-tangan IMF yang paling setia; yakni Bank Indonesia. Tragisnya sejak mendapatkan hak otonom dari campur tangan eksekutif, justru selama 5 tahun terakhir ini kita dikejutkan luar biasa dengan terkuaknya tuntutan skandal dimana para pejabat Bank Indonesia mengucurkan uang Negara untuk korupsi dan penyuapan pejabat negara lain agar memuluskan penjarahan uang rakyat yang digunakan untuk pemulihan krisis 1998 lewat skema busuk bernama Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Sementara itu, peran kekuatan ekonomi semakin lama semakin diambil alih oleh APINDO. Organisasi pengusaha yang dipimpin Sofjan Wanandi ini belakangan berperan sangat aktif

dalam menyusun berbagai perundang-undangan yang berkaitan dengan sektor ekonomi, seperti UU Ketenagakerjaan, UU Investasi, dll. Dalam jajaran APINDO terdapat banyak sekali pengusaha yang sekaligus merangkap sebagai pejabat pemerintah atau politisi, yang berpengalaman panjang menyusun sistem perekonomian Orde Baru. Sebagai ketua Dewan Penasehat terdapat Aburizal Bakrie, yang kecurangannya dalam memanfaatkan jabatan politik demi profit perusahaan dan penghindaran tanggungjawab publik perusahaan. Salah satu contoh paling mutakhir yang sangat terkenal adalah kasus Lumpur Lapindo. Sedangkan Sofjan Wanandi adalah salah satu pilar kekuasaan Orde Baru, bersama kakaknya Jusuf Wanandi yang merupakan salah satu tokoh CSIS yang paling anti gerakan buruh.

Peran yang dimainkan oleh partai-partai politik produk pemilu sejak 1999, seperti Golkar dan PDI-P, adalah memenuhi panggung politik dengan satu gagasan utama: nasionalisme pro-neoliberal, nasionalisme yang pro kapitalisme pasar bebas. Yang dilakukan adalah gotong royong diantara partai-partai politik di parlemen, yang semuanya berkutat pada penguatan peran aktor-aktor ekonomi baru yang lebih terbuka pada kebijakan-kebijakan neoliberal dan masuknya modal asing ke Indonesia.

Hasil gotong royong menopang neoliberalisme itu tampak jelas pada seluruh produk perundang-undangan selama 10 tahun terakhir yang intinya mendorong semakin banyak: privatisasi, komersialisasi pelayanan publik, liberalisasi ekonomi, pembatasan hak rakyat pekerja terlibat dalam demokrasi ekonomi. Produk undang-undang yang keluar adalah undang-undang yang pro pasar bebas seperti yang tampak dalam UU Kelistrikan, UU Migas, UU Ketenagakerjaan (yang dilawan habis-habisan oleh kaum buruh), UU Penanaman Modal, UU Badan Hukum Pendidikan, dan banyak lagi UU ciptaan para alumnus pemilu sejak 1999.

Menyusun Oligarki Kekuasaan Ala Orde Baru

Tidak semua unsur Konsensus Washington ternyata diterapkan di Indonesia. Banyak faktor politik yang menghambat penerapan Konsensus ini, baik yang bermakna positif bagi gerakan rakyat atau yang bermakna negatif dan merupakan hasil reaksi dari rejim ekonomi yang turut terancam kelangsungan hidupnya oleh neoliberalisme.

Unsur “disiplin fiskal” ternyata tidak berhasil diterapkan, terutama karena gagalnya pemerintah Indonesia membendung kebocoran uang negara akibat korupsi dan pelarian modal ke luar negeri. Hal ini disebabkan oleh masih kokohnya struktur oligarki yang dulu menopang perekonomian Orde Baru, baik yang dikelola oleh pemain-pemain lama (“keluarga Cendana”) ataupun pemain-pemain baru (seperti keluarga Megawati dan beberapa jenderal yang berusaha mandiri dari naungan Cendana). Struktur oligarki yang sudah lama bercokol ini tidak dapat hidup tanpa sebuah sistem yang korup, yang dipenuhi dengan penyalahgunaan kekuasaan dan “komisi”.

Militer, dalam hal ini bersikap ambigu terhadap neoliberalisme. Peran militer dalam menyokong oligarki, baik yang lama maupun yang baru, sangatlah vital sampai hari ini. Sementara oligarki semacam ini merupakan salah satu bentuk perekonomian yang hendak dibongkar oleh neoliberalisme. Di pihak lain, peran militer sebagai penjaga “stabilitas dan keamanan” juga sangat diharapkan oleh para penguasa baru yang mengabdikan pada neoliberalisme ini. Dalam konteks ini, makin banyak jenderal yang terjun ke bidang politik praktis, bahkan dengan mengusung tema-tema kampanye yang populistis (seperti Prabowo dan Wiranto).

Tentara sadar bahwa mereka harus membangun basis kekuatan politik kalau mau tetap hidup di tengah arus liberalisasi,

yang bisa menggerus perusahaan-perusahaan mereka yang tidak efisien dan mengandalkan rente dalam pengerukan keuntungannya. Militer juga sadar keterlibatan mereka dalam bisnis-bisnis kotor seperti *Illegal Logging* tidak lagi dapat ditutupi dengan mudah apalagi dibenarkan seperti di masa rejim otoriterisme Suharto.

Akhirnya kombinasi dari berbagai faktor diatas menghasilkan kemacetan jalan demokrasi prosedural. Kemacetan yang harus dipahami sebagai resultan dari dua kecenderungan gaya utama dalam demokrasi prosedural: ruang bermain yang didominasi oleh elit borjuasi dan atau bagian dari mantan pelaku politik di masa orde baru serta kecenderungan kekuasaan hasil pemilu sejak 1999 melindungi dan mengembangkan neoliberalisme.

Pemilu 2009 Bukan Kemenangan Rakyat

Demokrasi prosedural paska Suharto penuh dengan paradok. Kaum elit dan oportunistis politik bergegas memajang diri untuk ikut kontes pemilu, sementara rakyat kebanyakan begitu lesu dan apatis hingga memaksa pemuka ulama untuk mengeluarkan fatwa konyol yang mengharamkan Golput demi merangsang rakyat kembali percaya untuk ikut demam pemilu seperti di tahun 1999.

Apatisme politik yang meluas adalah akibat dari disain demokrasi prosedural yang menyingkirkan elemen ‘substansi’ dari demokrasi yaitu kekuasaan di tangan rakyat. Tapi substansi itu dilindas oleh prosedur dalam Paket UU Pemilu untuk tahun 2009. Aturan main yang ada selalu bisa diarahkan dan dibengkokkan agar terus menyulitkan posisi rakyat pekerja dan kelompok marjinal lainnya di masyarakat. Bermula pada proses di tim akademisi draft UU Pemilu dari 2200 daftar inventaris masalah (DIM) hanya 4 yang dirubah, selebihnya diabaikan (Arbi Sanit; 2008). Dari ribuan masalah itu diantaranya adalah soal teknis-

teknis kepesertaan pemilu oleh partai politik yang mengandalkan kekuatan uang.

Disain pemilu 2009 akhirnya semakin jelas mengarah pada komersialisasi politik dan persaingan bebas yang mengandalkan kekuatan modal untuk mobilisasi dan kampanye politik ke massa mengambang. Belanja iklan pemilu pun membengkak luar biasa dan hanya menghasilkan tumpukan kebohongan dan pembodohan politik bagi masyarakat. Total belanja pemilu tahun 2004 mencapai tak kurang dari 400 milyar rupiah. Sementara menjelang pemilu 2009 ini telah ditaksir tak kurang dari 800 milyar rupiah telah dihaburkan dan bahkan nilai itu akan terus membumbung hingga saat pemilihan presiden di kuartal ketiga tahun 2009 ini. Biaya iklan yang besar tapi tidak menggerakkan perekonomian rakyat secara makro.

Pembiayaan pemilu tahun 2009 pun sangat besar menyedot keuangan negara, yang sedang tergerus krisis. Pemilu 2009 dalam rencana pembiayaanya dialokasikan sebesar Rp 47,9 Trilyun. Ongkos pemilu yang sangat besar diperoleh dengan hutang luar negeri lembaga-lembaga donor kaum imperialis. Dampak politik dari hutang atau hibah atau apapun istilahnya pasti akan menimbulkan konsekuensi yang nantinya dibebankan dan ditanggung oleh rakyat. Pengalaman itu sudah terbukti dari 2 pemilu terakhir di Indonesia menghasilkan rejim anti rakyat produsen kebijakan-kebijakan Anti rakyat pula.

Mencari Celah Jalan Kebuntuan

Dapat disimpulkan bahwa demokrasi prosedural yang menguasai wajah perpolitikan mengalami kemandegan untuk menghasilkan perubahan. Namun demikian tetap perlu untuk memperjuangkan demokrasi walau pun demokrasi selalu menjadi

permainan yang membingungkan. Pilihan peradaban manusia terhadap demokrasi bukan terletak pada kesempurnaan demokrasi itu sendiri, akan tetapi karena demokrasi merupakan satu-satunya pilihan yang lebih baik dibanding pilihan yang lain seperti totalitarianisme atau otoritarianisme. Dikarenakan demokrasi bukanlah sebuah sistem politik yang sempurna, merupakan sebuah imperatif untuk terus memperdebatkan kerja demokrasi yang tengah berproses di Indonesia sekarang ini.

Debat akan demokrasi setidaknya dapat dilihat dalam beberapa hari belakangan ini di berbagai artikel media massa. Secara singkat dapat diringkaskan bahwa berbagai artikel menuliskan sebuah semangat dan kepedulian yang sama bahwa demokrasi yang tengah kita implementasikan kehilangan efektifitasnya dikarenakan penggunaan sistem pemerintahan yang tidak tegas. Semua artikel tadi sepakat bahwa sistem presidensial harus diperkuat demi demokrasi itu sendiri. ketika pengambilan keputusan berlangsung tidak efektif, maka tentu saja yang menjadi korban sekali lagi adalah rakyat mayoritas.

Ketika rakyat menjadi korban maka tentu saja demokrasi menjadi tidak relevan. Masalah efektifitas kekuasaan (*efficacy of power*) menjadi sesuatu yang penting untuk diangkat dalam mengatasi permasalahan kerja politik kita yang seringkali mengalami kebuntuan. Akan tetapi upaya mendukung sistem presidensial akan sia-sia jika tak mengenali relasi politik demokrasi itu sendiri. Sistem semi presidensial yang di anut sekarang ini adalah respon dari kerja presidensial yang membabi buta yang telah dilakukan oleh rezim Orde Baru.

Berbicara tentang demokrasi maka kita berbicara tentang sebuah sistem politik dimana warga negara menyerahkan sebagian haknya kepada pihak lain yang kemudian pihak lain tersebut akan menjalankan tugasnya sebagaimana mandat dari warga negara tersebut. Tidak heran jika kemudian ilmuwan politik seperti

Robert Dahl melihat demokrasi seperti ini adalah sebuah bentuk poliarki, dimana yang berkuasa pada akhirnya adalah segelintir orang dengan mandat tertentu dari warga negara. Apa yang hilang dari penjelasan teoritis Dahl adalah relasi antara wakil dengan terwakili seringkali terputus. Guillermo O'Donnell secara tepat mengidentifikasi keterputusan ini sebagai sebuah bentuk demokrasi delegatif, dimana wakil muncul hanya sebagai delegasi tanpa mandat. Kondisi ini tentu saja adalah sebuah kondisi patologis bagi demokrasi itu sendiri. hal ini dikarenakan wakil akan tidak bertanggung jawab terhadap yang terwakili.

Relasi politik yang berakarkan pada bentuk demokrasi delegatif akan menciptakan rejim politik yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Hal inilah yang setidaknya harus kita telaah terlebih dahulu ketika kita hendak mengokohkan sistem presidensial. Pilihan akan sistem presidensial akan sangat menggoda ketika sistem politik gagal untuk mewujudkan efektifitas kekuasaannya. Namun ia akan menjadi pedang bermata dua yang berpotensi memotong leher kita semua ketika ternyata efektifitas kekuasaan tersebut hanya akan melanggar hak-hak warga negara. Benar ketika efektifitas tersebut harus didasari dan berlandaskan pada konstitusi. Akan tetapi argumen ini menjadi lemah ketika kita melihat bahwa ruang politik kita sekarang ini masih didominasi oleh relasi politik oligarki yang terus melakukan reorganisasi kekuasaannya sendiri. Relasi politik ini tentu saja bersifat parasit ketika dihadapkan pada demokrasi yang mengebiri ruang yang sama bagi seluruh warga negara. Yang terjadi kemudian adalah efektifitas kekuasaan dari sistem presidensial hanya akan melayani kepentingan oligarki yang ada.

Memperkuat Representasi atau Memperluas Presentasi

Menjadi sangat signifikan untuk dikembangkan dalam mengatasi problem demokrasi di Indonesia hari ini, adalah merebut

kembali pertanggung-jawaban para wakil. Hal ini setidaknya dapat dilakukan melalui dua hal yaitu; **melakukan penguatan atas representasi dan memperluas presentasi politik.**

Dua hal ini menjadi penting untuk melakukan transformasi relasi politik Indonesia guna membuat demokrasi dapat bekerja demi kepentingan mayoritas masyarakat. *Penguatan representasi setidaknya dapat dilakukan dengan membangun sebuah mekanisme pertanggungjawaban wakil yang berkelanjutan.* Mekanisme dimana wakil akan selalu mempertanggungjawabkan semua keputusan politik yang telah dibuatnya dihadapan para yang terwakili. Jika para wakil gagal untuk mempertanggungjawabkan keputusan politiknya, konsekuensi yang dihadapi oleh para wakil bukan hanya hukuman secara moral akan tetapi lebih dari itu, para wakil dapat dijatuhkan kapan saja dari posisi politiknya. Penguatan representasi ini setidaknya dapat kita lihat pada pengalaman-pengalaman politik di negara-negara maju seperti negara-negara Eropa atau negara-negara Amerika Utara.

Hal yang kedua adalah perluasan atas presentasi. Dalam konteks politik yang telah mengalami kejenuhan dan oligarki pilihan atas penguatan representasi, seringkali pilihan tersebut berbuah kegagalan. Untuk itu, alih-alih melakukan penguatan atas representasi, langkah strategik yang diambil adalah dengan melakukan perluasan atas presentasi. Jika yang terwakili berkuasa secara tidak langsung melalui para wakil, maka perluasan presentasi adalah menjadikan yang terwakili sebagai pihak yang berkuasa.

Dalam pengalaman politik riil hal ini dapat dilihat pada semakin banyaknya negara-negara, biasanya negara berkembang yang melakukan institusionalisasi presentasi warga negara. Institusi-institusi seperti dewan kota (*municipalities*) di Porto Alegre di Brazil, dewan buruh di Venezuela, atau dewan masyarakat adat di Bolivia adalah bentuk dari perluasan presentasi yang terwakili dalam relasi politik yang baru.

Peluang untuk perluasan presentasi seharusnya dicermati dan dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh kalangan gerakan sosial yang progresif. Praktek gerakan sosial yang mengambil bentuk-bentuk pelebagaan (yang diberi penamaan) seperti: forum, aliansi, hingga front seharusnya mentransformasi kapasitas yang saat ini bersifat sementara dan kasuistik menjadi suatu bentuk pelebagaan dari masyarakat sipil, yang secara sadar bertujuan mengintervensi kemacetan sistem politik demokrasi prosedural dengan berbagai fenomena pemilu dan pilkada-nya.

Transformasi menjadi ujian apakah ada alternatif yang praktis dari kalangan yang berani bersuara keras mengkritik kelemahan negara dan pemerintah hingga sistem politik yang berkuasa saat ini. Transformasi menuju suatu blok politik yang menawarkan kontra hegemoni terhadap dominasi neoliberalisasi segala aspek kehidupan tapi juga sekaligus menjadi penjuror yang meluruskan pilihan frustrasi yang dianut masyarakat luas yang sekarang semakin tertarik untuk anti politik atau sebaliknya tergoda pada ilusi-ilusi seperti fundamentalisme dan bibit fasisme yang terkandung pada retorika politik populisme yang dihembuskan para elit-elit politik mantan pelaku utama di masa orde baru.

Bahan baku untuk transformasi harus diupayakan dari apa yang sudah tersedia di gerakan sosial dan kalangan masyarakat sipil yang punya komitmen mengatasi kemacetan saat ini. Kita sudah mengenal adanya aliansi dan front setingkat sektoral atau issue, misalnya: Aliansi Buruh Menggugat (ABM), Komite Solidaritas Nasional (KSN) dan Aliansi Kontra Privatisasi (Alkatras; konsolidasi serikat-serikat buruh BUMN), lalu di masa penolakan BBM juga bertumbuhan front-front berjaringan nasional seperti Front Pembebasan Nasional atau Front Perjuangan Rakyat.

Persoalannya dengan semua front dan aliansi sektoral atau isu itu adalah karakter kesementaraan dan kecenderungan terpaku pada tindakan mobilisasi politik dan belum pada ranah

perluasan presentasi dalam berbagai variasinya. Namun walaupun demikian sebenarnya mulai ada proses yang dibangun oleh aliansi programatis seperti ABM.

Ini adalah saat yang tepat untuk memulai transformasi, beberapa titik tolak pada kondisi obyektif memberi indikasi yang kuat: apatisme rakyat luas terhadap pemilu, terus terkuaknya kepalsuan berkedok demokrasi prosedural yang terakhir telah membuktikan dirinya tidak berpihak pada semangat tindakan afirmasi terhadap perempuan yang sempat mengilusi banyak kalangan aktivis, dan yang muncul terkini adalah kebuntuan politik berbenturan langsung dengan terjadinya krisis ekonomi secara global. Kini saatnya seluruh yang tidak dimungkinkan present (hadir/ada) dalam kekuasaan politik neoliberal harus mau dan mampu melakukan presentasi (hadir) sebagai alternatif yang menerangi jalan rakyat menuju demokrasi yang sejati dan berwatak kerakyatan.

Sekilas Pandang Tentang ABM.

Pada awalnya sebelum Aliansi Buruh Menggugat (ABM) dibentuk, kelompok Serikat-serikat progresif (KASBI, SBTPI, FNPBI (sebelum pecah), FKBC (sekarang FPBJ), GSPB (dulu SBMM), SBI-J (dulu masih SBJ), GSBI, Progresip) bersama-sama melakukan refleksi yang menyadari bahwa terjadi kekosongan kepemimpinan politik kaum buruh di Indonesia. Dalam beberapa kali pertemuan selain membahas pembangunan konsolidasi, yang dibahas adalah situasi ekonomi politik dan kebijakan rezim yang anti rakyat, termasuk didalamnya rencana revisi UUK nomor 13/2003. Selain konsolidasi secara tertutup juga memanfaatkan konsolidasi secara terbuka melalui berbagai even seperti diskusi publik dan kemudian dapat ditarik dalam gerbang aliansi programatis, dari dua kali aksi besar (4 April 2006 dan 1 Mei

2006) di Jakarta yang kemudian di sambut oleh daerah-daerah dengan tuntutan dan bendera yang sama (ABM).

Kemudian yang menjadi sangat penting adalah konsolidasi paska mobilisasi besar-besaran dalam bentuk Konferensi Nasional ABM I, di bulan Juli 2006 (tidak terlalu jauh dari May Day). Konferensi dihadiri kurang lebih 270-an orang dari 33 Serikat Buruh dari 16 Provinsi.

Keanggotaan ABM bernuansa pelangi namun arah menuju gerakan yang progresif dapat disepakati bersama. Hal ini terbukti dari hasil dari Konfernas yang cukup menggembirakan, yakni: Pertama; 4 Platform anti neoliberalisme; penghapusan Utang, Nasionalisasi aset-aset vital, membangun Industrialisasi Nasional yang kuat dan mandiri, pemberantasan Korupsi dengan menyita harta koruptor untuk dana pembangunan),

Kedua; program aliansi yakni; membuat draft legal Undang-undang Pro-Buruh sebagai kritik atau tandingan dari UUK dan UU perburuhan yang anti buruh lainnya, Perumusan draft tentang sistem pengupahan yang kemudian berbentuk draft standarisasi Upah Layak Nasional (ULN), dan konsolidasi baik penguatan dan perluasannya.

Ketiga; adanya struktur yang dipilih dalam konferensi Nasional yakni; Badan Pekerja Nasional (Koordinator BPN, Koordinator divisi Hubungan antar Lembaga, divisi Pendidikan dan Pelatihan, divisi Advokasi, Hukum dan Perundang-undangan, divisi Keuangan dan divisi Kesekretariatan) dan mandat untuk menjalankan konferensi wilayah dan kota/kabupaten, bila perlu sampai pada tingkat kawasan-kawasan industri.

Dalam proses pengembangan ABM memang terjadi pasang surut, pengurangan dan sebaliknya penambahan serta perluasan anggota terjadi. Hal menarik sebagai pengalaman gerakan buruh

adalah dalam menjalankan program penyusunan dan penjaringan draft legal Undang-Undang pro-buruh atau perlindungan buruh. Penjaringan aspirasi dilakukan di 14 kota-kota Industri di Indonesia. Keterlibatan secara aktif dari perwakilan-perwakilan serikat buruh baik anggota ABM maupun perluasannya terjadi. Masukan-masukan yang substantif dan hasil pengalaman praktek dari berbagai daerah juga terjadi, sehingga semakin memperkaya draft legalnya.

Selain itu keterlibatan akademisi dari berbagai perguruan tinggi baik di Jakarta dan daerah-daerah juga terjadi yang kemudian masuk dalam tim legal drafting Undang-Undang Perlindungan Buruh. Program yang lain adalah draft Upah Layak Nasional yang sempat menjadi perdebatan baik di daerah maupun di pusat. Respon dari APINDO dan pemerintah, menggambarkan kekawatiran yang luar biasa jika konsep ini benar dijalankan sebagai kritik sistem pengupahan yang berjalan saat ini yang sangat anti terhadap kesejahteraan buruh.

Dalam kiprahnya ABM juga dipandang sebagai magnet konsolidasi multi sektor, meskipun belum menjadi hasil yang signifikan. Keterlibatan ABM secara aktif dalam berbagai momen konsolidasi tani, nelayan, lingkungan cukup diterima oleh sektor-sektor sekawan tersebut. Selain dalam mobilisasi aksi adalah konsolidasi gagasan untuk mempertemukan antar konsep-konsep solusi seperti Reforma Agraria, Industrialisasi nasional dan Keadilan Ekologis juga terus terjadi.

Didalam tubuh gerakan buruh sendiri disadari sebagian besar masih dalam kondisi terfragmentasi. Namun selalu saja pengkotak-kotakan serikat-serikat buruh ada juga yang mulai pecah kebuntuanya, kemudian sadar dan memilih jalan yang lebih baik. Sebagai contoh, Gerakan buruh di sektor manufactur yang dipimpin oleh ABM mulai bertemu dan berproses bersama

dengan Serikat-serikat BUMN dalam melawan proyek privatisasi dan penggembosan serikat (*union bursting*). Dimana dalam tubuh serikat-serikat BUMN intervensi politik dari partai-partai borjuis dan penguasa sangat kental sehingga pembusukan terus terjadi dan akhirnya yang mampu bertahan pada cita-cita perjuangannya mulai menemukan kawan sejati yaitu ABM.

Catatan penting bertemunya beberapa serikat-serikat pekerja BUMN dengan ABM salah satunya adalah ketemunya platform “Nasionalisasi aset-aset vital negara” yang menjadi proyek besar SBY-JK untuk dijual ke asing. Selain itu adalah platform tentang anti utang (penghapusan utang luar negeri). Konsolidasi masih terus berjalan hingga hari ini dalam bentuk aliansi yakni KSN (Komite Solidaritas Nasional), pada waktu itu koordinator yang dipilih juga koordinator ABM. Sejalan dengan seleksi secara alamiah yang kemudian akan meninggalkan yang tidak konsisten dan melahirkan kualitas baru dalam dinamika gerakan.

Pembentukan Front Pembebasan Nasional (FPN)²

Paska aksi May Day 2008, bersamaan dengan resesi dunia yakni kenaikan harga minyak dunia, ABM berinisiatif mengajak semua elemen untuk mempersiapkan tindakan bersama. Namun tidak semua organisasi mau untuk diajak dalam membangun persatuan atau payung bersama, padahal tetap juga merespon dan melakukan aksi yang sering kali bertemu di lapangan. Maka tidak heran ketikan kalangan gerakan dalam merespon kenaikan BBM tahun lalu ada beberapa front atau aliansi.

Dalam kerja jaringannya ABM mencoba untuk terbuka dalam setiap momentum. Sebagai contoh, dari beberapa kali may day yang terlibat atau organ selalu mendukung ABM selalu saja ada. Juga keterlibatan ABM dalam aksi-aksi sektor lain seperti aksi tani, mahasiswa, lingkungan yang kemudian menjadi sekutu ABM selama ini. Dari praktek yang berulang-ulang tersebut pada akhirnya ABM cenderung dapat diterima diberbagai kalangan.

2 Berbagai organisasi dan lembaga yang mendukung FPN antara lain: Aliansi Buruh Menggugat (ABM), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Aliansi Rakyat Miskin (ARM), BEM Indra Prasetya, Buruh Putri Indonesia, ELSAM, Forum Peduli UNTAR, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) UKI, Ikatan Keluarga Korban Orang Hilang (IKOHI), Jaringan Gerakan Mahasiswa (JGM), Jaringan Nasional Perempuan, Mahardhika (JNPM), Koalisi Rakyat Bangkit Melawan (KORBAN), Komite Persiapan Nelayan Nusantara, Komite Politik Rakyat Miskin-Partai Rakyat Demokratik (KPRM-PRD), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), KBRD, KONTRAS, KPB, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi - Politik Rakyat Miskin (LMND-PRM), LBH-Jakarta, LBH-LAPAS, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP), Persatuan Politik Rakyat Miskin (PPRM), PAWANG, PKPJ, Perkumpulan PRAXIS, Rumah Kiri, Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Serikat Pekerja Angkasa Pura, Serikat Pekerja Indonesia Power, Serikat Pekerja Pembangkit Jawa Bali (SP PJB), Serikat Pekerja PLN (SP-PLN), Serikat Pengamen Indonesia (SPI), Serikat Petani Pasundan (SPP), Serikat Rakyat Miskin Kota-Politik Rakyat Miskin (SRMK-PRM), SIEKEP, Serikat Pemuda Pekerja Paseban (SPP-PASEBAN), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI)

ABM memelopori terbentuknya Front Pembebasan Nasional (FPN) sebagai aliansi multi sektor dalam melawan kebijakan SBY-JK ketika menaikkan harga BBM dibulan mei 2008. Pada saat yang sama harga minyak dunia melambung hingga kisaran harga US\$140 per barrel atau kenaikan harga tertinggi sepanjang sejarah. Kenaikan ini menjadi alasan bagi pemerintahan SBY-JK untuk menaikkan harga BBM dalam negeri atau dengan bahasa lain pencabutan subsidi BBM dan untuk menutupi kebobrokan manajemen atau pengelolaan minyak dalam negeri yang sarat dengan manipulasi.

Dalam menentukan sikap terhadap kenaikan harga minyak tersebut ABM beberapa kali menggelar diskusi terbuka dengan mengundang organisasi lintas sektoral baik serikat buruh, serikat tani, serikat nelayan, miskin kota, lingkungan dan LSM-LSM dari berbagai perspektif. Diskusi terbuka tersebut bertujuan untuk memblejeti apa sebenarnya yang terjadi dibalik kenaikan harga BBM dan Harga Minyak Dunia, juga menyiapkan langkah dan tindakan yang akan dilakukan secara bersama dan prinsip-prinsip yang menjadi batasan bersama.

Dari diskusi-diskusi tersebut lalu disepakati untuk segera melakukan aksi membentuk aliansi atau front yang diberi nama Front Pembebasan Nasional dengan segala prinsip-prinsipnya. Sadar bahwa momentum ini akan dimanfaatkan oleh banyak kepentingan borjuis terkait dengan Pemilu 2009 maka disepakati beberapa prinsip antara lain anti terhadap elit politik dan elit borjuis yang selama ini terlibat atau berada dibalik perusakan negara. Pendanaan FPN dilakukan secara bantingan atau saweran. Kegiatan FPN juga diperluas tidak sebatas aksi massa, seperti diskusi publik, pendiri posko-posko, penyebaran kuisisioner dll.

Dalam waktu yang relatif cepat struktur FPN terbangun diberbagai kota di Indonesia. Hal tersebut dipicu oleh materi-

materi hasil pendiskusian yang disebar melalui berbagai media yang sudah dimiliki oleh organisasi anggota FPN untuk ditanggapi secara terbuka. Keanggotaan FPN yang terakhir tercatat adalah lebih dari 70 organisasi. Keanggotaan masih bercampur antara ormas dengan LSM dan terbentuk di 24 Propinsi dan 4 Provinsi masih menggunakan aliansi lokal namun materi arahan, tuntutan dan pelaksanaan aksi tetap mengikuti arahan dari FPN nasional.

FPN mampu menggelar aksi berkali-kali dalam rentang waktu yang relatif dekat untuk ukuran pelaksanaan aksi massa yang besar. Meskipun lagi-lagi daya tekan organisasi gerakan belum mampu menandingi kekuatan lawan yang lebih solid meskipun reaksioner, termasuk kekuatan hegemoninya dengan menghalalkan berbagai cara untuk membelokan ataupun menggunakan kekuatan-kekuatan lain.

Hingga hari ini harga BBM sudah tiga kali diturunkan, namun harga kebutuhan pokok rakyat tetap tidak turun seperti saat harga BBM belum dinaikkan. Rakyat pekerja yang merupakan mayoritas penduduk negeri ini yang dikorbankan.

Sementara itu pengkotak-kotakan serikat buruh juga mulai terpecah dari kebuntuan. Gerakan buruh di manufaktur yang dipimpin oleh ABM mulai bertemu dengan serikat-serikat BUMN dalam melawan proyek privatisasi dan penggembosan serikat (union bursting). Dimana dalam tubuh serikat-serikat BUMN intervensi politik dari partai-partai borjuis dan penguasa sangat kental sehingga pembusukan terus terjadi dan akhirnya yang mampu bertahan pada cita-cita perjuangannya mulai menemukan kawan sejati yaitu ABM. Konsolidasi masih terus berjalan hingga hari ini, sejalan dengan seleksi secara alamiah yang kemudian akan meninggalkan yang tidak konsisten dan melahirkan kualitas baru dalam dinamika gerakan.

Penutup

Melihat kondisi rakyat pekerja Indonesia di berbagai sektor hari ini, semakin lama semakin memprihatinkan. Penghisapan dan penindasan juga semakin komplek, sementara negara dikuasai secara penuh oleh antek-antek penjajahan modal atau penjajahan gaya baru. Sangat dibutuhkan kepeloporan dan kesadaran bersama untuk siap memimpin dan dipimpin dalam menggalang persatuan tanpa memandang aksistensi organisasi, warna bendera dll.

Konsolidasi bersama dari semua unsur gerakan baik sektoral maupun multi sektoral harus terus dilakukan dengan cara; *Pertama*, Penajaman konsep-konsep solusi alternatif (konsolidasi gagasan), baik untuk menggodok atau mematangkan solusi jangka panjang (ideologis) maupun solusi jangka pendek. Juga turunan yang merupakan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ada dan mudah dirasakan oleh massa rakyat terkait dengan masalah kesehariannya. Sehingga mudah untuk menghubungkan sebagai program pengorganisir dan penyadaran dalam wadah-wadah gerakan progresif yang ada. Dengan kata lain menyederhanakan dalam bahasa massa.

Kedua, proses transformasi ekonomi politik dalam bentuk pendidikan baik yang secara intensif (berbentuk kelas dan reguler) maupun secara umum (rapat-rapat akbar dan penerbitan bacaan-bacaan) dengan membangun sekolah-sekolah politik sektoral dan multi sektoral untuk mendisiplinkan ranah praktek yang sudah dijalankan dalam bentuk teori guna mempertajam pisau analisa, juga kajian historis gerakan yang sudah putus harus disambungkan kembali. Sekolah-sekolah politik diharuskan mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan gerakan baik kepemimpinan dan ketrampilan-ketrampilan yang diperlukan dalam gerakan kedepan.

Ketiga, langgam kerja berjejaring yang sering berkembang menjadi aliansi atau front, perlu ditata dan diluruskan. Mana

yang front sebenarnya, mana yang aliansi taktis dan mana yang merupakan alternatif sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Hal ini dilakukan agar tidak tumpang tindih dan salah mengerti diantara pelaku gerakan sendiri.

Keempat, gerakan progresif harus mulai berpikir dan membuka dirinya untuk berproses bersama dalam membangun organisasi politik atau partai revolusioner. Perebutan kekuasaan di berbagai levelan harus dimulai dengan catatan bukan inisiatif individu atau godaan oportunisme tetapi melalui kontrol kolektif dan organisasi yang menugaskanya.

Tidak kalah penting, gagasan yang sering kali menjadi jargon juga harus mempersiapkan alat untuk menghadapi momentum krisis kapitalisme yang meluas akan berakibat pada limbungnya “badan dan sistem kapitalisme”. Sementara proyek ilusi demokrasi pemilu 2009 dan dinamikanya diprediksi akan terjadi percepatan perkembangan menuju kegagalan, yang mungkin saja menjadi momentum yang harus dimanfaatkan dengan baik oleh gerakan progresif yakni gerakan buruh, petani, nelayan, miskin kota, adat dan miskin desa yang bila disatukan akan menjadi satu kekuatan politik rakyat pekerja Indonesia.

Merintis Gerakan Kebudayaan Sebagai Jalan Kesengajaan

Oleh: Willy Pramudya¹

Nama apa yang hendak kita berikan kepada tahun 2009 setelah serangkaian peristiwa (dan gejala) yang berseliweran di lorong-lorong ruang dan waktu sepanjang tahun 2008 hanya berujung pada jurang yang sama –dehumanisasi!-- seperti ujung-ujung deretan tahun sebelumnya? Makna apa yang layak kita sematkan pada nama itu agar tercipta sedikit ruang untuk membangun mimpi dan harapan akan hadirnya kehidupan yang lebih baik? Syukur-syukur menjadi tanah yang subur bagi lahirnya perilaku baru dalam masyarakat, yang mampu merintis jalan awal bagi lahirnya peradaban baru? (Bukankah peradaban selalu bertumbuh dan mendapatkan kekuatannya dari mimpi dan harapan untuk mewujudkan apa yang sebelumnya terasa mustahil?) Bagaimana merajut mimpi dan harapan dalam rencana yang dapat diterjemahkan ke dalam barisan gerakan kerja-kerja tersengaja?

1 Penulis adalah Direktur Eksekutif Perkumpulan Seni Indonesia

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang amat berat itu, ada baiknya kita mulai dengan prasangka. Alih-alih menghadirkan kehidupan bersama yang lebih baik, yang mampu meletakkan fondasi bagi terbangunnya gerakan tersengaja sebagai lahan tumbuhnya benih perilaku baru dalam konteks terinisiasinya peradaban baru, hari-hari yang berlari sepanjang 2008 lebih menuntun kita untuk sengaja menyangka bahkan mendakwa rerangkaian peristiwa dan gejala yang berseliweran pada 2008 hanyalah penyempurnaan ketercabikan tubuh dan roh sosio-kultural kita (baca: Rakyat!) oleh syahwat politik yang banal, orgi ekonomi khas rimba, dan masokisme sosial yang telah berlangsung secara masif sejak 1960-an.

Sekujur tubuh dan roh sosio-kultural kita tak hanya sakadar berperan sebagai Sisiphus, manusia setengah dewa yang dihukum Zeus itu, melainkan telah utuh menjadi Sisiphus itu sendiri. Sebab, nyaris tak ada beda antara nasib rakyat dan nasib Sisiphus dalam *Le Myth de Sisyphe* yang harus menjalani hukuman Zeus: mengangkat batu berat ke puncak gunung, dan tiap kali sampai di sana, batu itu akan ditendang dan berguling lagi. Dan Sisiphus harus kembali ke bawah, mengangkatnya lagi. Dalam mitologi Yunani kuno itu, nasib Sisiphus seperti itu tak pernah berakhir. Kini di antara abad yang berlari nyaris semua kisah yang muncul di Indonesia hanya akan menegaskan bahwa dari tahun ke tahun rakyat hanya boleh memanggul kuk yang sama, memikul beban sejarah penistaan yang sama, dan berkubang di jurang yang sama: dehumanisasi.

Hari terakhir 2008 telah tanggal. Sebagian peristiwa dan gejala yang berseliweran telah beringsut pergi, sebagian lain terus berseliweran. Tetapi sebagaimana tahun-tahun yang telah lewat, semuanya selalu segera lenyap dari ingatan. Dalam jurang dehumanisasi yang sama sebagian dari kita hanya melakukan perlawanan yang berbau masturbasi, berpura-pura mencatat

semuanya, sambil merayakan orgi masokisme dan amnesia. Di jurang yang sama kita mempersembahkan kembali tubuh dan roh Sisipus kita dan kepingan ruang politik dan ruang-ruang ekosob kepada para raja rimba dan dewa kembar bernama ketakberdayaan dan kenaifan. Kita memandang kepergian tahun 2008 dengan selimut amnesia sambil berlagak mampu "merumuskan" semua peristiwa dan gejala dalam ritual kaum terluka. Padahal fakta telanjangnya adalah 100 juta jiwa lebih manusia hidup dalam kemiskinan dan ambang miskin (sebagaimana dicatat dalam bingkai statistik yang indah oleh Bank Dunia)? Mereka hidup di bawah garis kemiskinan standar internasional, dua dolar AS per hari. Nama apa yang layak kita sapakan bagi tahun 2009 ketika di depan hidung kita 13 juta anak hidup bersanding bangkai --kelaparan!-- sebagaimana diperkirakan oleh World Food Programme (WFP)?

Bilangan hidup itu semakin lengkap oleh nihilnya akses ke pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan dan gizi yang cukup sehingga di tengah abad yang berlari 25 juta orang menderita buta huruf, 50 juta orang menderita gangguan kesehatan, dan 50 juta lainnya tak punya akses ke fasilitas kesehatan. Sementara jutaan lagi hidup dalam kenihilan infrastruktur dasar yang memadai: penyediaan air bersih, sanitasi, transportasi, jalan raya dan listrik. Dalam waktu yang sama persepsi bias terhadap perempuan terus berlangsung di tengah konflik sosial (dan agama?) yang menghancurkan ruang sosial dan daya hidupnya yang ditingkahi oleh bencana alam yang menubi sehingga jutaan penduduk terjerumus ke jurang kemiskinan.

Jadi nama apa yang kita sulamkan pada sampul depan tahun 2009 ketika paparan kajian tengah tahunan INDEF (2008) memprediksikan jumlah penduduk miskin pada 2009 akan mengalami peningkatan? Melalui sungai inflasi yang meningkat, daya beli masyarakat terpukul sementara turbulensi ekonomi

global serta-merta akan menaikkan jumlah penduduk miskin hingga 1,3 persen. Tanpa mengabaikan perbedaan jumlah orang miskin yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik, ada yang menyebut kondisi masyarakat Indonesia saat ini sebagai “yang terburuk dalam 36 tahun terakhir” yang bila tak segera diatasi akan menjadi masalah besar (Bomer Pasaribu, 2008). Sebab melonjaknya angka kemiskinan akan senantiasa membengkakkan angka pengangguran yang bila ditotal dengan seluruh jenis pengangguran diperkirakan akan mencapai lebih dari 40 juta orang.

Alih-alih kabar gembira yang datang, dalam ruang rupa politik dan ekosob seperti itu kita dicoloki hasil survei tentang Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang dilakukan Transparency International Indonesia (TII) pada September sampai dengan Desember 2008, yang menegaskan bahwa secara umum sebagian besar aparatus negara di tingkat kota di Indonesia dipersepsikan korup. Dari 50 kota yang disurvei hanya Yogyakarta yang pemerintah daerahnya mendapatkan skor 6,43 (tertinggi) dan Palangkaraya (6,1) (peringkat berikutnya). Lainnya berada di bawah angka 6,0. Kupang sebuah negeri di wilayah yang terkategori miskin mendapatkan skor terendah (2,97), disusul Tegal (3,32), Manokwari (3,39), Kendari (3,43), dan Purwokerto (3,54). Kupang sukses memperoleh skor terendah karena pada tahun-tahun sebelumnya di kota ini banyak terjadi kasus korupsi yang melibatkan pejabat dan anggota DPRD. Namun skor yang diperoleh dari hasil penilaian para pelaku bisnis terhadap pemerintah daerah dan keseriusannya memberantas korupsi itu, skor IPK Indonesia memang masih lebih baik dibanding Indeks Persepsi Korupsi untuk Indonesia pada 2008 dengan perolehan skor 2,6.

Hasil survei TII yang diumumkan pada 21 Januari 2009 itu juga mengukur tingkat kecenderungan terjadinya suap di 15 institusi publik di Indonesia, yang “mengantarkan” Kepolisian

menjadi lembaga terkorup dalam persepsi kalangan bisnis. Secara berturut-turut lembaga yang rawan praktik suap berdasarkan penelitian TII adalah Polisi (48 persen), bea cukai (41), Kantor Imigrasi (34), DLLAJR (33), Pemda Kota/Kabupaten (33), Badan Pertanahan Nasional (32), Pelindo (30), Pengadilan (30), Depkum HAM (21), Angkasa Pura (21), Pajak Daerah (17), dan MUI (10).

Pemandangan yang tercipta dari hasil survei TII terakhir itu agaknya hanya memerlukan pemantapan nama yang tepat atas survei-survei TII sebelumnya. Apalagi media massa dan berbagai lembaga yang peduli atas nasib rakyat semakin mendapatkan hasil verifikasi atas fakta tentang begitu lancungunya elit negara. Setidaknya banyaknya anggota DPR dan pejabat publik berbaris memasuki ruang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; aksi bolos para anggota DPR dari rapat-rapat --yang menentukan nasib ratusan juta manusia yang hanya menginginkan hal yang sederhana: kehidupan yang lebih baik-- yang menjadi kewajiban mereka; serta pelayanan publik yang buruk adalah gunung es yang memangkil-manggil untuk diselami agar kita mampu mengukur betapa tak ada lagi hiburan berupa sekadar mimpi dan harapan kecil dari kinerja para hulu balang negeri ini di semua sektor.

Di tengah pemandangan seperti itu boleh jadi orang menjadi tidak terkejut saat Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak menyodorkan catatan tentang jumlah kekerasan terhadap anak mengalami kenaikan sebesar 50 persen (menjadi 6.184 kasus). Kekerasan anak itu didominasi oleh kekerasan psikologis, baik di rumah maupun di luar rumah, terutama di sekolah. Sementara hampir 27 juta atau 26.901.624 anak mengalami pelanggaran hak-haknya. Komisi ini juga mencatat bahwa pola pendidikan formal, termasuk kurikulum yang tidak ramah, telah mengakibatkan anak-anak mengalami tekanan kejiwaan, tegang dan stres. Jumlah anak yang mengalami putus sekolah akibat kurikulum yang tidak ramah itu mencapai 24 jutaan. Banyak pula anak yang mengalami

pelanggaran hak-hak anak, terutama hak-hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan akibat buruknya kinerja aparatus negara. Jumlah mereka mencapai lebih dari dua juta. Hak-hak yang tidak dipenuhi itu meliputi penanganan HIV/AIDS, flu burung, diare, polio, gizi buruk, demam berdarah, dan campak.

Orang juga tidak akan tersentak oleh kabar mengesankan dari Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak yang mencatat bahwa 150.000 anak menjadi korban eksploitasi seksual komersial. Kota Batam, Bali, Jakarta, Surabaya, Medan, Yogyakarta, Semarang dan Solo menjadi terminal bagi aksi kejahatan eksploitatif ini. Kejahatan ini sangat terorganisasi. Jaringan pelacuran anak di kalangan siswi sekolah memiliki database dan daftar nomor telepon pekerja seksual anak. Anak-anak Indonesia juga dikepung oleh 100.000 situs porno lokal dan bersama sebayanya di seluruh dunia dikepung 4.200.000 situs porno dunia di internet. Setiap saat mereka, harapan kita di masa depan, juga disergap oleh bisnis hitam dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, konflik dan krisis sosial dan krisis ekonomi yang kembali meremukkan ruang-ruang ekosob yang telah berkeping-keping. Ditambah jumlah kaum perempuan yang mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik, mental/psikologis, sosial, dan kultural semakin menyempurnakan ketercabikan kita.

Dalam keporak-porandaan ruang politik dan ekosob seperti itu kita hanya menyaksikan kesibukan (para hulu balang) pemerintah memperagakan jurus-jurus silat perekonomian ke penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi para investor besar dan global melalui investasi langsung agar investasi besar-besaran oleh perusahaan raksasa mengurangi orang miskin melalui penyerapan jumlah besar penganggur. Sementara pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) -- yang justru terbukti mampu tampil sebagai penyelamat sekaligus pilar perekonomian

Indonesia ketika krisis panjang menerpa sejak 1997-- hanya dipahami secara sempit sebagai urusan kredit modal. Kutak-kutik kebijakan pun difokuskan pada fungsi intermediasi bank dan bank yang dimaksud adalah perbankan modern sebagai bagian dari model ekonomi yang tercerabut (disembedded) dari kesejatiannya bagi kehidupan bersama. (Lihat B Herry Priyono: “Ekonomi yang Tercerabut”, *Kompas* Rabu, 15 Oct 2008). Sejatinya dalam keporak-porandaan bidang yang paling sederhana seperti ketika masyarakat menjadi korban banjir sekalipun negara tidak hadir di sana, apalagi keporakporandaan yang mereduksi kemanusiaan.

Sebagai bagian dari kumpulan Sisiphus yang sedikit lebih beruntung agaknya kita perlu tak malu menjadi sedikit ambigu seperti sikap Albert Camus dalam esainya tentang Sisiphus. Dalam pembacaan Gunawan Muhammad atas tafsir Camus, kian lama kian tumbuh semacam simbiosis dalam diri Sisiphus dengan batu yang diangkutnya. Pada tokoh itu tampak sebuah wajah yang, seraya bekerja keras dan begitu dekat dengan batu, telah mengeraskan diri dan dunianya. Dari keadaan terkutuk dan dipenjara, akhirnya ia mengubah posisinya secara radikal. Kini nasibnya adalah miliknya. Ia lebih kuat ketimbang batu karang.

Gunawan melanjutkan: sebuah sikap yang gagah, tentu—yang dengan itu juga menunjukkan perlawanan terhadap Zeus. Sisiphus balik menista, dengan menganggap hukuman itu tak relevan. Sejak saat itu, alam semesta tak punya lagi yang dipertuan. Camus membuat kesimpulan yang termasyhur, bahwa kita harus bisa membayangkan Sisiphus ”bahagia”. Ketika Camus menuliskan esainya pada awal tahun 1940-an, ia bertolak dari asumsi yang lazim pada zamannya: siapa saja akan melihat hukuman atas Sisiphus sesuatu yang tak bisa diterima dalam tatanan manusia, dan perlawanannya dengan demikian amat dahsyat.

Bercermin pada tafsir dan kesimpulan Camus, bisakah kita membayangkan bahwa tubuh dan roh kita juga bisa mengeraskan diri? Bisakah kita mengubah keras dan beratnya batu kuk yang sama, penistaan yang sama, dan jurang sama, dehumanisasi, menjadi batu perlawanan yang sama? Bisakah kita merebut tubuh dan roh sosiokulturalnya menjadi batu karang yang teguh, menjadi tuan bagi diri sendiri tanpa harus membangun penistaan balik? Bisakah kita membayangkan hadirnya sebuah gerakan perlawanan yang tersengaja lewat rajutan rencana membangun rumah besar yang bisa menjadi tempat untuk menyandarkan tubuh dan roh 240 juta manusia dengan segala keunikan individu dan kelompok yang ada, yang telah dicoba untuk diberi nama Republik Indonesia melalui proses humanisasi?

Kita perlu mengawalinya dengan membuat prakiraan atas pementasan sandiwara terkini yang tengah dan akan berlangsung: panggung kontes pemilihan umum (pemilu 2009 yang proses resminya telah diawali pada 2008. Apa yang bisa kita prakirakan? Untuk menjawabnya kita perlu mendakwa pemilu-pemilu sebelumnya baik proses maupun terutama, hasilnya. Sangat terasa bahwa Pemilu 1999 dan 2004 hanya menghasilkan hulu balang negara yang tak becus untuk sekadar mengatasi bidang sektoral yang spesifik sekalipun. Apa yang bisa kita harapkan kepada mereka untuk tugas pengelolaan dan pengatasan atas tuntutan menjadi Republik yang sesungguhnya? Padahal sejak 1998 para elit ini, juga semua awak perahu Republik memiliki kesempatan untuk melakukan banyak perubahan. Tetapi alih-alih muncul hasil berupa pemandangan bahwa rakyat telah menjadi tuan (bagi dirinya sendiri), yang terlihat hanya segelintir Zeus yang membuat jumlah manusia Sisiphus yang terus memanggul kuk yang sama di jurang dehumanisasi yang sama semakin membengkak. Indonesia pun lalu hanya menjadi sebuah nama bagi kerumunan peristiwa dan gejala sebagaimana Herry Priyono mendakwa. Indonesia

hanyalah hasil sampingan dari kerumunan tindakan individual atau sektoral yang mereka lakukan. Para pelakon yang tampil adalah barisan hulu balang yang teramat produktif melahirkan daftar kesesatan cara berpikir yang diduga tumbuh dari kultur kaum inlander yang tertindas.

Di atas panggung kontes, nyaris tidak ada Sri Panggung yang enak ditonton. Boleh jadi nihilnya pengalaman yang bercampur bebal agak sukar menafsir peran yang harus mereka bawaan: "... membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Boleh jadi. Lalu siapakah "kambing hitam"-nya?

Tentu serta-merta kita akan menyuarakan hapalan bahwa sang "kambing hitam" adalah negara dan dunia korporasi, yang berbaku selingkuh. Kalau benar demikian yang terjadi, apakah mimpi akan hadirnya perlawanan massa tubuh dan roh Sisiphus demi terciptanya kehidupan dan tata kelola kehidupan sebagai bangsa yang hendak mencoba merepublik adalah mimpi di atas mimpi?

Mungkin kita memerlukan persiapan dan nafas panjang untuk mampu menghadirkan mimpi yang dapat dirajut menjadi rencana dan mudah diterjemahkan menjadi gerakan tersengaja melalui barisan yang tersengaja pula lalu menerjemahkannya menjadi kerja-kerja yang strategis, yang mampu melahirkan komunitas-komunitas tempat lahirnya benih-benih pelakon yang memiliki kedalaman, keluasan, dan kepekaan wawasan. Kita bermimpi menonton aksi Sri Panggung yang mampu menafsir dialog secara cerdas dan membawakan watak dalam naskah yang teramat berat itu, amanat Pembukaan UUD 1945, amanat sesungguhnya

Republik. Mereka tak boleh berubah menjadi denawa yang telah melahirkan tragedi mengerikan ala Orde Baru atau para cakil yang melahirkan adegan murahan ala Orde Reformasi.

Naskah lakon Republik adalah naskah yang mewajibkan secara mutlak para pelakonna memahami betul bahwa perangkat utama kepemimpinan Republik seperti ditulis Herry Priyono adalah kebijakan publik, yang substansinya menyangkut jatuh-bangun kelangsungan Indonesia yang diimpikan. Para pelakon harus terlihat siap menjalani peran wajib kepemimpinan Republik yang mampu membentuk Indonesia bukan lagi sekadar kerumunan melainkan bangsa, yang memiliki cita-cita tentang tata hidup-bersama, sekaligus mampu mengelola kebutuhan setiap anggotanya dan mampu mengelola tegangan tak henti antara individualitas dan sosialitas. Tanpa kemampuan membawakan peran itu dalam wajut lahirnya kebijakan publik sebagai perangkat utama menjalankan kepemimpinan, maka hidup bersama kita hanyalah kebersamaan palsu yang akan meletakkan rakyat hanya sebagai Sisiphus. Apalagi dalam persilangan adegan dan dialog di panggung Republik juga beroperasi kekuasaan para denawa yang dalam bahasa Herry Priyono bisa berupa preman, cukong, militer, makelar, spekulan, fundamentalis, aktivis, akademisi, politisi, media, pelagak, pengusaha, konglomerat, tuan keuangan global, kawanan massa, dan seterusnya. Masing-masing atau beberapa kombinasinya bersikeras membawa Republik ke arah kepentingan sendiri. Begitu cerdik cara sosok-sosok itu beroperasi sehingga pemimpin Republik dengan mudah tersandera dalam kelompokan. Pertanyaannya, dari mana kita peroleh pelakon seunggul itu, terutama di tengah kepingan ruang politik dan ekosob seperti saat ini?

Berlajar dari pengalaman empirik bangsa-bangsa yang anggotanya telah menjadi Sisiphus baru yang berdaulat, pelakon yang memahami publik itu dihasilkan dari perjuangan yang

panjang. Jalan yang ditempuh pun panjang dan berliku dan acap kali hanya menghadiahi kesunyian bagi para pelakunya. Tetapi ia harus ditempuh tanpa jeda.

Menuju Gerakan Kebudayaan

Bagi kami yang berhimpun dalam Perkumpulan Seni Indonesia (PSI) jalan panjang dan berliku yang kami tempuh adalah gerakan kebudayaan. Sebab ketika kami memandang, Indonesia tidak memiliki suatu strategi bagi penguatan rakyat yang bersifat komprehensif dalam merespon persoalan-persoalan politik dan ekosob yang dihadapi masyarakat. Situasi yang terjadi kemudian hancurnya keadaban publik disertai pecahnya ruang politik dan ruang-ruang ekosob karena berbagai konflik dan krisis dalam kehidupan bersama tidak pernah terkelola secara sengaja dan dicabut dari akarnya yang terkuat, kearifan sosial dan budaya lokal.

Nihilnya strategi kebudayaan melahirkan kebijakan pembangunan hulu balang dan elit negara yang kerap tersandera oleh para denawa dan cakil berwujut preman, cukong, militer, makelar, spekulan, fundamentalis, aktivis, akademisi, politisi, media, pelagak, pengusaha, konglomerat, tuan keuangan global, kawanan massa, dan seterusnya sehingga menganaktirikan sektor humaniora dan melahirkan dehumanisasi. Dan karenanya kebijakan yang muncul bukanlah kebijakan (pro) publik melainkan kebijakan yang pro para denawa tak berwajah pemilik kapital yang lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dengan indikator-indikator capaian sesuai keinginan mereka. Kemanusiaan dinilai dengan angka. Republik telah dijauhkan dari makna sejatinya. Pembangunan melahirkan krisis ekonomi yang dengan cepat menjadi krisis multidimensi tak kuinjung usai.

Dalam pandangan PSI penyebab kegagalan untuk membenahi kehidupan politik, ekosob dan masyarakat yang tereduksi kemanusiaannya ialah pembangunan yang mengabaikan pendekatan kebudayaan. Dengan watak yang sangat eksploitatif pembangunan berubah menjadi penghancuran sumberdaya alam yang dibarengi perampasan hak-hak adat (ulayat) lewat tindakan represif dan pelanggaran hak-hak dasar masyarakat serta penghancuran entitas kearifan lokal yang selama ratusan tahun mampu menjaga keseimbangan kehidupan sosial dengan pelestarian alam. Ujungnya adalah tsunami ekosob dan dehumanisasi. Pembangunanisme telah mengikis kemanusiaan hingga titik terendah dan mengakibatkan krisis kebudayaan secara menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan. Nihilnya nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan sosial dalam kehidupan bersama itu telah melahirkan generasi muda yang teralienasi tanpa semangat, tanpa nilai-nilai, tanpa karakter.

Bagi PSI harapan untuk membangun peradaban baru harus dimulai dengan melahirkan kembali generasi baru sejak tingkat sekolah menengah. Kerja-kerja PSI akan ditujukan ke arah pewujutan sebuah masyarakat yang demokratis dan menghormati HAM; masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi, keterbukaan, kesetaraan, dan keberagaman.

Tujuan yang lebih jauh ialah terwujudnya sebuah gerakan kebudayaan yang efektif, terkelola dengan sengaja dan berkelanjutan bagi lahirnya sikap dan peradaban baru yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh sebab itu untuk beberapa tahun ke depan PSI akan memilih kerja-kerja penelitian dan pendidikan untuk memperkuat gerakan kebudayaan yang berkelanjutan; kampanye untuk tersebar dan tertanamnya nilai-nilai demokratis dan penghormatan terhadap HAM serta kerja-kerja pengelolaan, pengembangan, dan pengaktifan gerakan kebudayaan.

Meyakini gerakan kebudayaan di berbagai belahan dunia, yang secara empiris membuktikan berkali-kali lebih berhasil menjawab berbagai masalah yang timbul, maka gerakan kebudayaan yang diasumsikan sebagai gerakan yang dibangun di atas konsep dan pemikiran mendasar yang komprehensif harus didahului kegiatan riset, studi, analisis dan pemaknaan, yang melibatkan lintas disiplin. PSI juga menilai penting pelibatan masyarakat melalui proses pembelajaran bersama yang didahului kegiatan penelitian, pengkajian dan pemaknaan; pelatihan (menulis, meneliti, mengapresiasi), produksi (karya-karya audio visual seperti TV dan film; sastra, rupa, multimedia); kampanye atau pendidikan publik (lewat pertunjukan, pemutaran film, pameran dan festival).

Kerja-kerja tersengaja itu akan ditempuh melalui proses kelahiran kesadaran untuk membangun sikap dan perilaku baru dalam hidup sehari-hari seperti untuk bersedia antre, tidak mencontek, solider, toleran terhadap yang lemah; tidak main terabas; dan berbagai perilaku sosial yang arif dengan melibatkan partisipasi masyarakat. PSI menyadari bahwa partisipasi masyarakat akan muncul jika ada inisiatif dari berbagai pihak, mendapat dukungan yang luas dan ada gerakan yang konsisten.

Dari tiga aras program itu PSI akan melakukan kegiatan-kegiatannya pada beberapa tahun ke depan sejak 2009 penelitian tentang tingkat pemahaman siswa sekolah menengah tentang HAM khususnya hak-hak ekosob; pendidikan dan pelatihan dasar hak-hak ekosob sesuai hasil penelitian berupa pelatihan *creative writing* untuk siswa sekolah menengah. Kelanjutannya adalah penyelenggaraan diskusi rutin tematik bulanan tentang hak-hak ekosob untuk mewujudkan tradisi berdiskusi dan berdialektika di kalangan remaja dan pelajar sekolah menengah dan lomba penulisan untuk menampung karya-karya tulis hasil pelatihan *creative writing*. Untuk menunjang berbagai kegiatan itu akan dikembangkan sebuah perpustakaan dan pusat dokumentasi gerakan kebudayaan.

Untuk kerja kampanye, PSI akan memfokuskan diri pada kegiatan produksi seni budaya, berupa pementasan teater dan monolog, penerbitan karya sastra khususnya yang bermuatan nilai-nilai demokratisasi dan penghormatan HAM, pameran foto dan seni rupa, produksi film dokumenter dan feature, serta penerbitan newsletter tiga bulanan.

Sementara program penguatan kelembagaan akan diarahkan pada upaya membangun PSI menjadi sebuah lembaga yang dapat mengelola gerakan kebudayaan secara efektif dan berkesinambungan lewat kerja-kerja gerakan kebudayaan serta fasilitasi dan pengembangan jaringan kerja.

Jadi jelas, gerakan ini hanya merupakan bagian kecil dari gerakan tersengaja yang lebih besar yang berupaya mengolah ruang politik dan ekosob yang terkeping-keping menjadi ruang yang layak untuk membangun mimpi dan harapan akan hadirnya kehidupan (bersama) yang lebih baik. Syukur-syukur ia menjadi tanah yang subur bagi lahirnya perilaku baru dalam masyarakat, yang mampu merintis jalan awal bagi lahirnya peradaban baru.

Partai Perserikatan Rakyat dan Momentum Pemilu 2009

Heru Wardoyo¹

Paska reformasi politik 1998 sebagian besar pengamat memandang perjalanan demokrasi di Indonesia telah berkembang dengan baik dan relatif stabil. Penyelenggaraan Pemilu dua kali 1999 dan 2004 berjalan cukup demokratis. Walaupun pada periode Abdurrahman Wahid sempat terjadi gejolak politik yang berujung pada pelengseran Gus Dur dari kursi kepresidenan, namun suksesi tersebut tidak sampai menimbulkan kekacauan politik yang meluas.

Perkembangan demokrasi di Indonesia bukan berarti tanpa kritik dari berbagai pihak. Salah satu kritik utama adalah semakin menguatnya kecenderungan demokrasi prosedural dan munculnya fenomena politik oligarki yang dijalankan partai-partai politik mapan. Ditambah lagi dengan buruknya perilaku para elit politik

1 Penulis adalah Tim Litbang Partai Perserikatan Rakyat (PPR)

dan partai-partai politik yang semakin membuat rakyat frustrasi dan apatis dalam menghadapi situasi politik ke depan.

Krisis ekonomi yang diperburuk krisis energi dan berakibat kenaikan BBM serta krisis pangan semakin melemahkan posisi tawar rakyat terhadap kekuatan-kekuatan politik dan negara. Akibatnya banyak rakyat sekarang ini mempertanyakan secara kritis manfaat reformasi politik dan demokrasi paska rejim Suharto. Gejala yang paling jelas dilihat adalah semakin besarnya jumlah Golput di berbagai Pilkada yang mengalahkan perolehan suara para kandidat. Hal ini menunjukkan ketidakpercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi, Pemilu dan partai politik semakin meluas. Bukan tidak mungkin pengalaman di Pakistan dan Thailand serta beberapa negara lainnya terulang di Indonesia di mana kekuatan militer kembali mengambil kekuasaan karena krisis politik dan lemahnya kepemimpinan politik sipil.

Gerakan Politik Moral

Kekeliruan terbesar dari gerakan sosial ketika menghadapi situasi paska 1998 adalah ketidaksiapannya dalam memasuki agenda reformasi dan konsolidasi politik untuk menghadapi Pemilu 1999. Hampir sebagian besar elemen gerakan masyarakat sipil tidak memiliki agenda politik bersama ketika memasuki arena politik kekuasaan. Akibatnya ruang politik kekuasaan banyak diisi kelompok-kelompok kepentingan yang bukan menjadi motor utama gerakan reformasi. Tampilnya tokoh-tokoh reformasi seperti Gus Dur, Megawati, Amin Rais, dan Sultan HB X adalah tokoh-tokoh yang didesak dan dipaksa untuk tampil memimpin reformasi oleh mahasiswa. Mereka adalah bukan kekuatan oposisi yang berhadapan secara langsung dengan rezim Orde Baru.

Walaupun situasi politik telah banyak berubah sejak reformasi yang ditandai semakin berkembangnya ruang demokrasi

terutama diberlakukannya sistem multi partai sederhana yang memungkinkan semua kelompok kepentingan dapat mendirikan partai politik, namun sebagian besar kelompok-kelompok pro demokrasi dan gerakan sosial masih memandang dan menempatkan posisinya sebagai “gerakan moral”. Para aktivis pro demokrasi masih memandang negara dan politik kekuasaan bukan menjadi arena perjuangan gerakan masyarakat sipil. Kalaupun ada yang masuk ke partai dan legislatif lebih merupakan agenda individu dari pada agenda organisasi.

Pandangan dan sikap semacam ini merupakan warisan lama yang telah berakar kuat di kalangan gerakan mahasiswa, buruh, petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, dan Ornop/LSM. Gerakan kritis terhadap rezim Orde Baru kemudian berkembang menjadi gerakan anti politik dan anti negara dengan gagasannya tentang “stateless society”. Tambahan lagi sejak 1965 wacana tentang politik atau kepartaian sangat dibatasi dan “*black campaign*” rezim Orde Baru tentang bahaya politik di luar negara sangat efektif menciptakan trauma politik di kalangan masyarakat bawah. Dengan demikian selama 30 tahun lebih telah terjadi kekosongan tradisi politik rakyat yang sebelumnya sangat dinamis dan demokratis.

Hilangnya warisan tradisi politik rakyat yang pernah berkembang inilah yang kemudian menyulitkan kehadiran partai-partai politik alternatif pada saat menjelang dan sesudah keruntuhan rejim Suharto seperti Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) kurang mendapat dukungan luas di masyarakat. Sebagian besar rakyat memandang partai-partai tersebut sebagai anomali politik. Kenyataan ini dapat ditunjukkan hasil Pemilu 1999 tidak satupun partai politik yang didirikan aktivis gerakan rakyat mendapatkan kursi di legislatif daerah maupun nasional, bahkan mereka tidak lolos dalam “*electoral threshold*”, dan Pemilu 2004 mereka tidak lagi ikut dalam pertarungan politik.

Kegagalan eksperimen aktivis gerakan rakyat/sosial dalam memasuki arena politik formal melalui partai telah mengembalikan gerakan ini ke gelanggang gerakan ekstra parlementer dan bersandar pada gerakan moral seperti masa Orde Baru sehingga gerakan pro demokrasi (gerakan rakyat/sosial) sebenarnya tidak mengalami transformasi politik yang lebih maju sampai sekarang.

Problem Kepartaian di Indonesia

Ketidakpercayaan gerakan sosial dan masyarakat pada umumnya terhadap partai politik sesungguhnya lebih disebabkan oleh buruknya sistem kepartaian di Indonesia. Sejak reformasi jumlah partai di Indonesia meningkat pesat sebagai dampak ditetapkannya sistem multi partai sederhana. Dari tahun 1999 hingga 2008, jumlah partai di Indonesia terlihat banyak namun terfragmentasi. Bila dilihat secara umum hampir tidak ada perbedaan secara jelas baik dari segi ideologi maupun platform politiknya meskipun memiliki basis tradisional yang berbeda-beda seperti nasionalis dan agama.

Hampir semua partai berbicara isu yang sama seperti peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan lapangan kerja, pendidikan dan kesehatan yang murah tanpa ada pilihan strategi yang jelas bagaimana semua janji tersebut akan dicapai. Pada situasi tertentu partai-partai menyuarakan isu populis tetapi pada saat lainnya mereka mendukung agenda neo liberalisme dan konservatisme. Terkesan bahwa semua partai ingin terlihat baik di mata masyarakat.

Kebutuhan akan kejelasan ideologi dan platform partai sangat penting bagi perkembangan partai dan masyarakat demokrasi. Suatu ilusi bila partai ingin merangkul semua golongan dan lapisan sosial dalam masyarakat karena pandangan tersebut

bertentangan dengan pengertian partai itu sendiri yaitu “Parts” yang berarti bagian dari keseluruhan. Trauma karena perbedaan ideologi dalam dinamika politik sebagaimana yang terjadi pada periode 1950-an sudah harus ditanggalkan. Partai politik perlu merefleksikan apakah peran dan fungsinya selama ini hanya untuk semata-mata berkompetisi meraih suara dan melupakan peranan lainnya dalam pendidikan politik dan menjadi katalisator kepentingan konstituenya.

Ada banyak sebab yang dapat menjelaskan mengapa terjadi kemerosotan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Di antaranya adalah kemerosotan perilaku partai politik yang semakin mengecewakan masyarakat karena janji-janjinya selama kampanye tidak dilaksanakan ketika mereka terpilih. Peran media massa sangat berpengaruh dalam membentuk opini masyarakat dengan memuat atau menayangkan berbagai berita keburukan perilaku para elit partai dalam kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan maupun kesusilaan.

Di luar penjelasan tersebut sebenarnya selama tiga dasawarsa ini telah terjadi pergeseran bentuk dan orientasi partai politik dari bentuk “partai massa” ke “*catch all party*”. Partai politik sendiri sesungguhnya telah mengalami evolusi dari sejarah awal kelahirannya sampai abad 21 sehingga ada banyak tipe partai yang berkembang sampai saat ini yang kemudian diklasifikasikan ke dalam tipologi sebagai partai elit, partai massa, partai berbasis etnis, partai elektoral dan fenomena yang muncul terkahir ini adalah partai gerakan yang diwakili oleh Partai Hijau.

Di banyak negara-negara demokrasi baru arus utama bentuk partai lebih mengarah kepada tipe “*catch all party*” yang berorientasi semata-mata pada kepentingan elektoral. Pendefinisian peran dan fungsi partai disederhanakan hanya menempatkan wakil-wakilnya dalam lembaga legislatif melalui

kompetisi dalam Pemilu. Sehingga gegap gempita partai hanya terlihat ketika menjelang dan saat Pemilu. Peralihan dari partai massa ke “*catch all party*” menunjukkan partai semakin tidak lagi merepresentasikan kelompok-kelompok sosial tertentu namun ingin merangkul semua warga negara dalam rangka memperbesar perolehan suara ketika Pemilu.

Dalam relasi antara partai dengan konstituen, partai massa dalam sejarahnya memiliki hubungan yang cukup kuat dengan organisasi-organisasi sosial yang menjadi basis dukungannya, seperti serikat buruh, petani atau kelompok sosial lainnya. Hubungan tersebut memiliki tradisi yang panjang dan bersifat ideologis. Sebaliknya “*catch all party*” walaupun memiliki basis konstituen yang tetap namun lebih menekankan mobilisasi suara secara terbuka melalui kampanye media. Wacana kepartaian sejak reformasi sampai sekarang lebih banyak didominasi model “*catch all party*” ini. Pemahaman semacam inilah yang kemudian menimbulkan pencitraan bahwa partai politik hanya menjadi bagian dari pesta demokrasi dan diisi oleh kelompok elit berduit.

Seharusnya bagi gerakan pro demokrasi atau gerakan sosial tidak selalu memandang hanya ada model tunggal dalam partai. Partai sendiri selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Kasus Indonesia sejak Orde Baru hingga Orde Reformasi belum ada partai politik yang merepresentasikan kelas-kelas sosial seperti buruh dan petani yang cukup berakar. Ketiadaan ini lebih dikarenakan faktor-faktor sebagaimana yang disebutkan di atas yakni trauma politik di kalangan rakyat dan masih dibatasinya pendirian partai berbasis ideologi kelas. Tampaknya masih perlu waktu panjang untuk meyakini rakyat agar dapat membangun kekuatan politiknya sendiri untuk masuk dalam arena kekuasaan. Keyakinan tersebut harus dibangun melalui pendidikan politik dan pengorganisasian.

Pembangunan PPR Berbasis Gerakan Rakyat

Partai Perserikatan Rakyat (PPR) berdiri pada 16 Agustus 2005 sejatinya pendiriannya adalah berdasarkan mandat dari sejumlah organisasi rakyat sektoral seperti Organisasi Tani, Serikat Nelayan, Serikat Perempuan, Asosiasi Guru Swasta, Serikat Buruh Perkebunan dan sejumlah organisasi kemahasiswaan serta jaringan jaringan LSM/Ornop. Berbagai organisasi rakyat tersebut bervariasi basis level strukturnya. Ada yang level nasional, regional, propinsi dan ada juga yang masih level kabupaten.

Salah satu hasil keputusan Pertemuan Nasional PPR pada 18 Agustus 2005 di Bandung adalah PPR akan mempersiapkan diri untuk menjadi peserta Pemilu pada momentum Pemilu 2009 sebagai salah satu tujuan jangka pendek dan sekaligus sebagai uji coba.

Sebagai konsekwensi keputusan tersebut sudah barang tentu PPR dengan segenap keanggotaannya (*notabene* adalah aktifis organisasi organisasi rakyat dan aktifis LSM/Ornop) ‘bekerja keras’ mempersiapkan diri untuk menjadi peserta Pemilu pada momentum Pemilu 2009. Pada Februari 2008 lalu PPR telah mendaftarkan ke Departemen Hukum dan HAM guna mengikuti proses verifikasi tahap awal oleh Depkumham.

Bekerja keras sebenarnya bukanlah barang baru bagi kita kalangan aktifis gerakan rakyat maupun LSM/Ornop, namun istilah ‘bekerja keras’ yang kami maksudkan diatas adalah bekerja keras dibawah syarat syarat Undang Undang Pemilu. Sebagaimana syarat syarat formal dalam sistem politik UU Pemilu no 32 tahun 2002 yakni syarat syarat yang harus dipenuhi adalah **kelengkapan struktur pengurus** tingkat nasional, pengurus tingkat propinsi (2/3 dari jumlah propinsi), pengurus tingkat kabupaten/kota (50% jumlah kabupaten/kota di suatu propinsi), pengurus tingkat

kecamatan (25% jumlah kecamatan di suatu kabupaten/kota). Kemudian **izin domisili** kantor atau sekretariat partai di semua tingkatan yang harus dikeluarkan oleh kantor Kesbang Linmas masing masing tingkatan tersebut.

Dalam pemenuhan syarat syarat administratif ini memang tidaklah dibutuhkan kecerdasan yang sangat istimewa namun yang sangat dibutuhkan adalah kesabaran dan ketekunan dari seluruh para kader PPR yang mayoritas latar belakangnya adalah aktifis gerakan rakyat/sosial. Kami pun sangat memahami betapa beratnya melakukan kerja kerja seperti ini mengingat nyaris tidak terbiasanya aktifis gerakan rakyat melakukan kerja kerja administratif formal. Ditambah lagi dengan kondisi logistik finansial yang sangat tidak memadai. *Pengalaman salah seorang pengurus PPR tingkat Kabupaten di Sumut, terpaksa harus mengutang kepada salah seorang petugas Kesbang Linmas ketika akan mengurus izin domisil. Hal yang mustahil terjadi di partai partai lain yang lebih memiliki logistic dan keuangan memadai.*

PPR gagal memasuki tahap kedua dari proses verifikasi yakni verifikasi factual oleh KPU. Sebagai catatan bahwa sampai detik ini PPR tidak pernah diinformasikan oleh Depkumham apa penyebab kegagalan verifikasi tersebut.

Paska verifikasi faktual, PPR mengeluarkan keputusan politik terhadap seluruh jajarannya bahwa PPR tetap tidak melanjutkan merjer terhadap partai politik lain dalam Pemilu 2009 mendatang. PPR tetap melanjutkan agenda politik berikutnya yaitu terus mempersiapkan diri menjadi partai peserta Pemilu pada 2014. Adapun para kader PPR yang ingin maju dalam pemilu 2009 baik sebagai calon DPD RI maupun sebagai calon legislatif daerah atau pusat melalui partai politik lain adalah tanggung jawab dari organisasi rakyat maupun individu masing masing. Meski hampir 300an kader dari berbagai organisasi

rakyat (*notabene* anggota PPR) memutuskan maju bertarung dalam pemilu 2009 sebagai calon DPD dan DPRD/DPR RI yang tersebar di 22 propinsi melalui 17 partai politik peserta pemilu, PPR tetap memonitoring perkembangan dari seluruh organisasi organisasi rakyat pendirinya sekaligus juga mengakomodasi keperluan konsultasi strategi kemenangan bagi para kader kader organisasi rakyat tersebut.

Gerakan Rakyat menuju Gerakan Politik

Dari pengalaman PPR dalam proses pembangunan menjadi sebuah kekuatan politik peserta Pemilu 2009 terlepas dari kegagalan mencapai proses verifikasi tahap factual maka beberapa pelajaran penting dan berharga patut untuk dicatat, antara lain adalah :

Pertama, sebenarnya para pendiri PPR menyadari sepenuhnya bahwa kami tidak pernah meragukan komitmen dan militansi dari semua kader baik yang berasal dari organisasi rakyat maupun LSM/Ornop. Bertahun tahun kami terbiasa dengan kerja kerja pengorganisasian di basis massa. Aroma kekalahan juga sudah menjadi hal yang biasa manakala melakukan advokasi rakyat dalam berhadapan dengan hegemoni kekuasaan dan modal. Akan tetapi satu hal yang perlu dipertebal adalah kesabaran dan ketekunan dalam menjalankan kerja kerja administratif formal. Meskipun proses kerja administratif telah dilalui dengan baik oleh PPR namun masih saja terdengar keluhan dari sejumlah kader bahwa adalah sangat menyebalkan untuk urusan yang satu ini yakni administrative formal.

Kedua, sebagaimana gerakan rakyat pada umumnya, pola perlawanannya selalu sporadis dan tidak merata secara wilayah/teritori. Hal ini bisa dipahami mengingat basis kerja awalnya

adalah advokasi pada problem kerakyatan yang telah manifes (*normative issues*) misal penggusuran tanah rakyat, tuntutan kenaikan upah, nelayan tradisional versus trawl, dsb. Ketika gerakan rakyat ini akan ditranformasikan menjadi gerakan politik (parlementer) inilah tampak gerakan rakyat mengalami kelemahan. Pola gerakan politik parlementer menuntut pendekatan teritori atau wilayah. Sementara dalam pola gerakan rakyat tak mengenal teritori karena berangkatnya adalah dari konflik/advokasi.

Ketiga, sebagai partai politik yang belum berhasil menjadi peserta Pemilu 2009 namun memiliki banyak kader yang sedang ‘magang’ menjadi caleg di sejumlah partai politik lain, satu persoalan yang juga harus dihadapi adalah birokrasi partai. Birokrasi partai politik bagaikan ‘hutan rimba’ yang selama ini nyaris kurang diperhitungkan oleh kalangan gerakan rakyat. Pengalaman penting dari sejumlah kader yang magang menyatakan bahwa kemenangan administratif dan birokrasi dalam sebuah partai politik identik dengan memenangkan 40% pertarungan politik yang sesungguhnya. Birokrasi partai adalah sebuah arena yang mencerminkan bagaimana sebuah kekuasaan dikelola. Bila tidak membiasakan diri merebut birokrasinya maka sama halnya tidak mempersiapkan diri menjadi pemenang dan mengelola kemenangan atau kekuasaan.

Dari sedikit pengalaman PPR ini kami coba membagi kepada rekan rekan aktifis gerakan rakyat bahwa konsolidasi internal gerakan rakyat di seluruh Indonesia tak perlu lagi diperdebatkan. Itu sebuah keniscayaan yang memang harus dikerjakan ke depan. Kami melihat bahwa saat ini rumusan platform politik dan ideologi dari sebuah gerakan politik akan menjadi jauh lebih bermakna dan dapat menjadi obor penerang manakala alat politiknya dapat memasuki tataran politik formal. Bilamana eksis dalam tataran politik formal maka akan lebih mudah menjalankan platform dan ideologi politik.

Pembebasan Perempuan dan Politik Kuota

Zely Ariane¹

”...walaupun perundang-undangan merupakan sebuah permulaan penting, namun perannya tidak lebih sebagai sebuah permulaan saja. Perubahan politiklah yang akan terus berkelanjutan dan harus dilengkapi oleh perubahan ekonomi, sosial dan budaya—sebuah pendekatan yang menyeluruh bagi persoalan yang menyeluruh pula.”

(Sarah Wagner, dalam “Feminisme Mengubah Masyarakat, Perjuangan Pembebasan Perempuan dalam Revolusi Bolivarian Venezuela”,

Penerbit: Jaringan Nasional Perempuan Mahardhika dan Kalyanamitra 2006)

1 Juru Bicara Komite Politik Rakyat Miskin – Partai Rakyat Demokratik (KPRM-PRD), Koordinator Urusan Pendidikan dan Bacaan Komite Nasional Jaringan Nasional Perempuan Mahardhika (KN-JNPM), Koord. Departemen Pendidikan dan Propaganda Dewan Harian Nasional Persatuan Politik Rakyat Miskin (DHN-PPRM). Disarikan dari makalah yang dipresentasikan pada Seminar “Kuota 30% dalam Partai dan Parlemen, Solusi atau Bencana?” di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 27 Februari 2008, serta makalah pada Seminar “Kuota 50%: Mungkin atau Tidak?, Belajar dari Gerakan Perempuan Amerika Latin, di Auditorium Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta, 15 Mei 2008.

Terima kasih kepada gerakan muda demokratik yang telah berani mempelopori perlawanan terhadap kediktatoran Soeharto hingga berhasil menjatuhkannya secara *de jure* tahun 1998. Gerakan itulah yang telah memberi landasan bagi berkembangnya kesadaran, metode gerakan, dan organisasi-organisasi perempuan beserta berbagai gagasannya, yang menentukan bagi arah perjuangan perempuan saat ini.

Tulisan berikut akan membahas pentingnya tuntutan kesetaraan perempuan, dalam salah satu wujudnya, yaitu, kuota terhadap perempuan di berbagai jabatan publik, sebagai salah satu landasan bagi pembebasan perempuan sebagai tenaga produktif².

Demokrasi adalah Landasannya

Pembebasan perempuan membutuhkan demokrasi. Karena demokrasi memberi ruang bagi perubahan masyarakat, mulai dari unitnya yang terkecil yaitu keluarga, sampai pada yang lebih besar, yaitu negara. Demokrasi mengajarkan masyarakat patriarki³ agar toleran terhadap perempuan; bahkan turut memajukan perempuan. Sehingga kaum perempuan memiliki landasan untuk setara.

Demokrasi memberi peluang bagi kaum perempuan untuk meningkatkan kapasitasnya, melalui tuntutan perbesaran akses

2 Tenaga produktif dalam wujudnya adalah manusia, alat-alat kerjanya (termasuk teknologi dan pengetahuannya), serta alam. Manusia adalah penentu berkembangnya tenaga produktif, karena manusialah—dengan pengalaman dan pengetahuannya—yang menciptakan alat kerja untuk mengolah alam.

3 Patriarki adalah produk budaya yang menyubordinasikan perempuan di bawah kekuasaan laki-laki; bahwa kedudukan perempuan lebih rendah dengan laki-laki.

atas sumber-sumber daya ekonomi⁴ dan politik⁵. Oleh karena itu demokrasi sekaligus menciptakan prasyarat material bagi kesetaraan perempuan.

Namun demikian, demokrasi yang tidak menghendaki kesetaraan partisipasi mayoritas rakyat dan kaum perempuan; atau demokrasi yang hanya menguntungkan segelintir elit (demokrasi elit), bukanlah demokrasi yang membebaskan perempuan. Karena demokrasi yang demikian akan menghambat perubahan mendasar masyarakat, yang artinya menutup jalan bagi perjuangan pembebasan perempuan.

Kapitalisme Penghambatnya

Di dalam kapitalisme⁶, demokrasi tidak mampu menyetarakan perempuan. Demokrasi digunakan oleh kepentingan modal untuk melanggengkan kekuasaan elit politik (baik laki-laki maupun perempuan) yang pro modal. Demokrasi hanya dikembangkan sebatas menguntungkan akumulasi modal. Tidak ada tempat bagi partisipasi rakyat dan kaum perempuan yang melawan kehendak modal⁷.

4 Sumber daya ekonomi secara adil hanya akan didapatkan melalui sosialisasi alat-alat produksi (yaitu alat-alat yang menciptakan kemakmuran rakyat—dalam bentuk modal, uang, gedung-gedung, mesin, tanah, dst) dari tangan segelintir pemilik alat produksi (kapitalis)—yang masih didominasi oleh laki-laki—ke tangan mayoritas rakyat dan kaum perempuan.

5 Yaitu akses yang setara terhadap seluruh posisi/jabatan-jabatan pengambilan keputusan diberbagai sektor dan tingkatan masyarakat, termasuk hak-hak politik, sosial, dan budaya lainnya.

6 Sistem kapitalisme adalah sistem/corak produksi (ekonomi) yang melindungi kepemilikan terhadap alat produksi (sumber-sumber kesejahteraan rakyat) di tangan segelintir orang, dengan menghisap/memiskinkan mayoritas orang yang bekerja di dunia. Kapitalis adalah pemilik modal.

7 Contoh nyata seperti penyiksaan dan pembunuhan terhadap Marsinah, seorang buruh perempuan yang berani melawan negara dan pemilik modal; pembantaian

Kapitalisme, dalam bentuk tertingginya yakni penjajahan modal asing (imperialisme), lewat topeng globalisasi (neoliberalisme⁸) saat ini, adalah penghambat utama kesetaraan kaum perempuan di seluruh dunia, khususnya kaum perempuan di negeri-negeri miskin (dunia ketiga) yang terjajah secara ekonomi. Di negeri-negeri miskin, hanya segelintir perempuan kelas atas yang berpengetahuan dan bisa bersekolah hingga Perguruan Tinggi, mayoritas lainnya merupakan penderita buta huruf paling tinggi; berpendidikan rendah; hingga rentan terhadap pekerjaan-pekerjaan tidak produktif dan tidak bermartabat.

Ada 100 juta kaum muda perempuan di negeri dunia ketiga, yang dalam 10 tahun ke depan, akan menikah sebelum usia 18 tahun. Sehingga, setiap tahun, 14 juta remaja perempuan yang berpotensi melahirkan, berkonsekuensi meninggal, terkait komplikasi kehamilan yang resikonya 2 hingga 5 kali lebih tinggi dibanding perempuan berusia duapuluhan. Sebanyak 600 juta kaum perempuan dalam keadaan buta huruf. Setiap tahun tak kurang dari 800.000 orang diperdagangkan dan dieksploitasi secara seksual ke luar negeri, dan 80% nya adalah kaum muda perempuan. Ditengah kemajuan teknologi reproduksi dan pengobatan di dunia saat ini, tak kurang 500.000 kaum perempuan justru mati melahirkan setiap tahunnya, dan 8 juta lebih menderita sakit jangka panjang akibat komplikasi kehamilan.

dan penangkapan tanpa peradilan terhadap aktivis-aktivis Gerwani tahun 1965. Semua itu karena perjuangan mereka menentang kehendak dan para pemilik modal.

8 Globalisasi neoliberal adalah dilepasnya tanggung jawab negara terhadap berbagai sektor yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, bentuknya antara lain privatisasi (swastanisasi) perusahaan-perusahaan vital negara, liberalisasi investasi dan keuangan; pemotongan subsidi rakyat, dst, terhadap negeri-negeri dunia ketiga—yang tidak dijalankan di negara-negara dunia pertama sebagai konseptornya sendiri.

Hal ini terjadi bukan saja karena pemerintah di negeri-negeri tersebut tidak punya “kehendak politik (*political will*) untuk memajukan perempuan; atau hambatan budaya patriarkinya yang masih kuat; namun lebih jauh lagi, negeri-negeri tersebut, sudah ‘ditundukkan’ secara ekonomi dan politik oleh institusi-institusi keuangan internasional yang jahat, dalam berbagai skenario hutang luar negeri untuk meloloskan kebijakan neoliberal. Dan celakanya, pemerintahnya pun bermental calo, sehingga dengan sukarela menjalankannya.

Kebijakan-kebijakan itu dikenal sebagai Program-program Penyesuaian Struktural (SAP’s) atau Konsensus Washington, yang dilahirkan oleh desakan pemerintah negeri-negeri maju (utamanya Amerika Serikat/AS), Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Dunia (WB), yang pada intinya menghendaki liberalisasi/ dibukanya pasar negeri-negeri dunia ketiga terhadap komoditi barang dan jasa perusahaan-perusahaan kapitalis internasional negeri-negeri maju; dibebaskannya perusahaan-perusahaan tersebut menguasai berbagai sumber daya alam (bahan mentah) negeri-negeri dunia ketiga—sambil memanfaatkan murahness ongkos tenaga kerja di negeri-negeri dunia ke-3.

Akibatnya, milyaran dolar keuntungan per hari yang dibawa pulang oleh PT. Freeport dari tanah Papua Barat, bersih dari tanggung jawab untuk membebaskan kaum perempuan Papua dari buta huruf; menyediakan lapangan kerja produktif lewat industrialisasi; perumahan yang layak; akses kesehatan yang modern untuk memerangi HIV/AIDS dan malaria. Demikian pula milyaran dolar per hari yang dibawa pulang secara bebas oleh Exxon Mobil, Nestle, Unilever, Toyota, Suzuki, Nokia, Danone, Sony Erricsson, dan seterusnya, ke kantung-kantung para pemiliknya di Amerika Serikat, Jepang, Belanda, Perancis, Jerman, dan Inggris, yang merupakan negeri-negeri tempat perputaran modal terbesar di dunia.

Oleh karena itulah negeri-negeri itu dinamakan negeri-negeri maju, atau negeri dunia pertama, dengan pendapatan perkapita rakyatnya jauh di atas 2 dolar/hari⁹, sementara negeri-negeri seperti Indonesia disebut negeri miskin¹⁰ atau dunia ketiga, dengan pendapatan riil perkapita rakyatnya jauh di bawah 2 dolar perhari¹¹. Karena itu juga rakyat di negeri-negeri maju bisa lebih sejahtera — walau seiring dengan krisis kapitalisme semakin banyak pula hak-hak kesejahteraan rakyat dipotong oleh pemerintahannya¹².

Oleh sebab itu juga, tidak seperti kaum perempuan di negeri-negeri miskin, kaum perempuan di negeri maju secara politik memiliki syarat untuk dapat lebih maju lagi. Terbukti dengan meningkatnya peran mereka di bidang politik, profesional, maupun akademik dewasa ini (itupun masih timpang jika dibandingkan dengan jumlah seluruh perempuan).

Secara historis, syarat tersebut bisa terpenuhi akibat *booming* ekonomi kapitalisme pasca perang Dunia ke-2 yang membutuhkan penambahan jumlah tenaga kerja perempuan (walaupun dengan upah yang tidak sama dengan laki-laki, peningkatan karir yang lebih sulit, dan PHK yang lebih mudah), sehingga banyak kaum perempuan diharuskan keluar dari

9 Angka 2 dolar perhari adalah patokan (jahat) yang dibuat oleh Bank Dunia untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu negeri dari tingkat pendapatan perkapitanya. Negeri dengan pendapatan di bawah 2 dolar/hari dinyatakan miskin. Nilai hidup manusia dunia ketiga tersebut disamakan dengan nilai subsidi seekor sapi di negeri seperti AS.

10 Pemerintah negeri-negeri maju memperhalus istilahnya menjadi negeri berkembang, sedang berkembang dan terbelakang.

11 Jika dibandingkan dengan kenaikan harga, nilai upah justru mengalami penurunan.

12 Misalnya, pemerintah Jerman memotong alokasi dana untuk jaminan sosial hari tua, kesehatan, dan pendidikan. Pemerintah Perancis dan Belanda memperpanjang usia pensiun, memotong subsidi kesehatan, memotong subsidi untuk pelayanan sosial (termasuk tempat-tempat penitipan anak dan gaji bagi ibu-ibu rumah tangga).

wilayah domestik¹³. Sejak itu pula akses terhadap pendidikan, pengetahuan, serta lapangan pekerjaan terbuka, membuat mereka memiliki kapasitas untuk menjadi lebih setara¹⁴.

Namun, sayang, feminisme yang salah arah membuat kapasitas mereka untuk dapat lebih maju kemudian berhenti pada sekadar ajang-ajang aktualisasi diri (kebebasan berekspresi dan hak atas tubuh semata), kesetaraan formal di berbagai jabatan publik, bahkan kompetisi antar sesama perempuan dan/atau laki-laki.

Hanya sedikit aktivis dan kelompok perempuan negeri-negeri maju yang ikut bertanggung jawab dan bersolidaritas terhadap penghidupan kaum perempuan di negeri miskin, lewat berbagai isu anti globalisasi neoliberal, seperti penghapusan hutang, perdagangan yang adil, anti *sweatshops*¹⁵, penghentian invasi AS, dll. Sebagian lainnya lebih banyak terperangkap hanya pada kampanye isu-isu yang sifatnya elementer, seperti hak-hak kesehatan reproduksi dan HIV/AIDS; target-target pembangunan milenium (MDGs), kuota 30% perempuan di berbagai jabatan publik, dst, yang tidak mungkin dapat tercapai tanpa dibarengi dengan perlawanan terhadap globalisasi neoliberal.

Sementara untuk sekadar menuju kesetaraan formal pun, kaum perempuan di negeri-negeri miskin harus mati-matian berjuang untuk mendapatkannya. Karena syarat-syarat utama kemajuan ternaga produktif, seperti akses atas pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan, menjadi semakin sulit

13 Itupun tidak bertahan lama, karena di era 1950-60-an, seiring krisis kapitalisme, kampanye agar perempuan kembali ke-rumah pun dikumandangkan untuk menutupi ketidakmampuan kapitalisme menyediakan lapangan kerja produktif bagi perempuan.

14 Untuk lebih jelas, pelajari latar belakang dan ciri-ciri gerakan perempuan gelombang kedua di negeri-negeri kapitalis maju.

15 Kampanye melawan kondisi kerja dan upah yang buruk di negeri-negeri dunia ke-3.

terpenuhi jika sebagai besar anggaran negara digunakan untuk membayar hutang luar negeri. Belum lagi akses terhadap kesehatan, pendidikan, air bersih, telekomunikasi (sebagai sumber informasi), bahkan sumber makanan sehat, menjadi semakin mahal akibat liberalisasi dan privatisasi; usaha-usaha menengah-kecil gulung tikar akibat masuknya barang-barang asing; dan akibat liberalisasi keuangan, lalu lalang arus modal spekulatif lintas negara, terbebas dari tanggung jawab untuk membangun sektor-sektor produktif, sumber lapangan pekerjaan di suatu negeri. Ditengah situasi ini kesetaraan hanya ada di atas kertas dan pidato-pidato para pejabat saja¹⁶.

Di negeri miskin seperti Indonesia, kesetaraan formal perempuan di berbagai bidang hanya mampu dijangkau oleh segelintir elit perempuan (umumnya berasal dari keluarga kapitalis dalam negeri dan sebagian kelas menengah). Sementara mayoritas lainnya harus berjuang mati-matian untuk sekadar bertahan hidup dari kemiskinan akibat penjajahan modal asing. Kaum perempuanlah yang menjadi korban terbesar dari kemiskinan; dan inilah yang disebut feminisasi kemiskinan.

Feminisasi kemiskinan harus menjadi isu politik utama dalam perjuangan pembebasan perempuan, karena tidak mungkin ada kesetaraan politik mayoritas perempuan di tengah kemiskinan masyarakat.

Patriarki dan Politik Kuota

Selain kapitalisme, patriarki yang menganggap kedudukan perempuan tidak sama dengan laki-laki; bahwa kaum perempuan secara biologis memang lebih lemah, adalah penghambat historis

16 Menjadi masuk akal kenapa CEDAW di Indonesia, dan diseluruh negeri dunia ke-3, tidak dapat terpenuhi.

kemajuan tenaga produktif perempuan. Usia patriarki ini sudah ribuan tahun lamanya, ditandai sejak berakhirnya sistem komunal primitif¹⁷. Sehingga tak heran jika kaum perempuan sendiri sering kali tidak sadar dan pasrah, bahkan membela anggapan bahwa ketidaksetaraan gender adalah takdir biologisnya sebagai perempuan.

Namun, karena patriarki berusia lebih muda dari usia masyarakat manusia, maka perkembangan tenaga produktif memberikan jalan untuk melawan patriarki¹⁸. Kerja produktif (untuk kemandirian ekonomi) dan organisasi (untuk kemandirian politik) adalah dua jalan utama yang mampu memberi kaum perempuan kekuatan ekonomi dan politik untuk lepas dari dominasi kekuasaan laki-laki. Jalan antaranya adalah dengan mendukung politik kuota terhadap perempuan di berbagai jabatan publik¹⁹.

17 Lihat: *The Dispossession of Women*, Pat Brewer, Resistance Book, 2000; diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Lilik HS, dengan judul *Menyingkirkan Perempuan*, terbit di PEMBEBASAN—tabloid PRD—sebanyak 5 edisi, pada tahun 2005.

18 Kemajuan tenaga produktif yang diikuti kemajuan kebudayaan dan sistem politik, sudah (dan akan terus) memberi jalan bagi pembebasan perempuan.

19 Gelombang tuntutan terhadap kuota belakangan ini, merupakan bagian dari gerakan serupa di dunia. Penerapan kuota ditujukan untuk meningkatkan jumlah perempuan di dalam institusi-institusi politik baik berdasarkan pemilihan maupun penunjukan. Kuota tersebut meliputi tiga tipe, yakni tipe kursi yang dicadangkan, tipe kuota partai politik, dan tipe kuota legislatif untuk perempuan. Kampanye kuota sudah diadopsi dan diperdebatkan di lebih dari 100 negeri di dunia. Meskipun kursi yang dicadangkan untuk perempuan pertama kali muncul di tahun 1930-an, kuota partai politik merupakan tipe yang paling luas diterima hingga tahun 1990-an. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan proporsi perempuan di antara kandidat-kandidat partai lainnya, dan dimandatkan dengan jumlah sekitar 10% hingga 50% perempuan. (*Quota Laws for Women in Politics: A New Type of State Feminism?*, Mona Lena Krook, Assistant Professor of Political Science and Women and Gender Studies, Department of Political Science, Washington University, Paper presented at the European Consortium for Political Research, Joint Sessions of Workshops, Granada, Spain, April 14-19, 2005].

Politik kuota bukan belas kasihan terhadap perempuan, melainkan bentuk pengakuan terhadap kenyataan sosial bahwa kaum perempuan bergerak dari titik berangkat yang sudah tidak setara secara historis dengan laki-laki. Politik kuota juga berguna untuk mendemokratisasi keluarga dan negara—membuat keduanya lebih toleran terhadap perempuan. Melalui kuota, sistem masyarakat patriarki dikondisikan untuk memberi akses politik kepada perempuan, sekaligus mendorong kaum perempuan sendiri keluar dari wilayah rumah tangga ke wilayah politik.

Seringkali kaum perempuan yang sudah terkondisikan di wilayah rumah tangga kemudian enggan atau takut terlibat dalam politik, apalagi dogmatisme tafsiran agama yang melarang perempuan menjadi pemimpin²⁰. Kampanye politik kuota bermanfaat untuk melawan ketakutan dan penafsiran semacam itu, sekaligus mendorong perempuan untuk berfikir yang lebih besar dari sekadar kesejahteraan keluarga; yakni berfikir tentang arah kebijakan dan perubahan kekuasaan negara.

Politik kuota adalah bentuk perjuangan lanjutan perempuan, setelah tuntutan hak pilih bagi perempuan di awal abad 20 tercapai. Sedangkan kuota 30% perempuan adalah sebuah *affirmative action*²¹ yang bertujuan untuk mengontrol jumlah perempuan di lembaga-lembaga publik (utamanya parlemen), seperti yang disepakati dalam Konferensi Tingkat Tinggi Menteri-Menteri Asia Pasifik, Konferensi Beijing, ataupun dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325. Angka 30% adalah pembatasan minimal yang disepakati secara internasional untuk mendorong keterwakilan perempuan. Pada prinsipnya, angka ini harus terus bergulir menuju kesetaraan penuh hingga 50% (seperti yang sudah berlaku di Venezuela dan Spanyol).

20 Ingat kasus penolakan partai-partai politik Islam terhadap kepemimpinan Megawati.

21 Tindakan khusus sementara untuk mempercepat kesetaraan.

Politik kuota juga berguna untuk melawan domestifikasi²² dan dominasi laki-laki atas perempuan, yang bukan merupakan takdir perempuan²³. Kaum perempuan saat ini semakin banyak yang tidak lagi sekadar menjadi pendamping suami dan pengurus rumah tangga, akibat kebutuhan kapitalisme atas tenaga kerja perempuan; sekaligus dampak ketidakmampuan kapitalisme menyediakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan²⁴.

Bila dilihat dari pengertian-pengertian di atas, sebenarnya, politik kuota dapat dianggap sebagai kompromi, akibat kapitalisme yang tidak mampu menyejahterakan perempuan melalui akses terhadap pekerjaan-pekerjaan produktif, yang dibutuhkan perempuan agar ia mandiri secara ekonomi; mandiri dari kekuasaan institusi keluarga patriarki; dengan demikian menjadi mandiri secara politik. Produktivitas ekonomi perempuan adalah kunci kesetaraannya di dalam keluarga dan negara.

Dalam sejarahnya, kapitalisme terpaksa memutarbalikkan nilai-nilai lama dalam institusi keluarga karena kebutuhannya akan cadangan tenaga kerja perempuan, namun di sisi lain, akibat ketidakmampuannya menyediakan lapangan kerja secara berkesinambungan, kapitalisme sekaligus mempertahankan nilai-nilai tersebut dalam bentuk: beban ganda perempuan (bahwa perempuan pekerja tidak boleh melupakan tugas domestiknya sebagai istri dan perempuan).

22 Pembatasan peran perempuan hanya pada persoalan-persoalan kerumah-tanggaan.

23 Pada corak produksi masyarakat berburu/pengumpul makanan dan peternakan/pertanian holtikultura, kaum perempuan tidak berada di wilayah domestik. Bersama laki-laki, kaum perempuan juga melakukan perburuan—bahkan berkuasa atas hasil-hasil buruan; mengerjakan pertanian—bahkan berkuasa terhadap hasil pertanian. Tapi semua itu tidak melahirkan penindasan.

24 Kaum perempuan saat ini dipaksa keluar rumah dan mencari pekerjaan apapun untuk menambah penghasilan keluarga. Fenomena Tenaga Kerja Wanita dari Indonesia adalah bentuk paling nyata dari ketidakmampuan kapitalisme pemeratakan lapangan pekerjaan.

Padahal, semua pekerjaan domestik saat ini sudah bisa ditangani secara sosial (seperti tempat-tempat pemeliharaan dan pendidikan anak), dan atau melalui pemanfaatan teknologi (seperti mesin cuci, kompor listrik, makanan sehat cepat saji, dll). Namun oleh kapitalisme pula, pelayanan sosial dan teknologi untuk menggantikan pekerjaan domestik, tidak tersedia bagi mayoritas perempuan miskin di seluruh dunia.

Memanfaatkan Politik Kuota untuk Sebanyak-banyaknya Perempuan di Parlemen?

Di dalam sistem kapitalisme dan demokrasi perwakilan (demokrasi elit pro modal), kampanye kuota tidak serta merta memberi manfaat dan atau mampu mendorong partisipasi perempuan di dalam politik. Bahkan, ironis, kampanye kuota digunakan sekadar untuk mendulang suara perempuan, tanpa tanggung jawab untuk mendorong kesadaran politik perempuan yang sejati.

Pada umumnya kampanye kuota diartikan sebagai pengharapan, bahwa, dengan bertambahnya jumlah perempuan di parlemen, maka akan mendorong kemaksimalan lahirnya produk perundang-undangan yang memberi perlindungan kepada perempuan. Padahal, untuk melahirkan kebijakan yang semacam itu, tidak cukup sekadar memenangkan pimpinan politik yang berjenis kelamin perempuan. Dalam banyak kasus, justru para pimpinan perempuan berbalik menindas perempuan.

Sebagai contoh, di era rezim Soeharto (antara tahun 1987-1992) keterwakilan perempuan di parlemen adalah yang tertinggi sejarah demokrasi perwakilan Indonesia (65 perempuan dari 500 orang laki-laki, atau 13%), padahal tidak ada demokrasi di masa itu—tidak ada pemilu yang demokratis dan tidak ada

calon perempuan yang dipilih secara demokratis. Produk hukum perundangan (selain ratifikasi CEDAW²⁵) yang dihasilkan pun lebih banyak merugikan mayoritas rakyat dan kaum perempuan.

Bandingkan di era Soekarno dengan perwakilan perempuan ‘hanya’ 3,8-6% (antara tahun 1950-1959), padahal mobilisasi gerakan perempuan begitu gencar dalam banyak isu politik dan jender negara²⁶. Secara politik—padahal ditengah situasi ekonomi yang sangat sulit—di masa inilah justru pendirian sekolah-sekolah lebih masif dan pemberantasan buta huruf lebih signifikan, dibanding era pemerintahan manapun di Indonesia.

Apakah dengan demikian, disatu sisi, politik kuota tidak menjadi penting—asalkan kebijakan negara pro terhadap kepentingan-kepentingan perempuan? Atau disisi lain, politik kuota penting—sehingga sebanyak-banyaknya perempuan seharusnya masuk kedalam berbagai partai politik—agar sebanyak mungkin kebijakan negara menjadi lebih pro perempuan?

Sekarang ini, banyak kelompok perempuan berposisi setuju pada sebanyak-banyaknya perempuan di parlemen (titik—tidak peduli apapun alat politiknya). Apalagi UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, mengharuskan kuota 30% bagi perempuan di kepengurusan nasional partainya.

25 Itupun tanpa ratifikasi protokol opsionalnya.

26 Pada tanggal 17 Desember 1953, sejumlah organisasi perempuan melancarkan demonstrasi menentang Keputusan Pemerintah No.19 Tahun 1952 yang secara gamblang mensyahkan poligami bagi para pegawai. Demonstrasi ini merupakan satu-satunya yang terjadi sesudah Indonesia merdeka yang diikuti oleh kalangan luas gerakan perempuan dan yang memperjuangkan kepentingan jender perempuan. Dalam isu politik non-gender pun kaum perempuan aktif terlibat, semisal, protes terhadap gerakan 17 Oktober 1952 yang dipimpin Nasution untuk mengudeta Soekarno, perlawanan terhadap Darul Islam, mendukung nasionalisasi perusahaan Caltex milik Inggris—bersama-sama serikat buruh mengorgasir pemogokan dengan tidak mau memasak dan membersihkan rumah majikan perusahaan tersebut—mendukung berbagai aksi buruh, petani, mahasiswa, dst. [Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia, Saskia EW, Garba Budaya, 1999]

Menurut mereka, urgensi keterlibatan perempuan di parlemen adalah: (1) mengurus persoalan-persoalan yang hanya dialami oleh perempuan, seperti kebijakan-kebijakan terkait reproduksi perempuan, (2) mengurus persoalan kesejahteraan keluarga, seperti harga sembako, pendidikan, kesehatan, anak-anak, kelompok usia lanjut, dst yang diasosiasikan sebagai tugas jender perempuan, (3) mencegah diskriminasi dalam politik dan ekonomi, (4) perubahan paradigma penyelesaian konflik dengan mengutamakan perdamaian dan menghindari kekerasan—karena kekerasan adalah ‘maskulin’, dan (5) azas keadilan dalam keterwakilan²⁷.

Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana agar secara fundamental kaum perempuan dapat memperoleh akses teknologi reproduksi yang murah dan aman; pendidikan, kesehatan, harga yang terjangkau, pendapatan yang layak, akses pekerjaan yang setara? Berapa diantara kaum perempuan yang ada di parlemen masuk ke dalam komisi-komisi ‘maskulin’, berapa persentasenya dibandingkan yang masuk ke dalam komisi-komisi ‘feminin’? Berapa diantaranya yang menjadi ketua komisi? Atau ketua fraksi?

Berapa diantaranya yang: menolak rencana kenaikan BBM?; menolak privatisasi dan swastanisasi perusahaan-perusahaan vital bagi hajat hidup rakyat (PDAM, PLN, Telkom, Rumah Sakit, Perguruan Tinggi, Transportasi)?; menolak membayar hutang luar negeri?; menolak UU Penanaman Modal, UU Sumber Daya Air, UU Kelistrikan, UU Kesehatan, UU Perbankan, UU Pangan, memperjuangkan kuota 20% anggaran pendidikan, dst?

Apakah semua itu tidak ada kaitannya dengan persoalan yang khusus dialami perempuan—reproduksi atau

27 Representasi Perempuan dalam Politik, Okti Muktini Ali, hal. 55-57, Jurnal Demokrasi, Jurnal Forum LSM DIY, Volume II|No.8|Februari 2005, dengan judul “Indonesia Pasca Pemilihan Presiden”.

kekerasan dalam rumah tangga? Apakah privatisasi rumah sakit tidak ada kaitannya dengan hak reproduksi? Apakah mahalnnya harga susu tidak ada kaitannya dengan dominasi modal Nestle? Apakah mereka tidak belajar, bahwa mahalnnya harga sembako akibat liberalisasi perdagangan, ditengah Indonesia yang tidak memiliki industri pangan yang kuat? Apakah mereka tidak sadar bahwa perempuan tani menjadi semakin miskin akibat liberalisasi sektor pangan? Apakah mereka berfikir tentang hal-hal sebesar itu? Hal-hal diluar ‘tugas-tugas jendernya’? Hal-hal yang, padahal, dapat membebaskannya dari ‘tugas-tugas jender’?

Memang tidak semua perempuan menutup mata atau tidak mengerti terhadap hal-hal besar tersebut. Namun sebagian yang mengerti itu pun terpaksa tidak berkulit dihadapan kekuatan partai, yang, tidak satupun mau berkompromi terhadap tuntutan-tuntutan besar fundamental semacam itu. Dan hasilnya, mereka ternyata lebih takut kepada partai daripada mati-matian membela kepentingan kaumnya.

Membela Politik Kuota; Menolak Terkooptasi demi Kuota

Dari pengalaman pemilu selama ini, masuknya perempuan ke dalam partai-partai sisa lama dan reformis gadungan²⁸, TIDAK BERHASIL memberi kontribusi signifikan bagi kemajuan dan kesejahteraan jutaan perempuan yang semakin miskin di Indonesia.

Memang, keberhasilan secara formal sudah ada, misalnya dalam melahirkan Undang-Undang Nomor 7/1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia; UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak; dan UU

28 Diantaranya GOLKAR, PDIP, PAN, PKB, PPP, PKS, PBB, PD, PBR

23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta yang terakhir UU No.2 tahun 2008 tentang keharusan kuota 30% dalam Partai Politik.

Namun, berdasarkan hasil evaluasi, sebagian besar LSM-LSM Perempuan sendiri mengakui, bahwa penerapan aturan-aturan tersebut, dan mekanismenya, masih sangat jauh dari harapan. Produk Perda-perda Syariah, UU Migas, UU Perbankan, UU Pangan, dst, adalah bukti kegagalan perjuangan perempuan secara politik di parlemen dan partai-partai yang ada sekarang.

Hal yang samapun diakui pada penerapan kuota 30% perempuan dalam pemilu 2004 lalu. Tanpa berdaya, wakil perempuan dipecundangi oleh partai politik peserta pemilu 2004, seperti: (sebelum masuk partai) mengharuskan caleg perempuan membayar tarif pendaftaran yang tinggi; (setelah diterima sebagai caleg partai) ditempatkan di nomer sepatu, (setelah terpilih menjadi anggota parlemen) mendapatkan posisi-posisi yang tidak sentral, dst.

Sejarah 10 tahun pasca reformasi sudah membuktikan, bahwa partai-partai sisa lama dan reformis gadungan saat ini, serta partai-partai baru yang dipenuhi oleh pejabat-pejabat korup dan tentara palangkar HAM²⁹, tidak akan dan tidak punya kapasitas untuk berlutik terhadap kehendak modal asing. Semuanya tergantung pada modal asing; dan berlomba-lomba untuk menjadi agen modal asing. Mungkin sebagian diantaranya menolak Perda-perda Syariah atau mendukung UU KDRT, tapi sikap itu kontradiktif dengan dukungan mereka terhadap kehendak modal asing—yang berkontribusi pada peningkatan kemiskinan yang memicu pemberlakuan Perda Syariah dan kekerasan rumah tangga.

29 Diantaranya HANURA, Gerindra, PKPB, PPRN, Partai Republikan, dst.

Partai-partai tersebut juga terbukti tidak berkepentingan untuk menegakkan HAM di Indonesia. Berbagai kasus-kasus kekerasan negara dan aparat militer, yang mengorbankan perempuan, tidak berhasil diadili hingga sekarang. Kalaupun ada peradilan, hanya mengadili para pelaku lapangan namun tidak menjangkau para Jenderal dan pemimpin negara. Sebut saja kasus-kasus pembunuhan, pemenjaraan, pemerkosaan jutaan perempuan yang menjadi simpatisan maupun dituduh sebagai simpatisan PKI; kasus Talangsari, Kerusuhan Mei 1998, Jugun Ianfu, dst, membeku di hadapan para wakil partai di parlemen itu.

Dalam hal inilah politik kuota tidak akan memberi manfaat apapun bagi mayoritas kaum perempuan. Selagi kaum perempuan, yang mendukung kampanye politik kuota, memisah-misahkan (mengeksklusifkan) tuntutan-tuntutan jender dengan tuntutan perubahan sistem ekonomi dan politik; maka selamanya mereka akan melanggengkan ketidaksetaraan jender—memenjarakan perempuan kedalam ‘tugas-tugas jender’; selama itu pula demokrasi tidak akan meningkatkan partisipasi riil perempuan—demokrasi elit.

Politik kuota menjadi bermanfaat jika, minimal, kaum perempuan memperjuangkan: (a) pembangunan alat politik/partai alternatif yang sama sekali baru, bebas dari kekuatan sisa lama dan reformis gadungan, (b) memperjuangkan produk perundang-undangan yang membangun kemandirian ekonomi negeri, sekaligus memutus hubungan dengan IMF, Bank Dunia, dan WTO, (c) mempermudah akses bagi partisipasi langsung perempuan untuk menentukan produk perundang-undangan (misalnya melalui referendum, dengar pendapat yang melibatkan semua organisasi-organisasi perempuan, penyusunan anggaran partisipatif, dll), (d) memperjuangkan akses kaum perempuan terhadap pekerjaan-pekerjaan produktif.

Untuk contoh kasus Indonesia, program-program maksimum/strategis yang menjadi jalan keluar rakyat, yang harus mulai difikirkan kaum perempuan selain ‘tugas-tugas jender’ nya, sekaligus diperjuangkan lewat keterwakilan politik 30%, antara lain:

- (1) Membangun industri nasional oleh dan untuk rakyat³⁰;
- (2) Pemusatan pembiayaan dalam negeri³¹ untuk membiayai pembangunan industri nasional dan pemenuhan kebutuhan mendesak rakyat;
- (3) Pemenuhan tuntutan-tuntutan mendesak rakyat³²;

30 Industrialisasi yang dimaksud tidak dalam makna industrialisasi ala kapitalisme—menggenjot produksi atas dasar akumulasi keuntungan bukan berdasarkan kebutuhan mayoritas rakyat, sehingga berkecenderungan eksploitatif terhadap alam. Industrialisasi yang harus diperjuangkan kaum perempuan adalah pembangunan industri dalam negeri berdasarkan kebutuhan mendesak mayoritas rakyat (dan perempuan): industri pangan; baja; serat optik; petrokimia dll, dan harus diputuskan oleh mayoritas rakyat (dan perempuan), termasuk dijalankan oleh mayoritas rakyat (dan perempuan), dengan memperhitungkan keberlangsungan lingkungan. Inilah makna industrialisasi oleh dan untuk rakyat, yang sekaligus dapat menjawab persoalan ketersediaan lapangan pekerjaan.

31 Dengan jalan penghapusan hutang luar negeri dan penarikan kembali obligasi rekapitalisasi perbankan; mengambil alih (nasionalisasi) perusahaan-perusahaan pertambangan dan energi, termasuk perbankan asing di bawah kontrol rakyat; pengenaan pajak dan royalti pada transaksi-transaksi keuangan spekulatif; penyitaan harta koruptor; dan pengenaan pajak progresif.

32 Diantara begitu banyaknya tuntutan kesejahteraan dan demokrasi yang mendesak, ada sepuluh tuntutan utama yang dapat mempersatukan mayoritas perempuan dengan rakyat. Yakni: penurunan harga sembako, pendidikan & kesehatan gratis, kenaikan pendapatan & lapangan pekerjaan, perumahan, air bersih, energi, & transportasi murah & massal, UU Politik & pemilu yang demokratis, penulisan sejarah yang jujur untuk mengembalikan ingatan sejarah rakyat, pengadilan kejahatan HAM dan pembubaran komando teritorial tentara, pengadilan dan penyitaan harta Soeharto & kroni serta koruptor lainnya, perbaikan kerusakan lingkungan. Sementara untuk tuntutan kesetaraan gender perempuan yang harus selalu direkatkan dengan tuntutan-tuntutan mendesak rakyat rakyat lainnya, antara lain: kuota 50% perempuan untuk seluruh jabatan publik, judicial review UU Perkawinan No.1 tahun 1974, menolak kriminalisasi pelacuran, menolak poligami, upah yang sama bagi pekerja perempuan paruh waktu, upah penuh bagi perempuan pekerja yang cuti hamil, melahirkan dan memelihara anak, hak cuti haid, fasilitas

- (4) Kekuasaan rakyat³³;
- (5) Kebudayaan yang maju³⁴.

Sehingga kampanye kuota 30% harus dapat dikongkritkan makna dan isi perjuangannya menjadi, misalnya:

“30% kuota perempuan di partai politik, parlemen dan semua posisi publik, untuk penghapusan utang luar negeri dan nasionalisasi perusahaan pertambangan untuk kesejahteraan rakyat; 30% kuota perempuan untuk pekerjaan produktif yang bermartabat bagi rakyat dan perempuan dengan jalan industrialisasi nasional”.

Atau

“30% kuota perempuan untuk menuntut perlindungan negara atas penafsiran yang demokratis terhadap ajaran agama”³⁵;

penitipan dan pendidikan anak yang gratis dan berkualitas, kebebasan dan jaminan informasi bagi perempuan untuk menentukan alat kontrasepsinya, dll.

- 33 Sebuah kekuasaan baru yang lebih setara dan dijalankan oleh mayoritas rakyat serta perempuan lewat berbagai organisasi-organisasi rakyat dan perempuan di dalam dewan-dewan rakyat/komunitas. Ditangan organisasi-organisasi inilah kekuasaan yang demokratis dapat dilahirkan. Dewan-dewan Perencanaan Lokal Komunitas di Venezuela; Dewan-dewan Rakyat di Kuba; dan sistem penganggaran partisipatif di Porto Alegre, Brazil, adalah bentuk-bentuk awal kekuasaan rakyat di abad ini. Kekuasaan semacam ini, bila semakin konsisten, maka tidak akan lagi mempercayakan pembagian kekuasaan dalam sistem Trias Politika, artinya perubahan fundamental atas ketatanegaraan suatu bangsa.
- 34 Kebudayaan maju adalah kebudayaan yang lebih setara, adil, ilmiah, demokratis, toleran, bersolidaritas, modern, dan produktif, dibutuhkan untuk perubahan masyarakat secara fundamental. Kebudayaan semacam ini harus diperjuangkan untuk menggantikan bagian-bagian kebudayaan lama yang mistik, tidak demokratis, dan tidak produktif, termasuk di dalamnya budaya patriarki yang menindas perempuan.
- 35 Kajian-kajian demokratis terhadap ajaran agama seperti Kumpulan Hukum Islam (KHI) yang banyak mengkritisi UU Perkawinan, misalnya, tidak mendapat tempat di negeri ini—ditolak mentah-mentah oleh MUI.

pemberantasan buta huruf³⁶, dan akses terhadap kesehatan serta pendidikan gratis untuk seluruh rakyat miskin³⁷”.

Inilah landasan menuju sosialisme. Karena tidak ada pembebasan perempuan tanpa sosialisme, dan sebaliknya.

Gerakan Massa Perempuan & Perubahan Kekuasaan Politik

Partisipasi perempuan adalah kunci keberhasilan politik kuota. Tapi partisipasi perempuan belum tentu lahir dari kampanye politik kuota. Yang dapat mendorong partisipasi perempuan di dalam politik hanyalah organisasi dan gerakan politik perempuan. Organisasi politik perempuan adalah sekolah bagi peningkatan kesadaran dan kapasitas politik perempuan, melahirkan pimpinan-pimpinan politik perempuan, yang bertujuan untuk mengubah kebijakan dan model kekuasaan negara. Organisasi perempuan yang mendukung dan terlibat dalam pembangunan gerakan perempuan, adalah senjata paling ampuh perubahan masyarakat.

Walaupun berkembangnya gerakan perempuan tidak serta merta memberi jaminan terhadap kemenangan politik perempuan, namun gerakanlah juga satu-satunya alat yang paling berkekuatan untuk mendorong kemenangan tersebut, sekaligus mempertahankannya. Ini tercermin dalam sejarah, ketika Gerwani dan gerakan perempuan lainnya tidak menghasilkan jumlah perwakilan perempuan yang signifikan di parlemen. Namun justru di masa itulah tuntutan-tuntutan perempuan paling luas di dukung oleh rakyat.

36 Dari 15,5 juta penderita buta huruf di Indonesia, 68% diantaranya adalah kaum perempuan di bawah 15 tahun. (Data Depdiknas tahun 2005).

37 Ada 11% perempuan berusia 10 tahun ke atas yang belum pernah bersekolah sama sekali; hanya 1,5% perempuan yang sampai pada bangku Universitas; dan 70,7% perempuan tidak bersekolah lagi.

Sebaliknya, tanpa gerakan perempuan progresif, kampanye kuota dapat dimanipulasi oleh segelintir elit perempuan dan partai politik busuk, yang sekadar memanfaatkan suara kaum perempuan untuk kepentingan modal di dalam parlemen. Banyaknya perwakilan perempuan di era kediktatoran Soeharto, ditengah kematian gerakan politik perempuan, adalah cermin sejarah lainnya. Seperti halnya saat ini, ketika ruang perempuan untuk membangun gerakan politik progresif sudah tersedia, tidak dimanfaatkan untuk membangkitkan partisipasi riil perempuan. Para aktivis dan tokoh-tokoh perempuan saat ini lebih banyak menjadi pragmatis (dengan pembenaran ‘harus realistis’) dengan menganalisis partisipasi rakyat dan perempuan sekadar dalam bentuk kertas suara.

Yang terakhir inilah, paling banyak dijadikan pembenaran bagi para aktivis perempuan, yang kemarin beramai-ramai masuk ke dalam partai-partai peserta pemilu (dan berharap dapat menjadi caleg No.1). Pembenaran tersebut landasannya macam-macam: *pertama*, percaya bahwa sedikit demi sedikit—dengan semakin banyak perempuan yang terlibat—partai tersebut dapat berubah (seperti harapan bahwa rakyat dapat keluar dari kemiskinan kalau mereka berusaha lebih keras dan rajin); *kedua*, ajang pembuktian/aktualisasi diri/peningkatan karir/cari duit atau popularitas semata; *ketiga*, perubahan mendasar dapat dilakukan dari parlemen, baik lewat produk UU maupun lewat berbagai kampanye di panggung parlemen.

Mereka lupa, bahwa dalam sejarahnya, perjuangan kesetaraan dan pembebasan perempuan bukan dimulai dari parlemen; melainkan oleh karena hidupnya gerakan rakyat bersama-sama gerakan perempuan. Tidak akan ada kemenangan Hak Pilih bagi Perempuan tanpa meluasnya gerakan perempuan menuntut perbaikan kondisi kerja, kenaikan upah, pengurangan jam kerja, dan tuntutan pembebasan budak di paruh pertama

abad 20, termasuk perjuangan untuk Sosialisme oleh rakyat Rusia dan Jerman.

Tidak akan ada pembatasan terhadap usia perkawinan perempuan dan laki-laki, kebebasan menentukan pasangan hidup, dan kesetaraan pendidikan, tanpa pergerakan yang dilakukan oleh Istri Sedar melawan Kolonialisme; Gerakan Wanita Sedar dan Gerakan Wanita Indonesia era 50-60-an melawan neo-kolonialisme. Demikian pula sumbangan gerakan penjatuhan Soeharto terhadap menjamurnya organisasi-organisasi perempuan. Begitu besarnya pengaruh gerakan pada kemajuan kesetaraan perempuan di dunia; tanpa gerakan tak ada kemajuan seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Hanya gerakan massa perempuan yang meluas dan semakin menyatu sajalah (dengan berbagai organisasi dan partai politiknya sendiri), yang mampu mengubah watak negara. Hanya gerakan semacam itu yang dapat mengubah dan mengambil alih kekuasaan negara secara fundamental.

Oleh karena itu, pembangunan gerakan perempuan (kembali), dengan menyatukan *platform* perjuangan politik yang anti penjajahan modal asing (imperialisme) dan patriarki (termasuk kekerasan/militerisme), mendesak untuk dilakukan. Sudah saatnya seluruh kaum perempuan lintas sektor dan kepentingan, yang memiliki kesamaan *platform* tersebut, berkumpul dalam sebuah kongres persatuan perempuan Indonesia. Dalam kongres tersebut kita dapat merumuskan metode pembangunan gerakan serta tujuannya: yakni, sebesar-besarnya untuk pembebasan mayoritas kaum perempuan sebagai tenaga produktif di negeri ini, dan diseluruh dunia. * * *